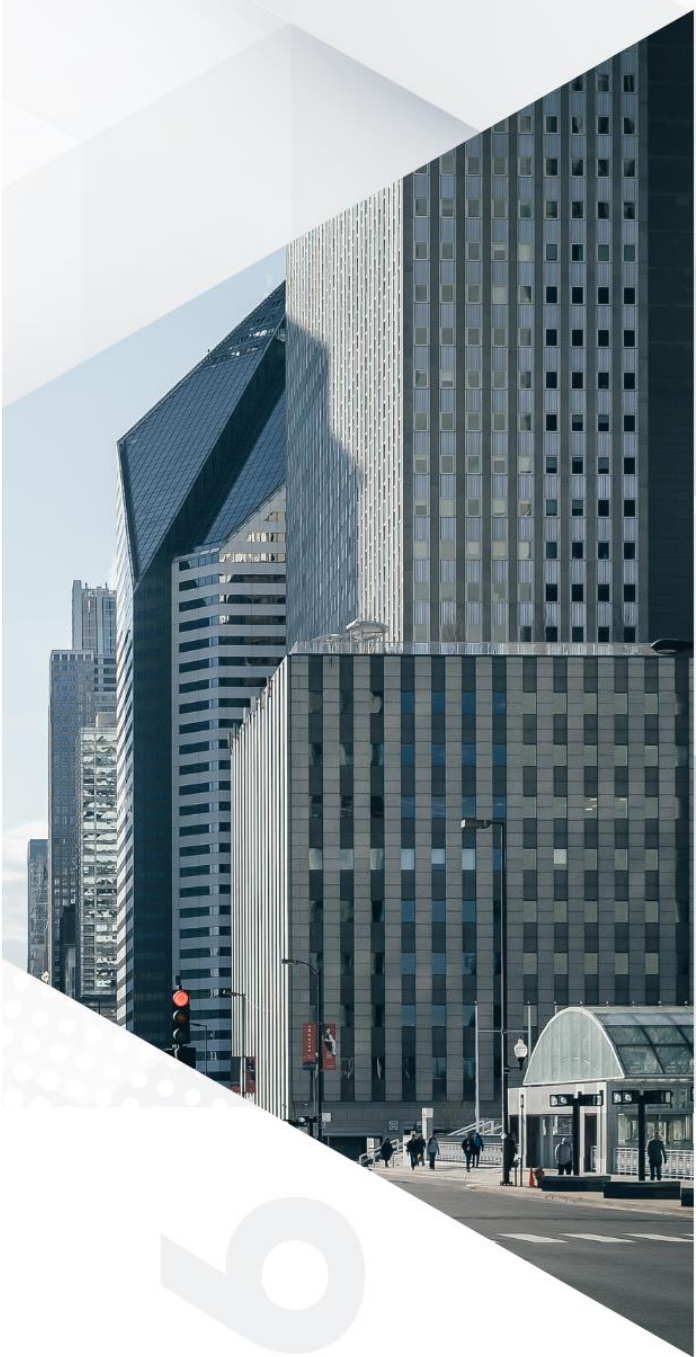




2026

TRIBULAN I

LAPORAN TJSL KABUPATEN PASURUAN

DISUSUN OLEH:
BAPPERIDA KABUPATEN PASURUAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kabupaten Pasuruan Tribulan I Tahun 2026 dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan memandang bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Implementasi TJSL tidak hanya menjadi kewajiban dunia usaha, tetapi juga membutuhkan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui sinergi tersebut, diharapkan program TJSL mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan.

Dokumen laporan ini menyajikan gambaran pelaksanaan program TJSL oleh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan selama Tribulan I Tahun 2026, yang meliputi jenis kegiatan, sebaran lokasi, serta alokasi anggaran yang telah direalisasikan. Selain itu, laporan ini juga dilengkapi dengan analisis pelaksanaan program sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan TJSL pada masa yang akan datang agar lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi para pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSL di Kabupaten Pasuruan, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan ini, baik dari unsur perusahaan, perangkat daerah, maupun pihak terkait lainnya. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Pasuruan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Pasuruan, 19 Maret 2026
Kepala Bapperida
Kabupaten Pasuruan



BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kabupaten Pasuruan Tribulan I Tahun 2026 disusun sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi terhadap kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah. Laporan ini memuat gambaran pelaksanaan TJSL yang dilakukan oleh perusahaan di Kabupaten Pasuruan, meliputi jenis program, sebaran wilayah, serta aspek pembiayaan kegiatan.

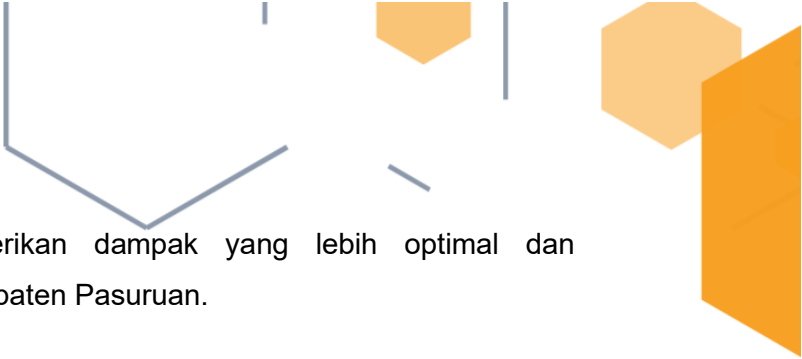
Berdasarkan hasil inventarisasi data, pelaksanaan TJSL pada Tribulan I Tahun 2026 tercatat sebanyak 5 kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai perusahaan. Pelaksanaan program TJSL menunjukkan adanya perubahan pola yang lebih terarah dan terintegrasi, di mana kegiatan difokuskan pada program prioritas daerah, khususnya dalam percepatan penurunan stunting.

Dari sisi jenis program, pelaksanaan TJSL didominasi oleh program bina lingkungan dan sosial, sementara program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat masih terbatas, dan program kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi belum dilaksanakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan TJSL masih berfokus pada aspek sosial dan kesehatan, serta belum sepenuhnya menyentuh pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan distribusi wilayah, pelaksanaan TJSL Tribulan I Tahun 2026 menunjukkan sebaran yang relatif merata di berbagai kecamatan. Kegiatan tidak hanya terpusat di kawasan industri, tetapi juga menjangkau wilayah non-industri dengan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat, khususnya melalui fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas.

Dari aspek pembiayaan, sebagian besar kegiatan TJSL belum mencantumkan nilai anggaran secara rinci, sehingga analisis kontribusi finansial perusahaan belum dapat dilakukan secara komprehensif. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam sistem pelaporan agar lebih transparan dan terstandar.

Secara keseluruhan, pelaksanaan TJSL di Kabupaten Pasuruan Tribulan I Tahun 2026 telah menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dalam hal penyelarasan program dengan prioritas pembangunan daerah serta peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Ke depan, diperlukan upaya penguatan dalam diversifikasi program, khususnya pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelaporan dan koordinasi agar



pelaksanaan TJSL dapat memberikan dampak yang lebih optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.

DAFTAR ISI

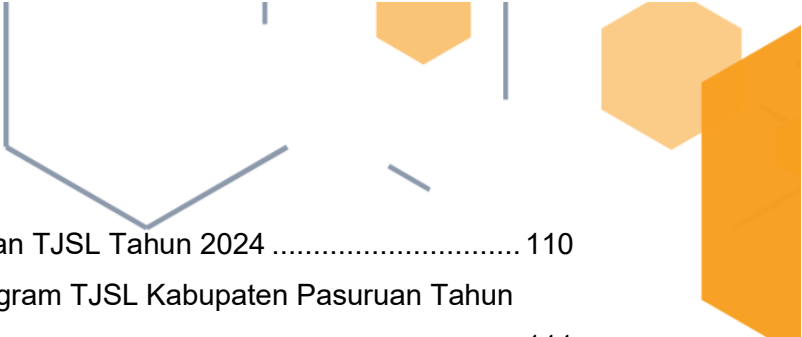
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PASURUAN	6
2.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah	6
2.2. Potensi Sumber Daya Daerah	8
2.2.1. Topografi	8
2.2.2. Geologi dan Jenis Tanah	12
2.2.3. Klimatologi	17
2.2.4. Penggunaan Lahan	18
2.2.5. Potensi Pengembangan Wilayah	20
2.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	28
2.3.1. Daya Dukung Air	28
2.3.2. Daya Dukung Pangan	30
2.3.3. Ketahanan Energi	31
2.4. Lingkungan Hidup Berkualitas	33
2.5. Kawasan Rawan bencana dan Perubahan Iklim	36
2.6. Demografi	43
2.6.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	43
2.6.2. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur	45
2.6.3. Persebaran Penduduk & Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan	47
2.6.4. Komposisi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan	52
2.6.5. Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan	54
2.6.6. Komposisi Penduduk berdasarkan Agama dan Kepercayaan yang Dianut	56
2.6.7. Proyeksi Demografi	57
2.7. Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	63
2.7.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	63
2.7.2. Indeks/Rasio Gini	65
2.7.3. Angka Kemiskinan	67
2.7.4. Tingkat Pengangguran Terbuka	70

2.7.5.	PDRB Perkapita	71
2.7.6.	Indeks Pembangunan Manusia	72
2.7.7.	Inflasi	75
2.8.	Aspek Pendidikan	76
2.8.1.	Rata-Rata Lama Sekolah.....	76
2.8.2.	Harapan Lama Sekolah (HLS).....	78
2.9.	Aspek Kesehatan	80
2.9.1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	80
2.9.2.	Angka Kematian Ibu (AKI)	83
2.9.3.	Angka Harapan Hidup (AHH).....	85
2.9.4.	Prevalensi Stunting.....	86
2.9.5.	Cakupan Balita Gizi Buruk	87
2.10.	Infrastruktur	89
BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN PASURUAN		92
3.1.	Panduan Umum Tanggung Jawab Sosial (TJSL) berdasarkan SNI ISO 26000:2013	92
3.2.	Panduan Umum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (TJSL) di Kabupaten Pasuruan.....	93
3.3.	Kelembagaan Pelaksanaan TJSL	95
3.4.	Mekanisme Pelaksanaan TJSL	96
3.5.	Program dan Kegiatan TJSL	98
3.6.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	100
3.7.	Penghargaan dan Sanksi	102
BAB IV LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN PASURUAN		104
4.1.	Gambaran Umum Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Di Kabupaten Pasuruan Tribulan I Tahun 2026.....	104
4.2.	Klasifikasi Program TJSL Berdasarkan Jenis Kegiatan	105
4.2.1.	Klasifikasi Program TJSL Berdasarkan Jenis Program ..	105
4.2.2.	Program Kesehatan.....	107
4.2.3.	Program Pendidikan dan Sosial.....	107
4.3.	Distribusi Lokasi Pelaksanaan TJSL	107
4.4.	Alokasi Anggaran Program TJSL Tribulan I Tahun 2026.....	109
4.5.	Laporan Pelaksanaan Program TJSL di Kabupaten Pasuruan Tribulan I Tahun 2026	110
BAB V PENUTUP		112
5.1.	Kesimpulan	112

5.2. Rekomendasi	113
------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya.....	6
Tabel 2. 2 Kondisi Ketinggian Topografi Berdasarkan Klasifikasinya	10
Tabel 2. 3 Jenis Batuan di Wilayah Kabupaten Pasuruan.....	14
Tabel 2. 4 Iklim Kabupaten Pasuruan	18
Tabel 2. 5 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan	19
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan menurut Kelompok Umur Tahun 2024	45
Tabel 2. 7 Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024....	48
Tabel 2. 8 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	49
Tabel 2. 9 Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	51
Tabel 2. 10 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	53
Tabel 2. 11 Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan.....	54
Tabel 2. 12 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	55
Tabel 2. 13 Presentase Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan	55
Tabel 2. 14 Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan.....	57
Tabel 2. 15 Presentase Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	57
Tabel 2. 16 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030	59
Tabel 2. 17 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030	60
Tabel 2. 18 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020- 2024	69
Tabel 2. 19 Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2021 (Metode SP2010).....	73
Tabel 2. 20 Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024 (Metode Long Form SP2020).....	74
Tabel 2. 21 Posyandu Aktif di Kabupaten Pasuruan	82
Tabel 4. 1 Rekapitulasi Program TJSL Berdasarkan Jenis Program Tahun 2024	106
Tabel 4. 2 Distribusi Pelaksanaan TJSL Berdasarkan Wilayah	108



Tabel 4. 3 Klasifikasi Alokasi Anggaran TJSL Tahun 2024	110
Tabel 4. 4 Laporan Pelaksanaan Program TJSL Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pasuruan.....	8
Gambar 2. 2 Kondisi Topografi Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Ketinggian	10
Gambar 2. 3 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan.....	19
Gambar 2. 4 Peta Sebaran Geosite di Kabupaten Pasuruan	28
Gambar 2. 5 Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Tahun 2029.....	30
Gambar 2. 6 Grafik Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Tahun 2029	31
Gambar 2. 7 Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	33
Gambar 2. 8 Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	34
Gambar 2. 9 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 ...	40
Gambar 2. 10 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	41
Gambar 2. 11 Penurunan Emisi GRK Kumulatif di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024	43
Gambar 2. 12 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	44
Gambar 2. 13 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024	47
Gambar 2. 14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	65
Gambar 2. 15 Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024.....	67
Gambar 2. 16 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024.....	69
Gambar 2. 17 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024	71
Gambar 2. 18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024.....	75
Gambar 2. 19 Inflasi Kabupaten Pasuruan/Kota Probolinggo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	76
Gambar 2. 20 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pasuruan.....	77
Gambar 2. 21 Harapan Sekolah di Kabupaten Pasuruan.....	79
Gambar 2. 22 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasuruan.....	80
Gambar 2. 23 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pasuruan	84
Gambar 2. 24 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan	86

Gambar 2. 25 Prevalensi Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024	87
Gambar 2. 26 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pasuruan	88
Gambar 2. 27 RTLH Kabupaten Pasuruan	90
Gambar 2. 28 Persentase Unit RTLH Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 .	91
Gambar 2. 29 Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	91
Gambar 4. 1 Proporsi Program TJSL Berdasarkan Jenis Program	106
Gambar 4. 2 Persentase Distribusi Pelaksanaan TJSL Berdasarkan Wilayah .	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) pada awalnya muncul sebagai respons atas menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan. Perusahaan dalam hal ini tidak hanya terbatas pada perseroan terbatas, melainkan mencakup seluruh bentuk kegiatan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Widjaja & Pratama, 2008). Seiring waktu, CSR berkembang menjadi suatu pendekatan penting dalam dunia usaha, terutama sejak tahun 1970-an, dan semakin dikenal luas setelah terbitnya buku *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998) karya John Elkington.

Elkington memperkenalkan konsep triple bottom line yang menekankan keseimbangan antara tiga aspek utama pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi (economic growth), perlindungan lingkungan (environmental protection), dan keadilan sosial (social equity), sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya dalam Brundtland Report (1987) oleh World Commission on Environment and Development (WCED). Konsep ini kemudian dikenal dengan prinsip 3P, yaitu profit, planet, dan people. Dengan demikian, perusahaan tidak lagi hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Initiative, 2002).

Di Indonesia, implementasi CSR telah memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bagian integral dari kegiatan usaha yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Secara konseptual, CSR merupakan komitmen dunia usaha untuk menjalankan kegiatan secara etis, mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat secara luas. Pelaksanaan CSR juga



mencerminkan adanya kemitraan strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang bersifat dinamis dan berkelanjutan (Marnelly, 2012). Dalam praktiknya, CSR tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan, seperti peningkatan reputasi, loyalitas konsumen, serta daya saing yang lebih kuat (Widjaja & Pratama, 2008).

Pada era saat ini, masyarakat semakin mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam menilai suatu perusahaan, tidak semata-mata berdasarkan harga atau produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, implementasi CSR menjadi salah satu strategi penting dalam membangun citra positif perusahaan. Reputasi yang baik tersebut pada akhirnya menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan.

CSR juga dipahami sebagai bentuk keterlibatan sosial perusahaan yang melampaui kewajiban hukum. McWilliams dan Siegel (2001) mendefinisikan CSR sebagai keterlibatan sosial, responsivitas, dan akuntabilitas perusahaan di luar aktivitas utama pencarian keuntungan dan di luar ketentuan yang diwajibkan oleh pemerintah. Sementara itu, World Business Council for Sustainable Development menyatakan bahwa CSR merupakan komitmen berkelanjutan dunia usaha untuk berperilaku etis serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja beserta keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat secara luas (Solihin, 2009).

Secara umum, CSR dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, CSR berkaitan erat dengan upaya mewujudkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, yang tidak hanya menekankan pada aspek keuntungan, tetapi juga pada akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat, bangsa, dan lingkungan global. CSR juga merupakan bentuk kerja sama antara perusahaan dan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin keberlanjutan usaha (Widjaja & Yeremia, 2008).

Dalam perspektif yang lebih operasional, CSR merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat secara umum (Widjaja & Yani, 2006). Kotler dan Lee (2005) juga menegaskan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab serta kontribusi sumber daya perusahaan.

Implementasi CSR memberikan berbagai manfaat strategis bagi perusahaan. Selain dapat mengurangi risiko dan potensi konflik dengan masyarakat, CSR juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan perusahaan dalam menghadapi krisis. Keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial mampu meningkatkan rasa bangga karyawan, memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan, serta menciptakan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara perusahaan dan lingkungan sekitarnya.

Secara keseluruhan, CSR merupakan bentuk kontribusi nyata dunia usaha dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pelaksanaan CSR, perusahaan tidak hanya berperan sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Pasuruan, praktik CSR menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, melalui sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Dokumen Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Pasuruan Tribulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Dokumen Laporan Tahunan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Pasuruan Tribulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut

1. Memberikan gambaran capaian kinerja Tim Fasilitasi dan Koordinasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Pasuruan sepanjang Tribulan I Tahun 2026;
2. Menyediakan informasi pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan selama Tribulan I Tahun 2026;
3. Menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Pasuruan; dan
4. Memberikan referensi bagi pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengembangan program CSR pada tahun berikutnya;

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen ini terdiri dari atas lima bab, sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan
Bab III	Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pasuruan
Bab IV	Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pasuruan
Bab V	Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

2.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis, Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7°32'42.14" - 7°57'24.32" Lintang Selatan dan 112°34'29.31"-113° 6'0.29" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan sebesar 1.474,02 km² dengan batas administrasi Kabupaten Pasuruan meliputi:

Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Selat Madura
Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo
Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu

Secara administratif, struktur kewilayahan di Kabupaten Pasuruan terorganisasi ke dalam pembagian unit pemerintahan yang jelas dan terperinci. Wilayah ini terbagi menjadi 24 kecamatan sebagai satuan administratif utama. Selanjutnya, di lingkup yang lebih spesifik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terdapat 24 kelurahan serta 341 desa yang tersebar di seluruh kecamatan tersebut. Rincian lengkap mengenai pembagian wilayah administratif ini disajikan secara mendetail pada Tabel berikut:

Tabel 2. 1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya

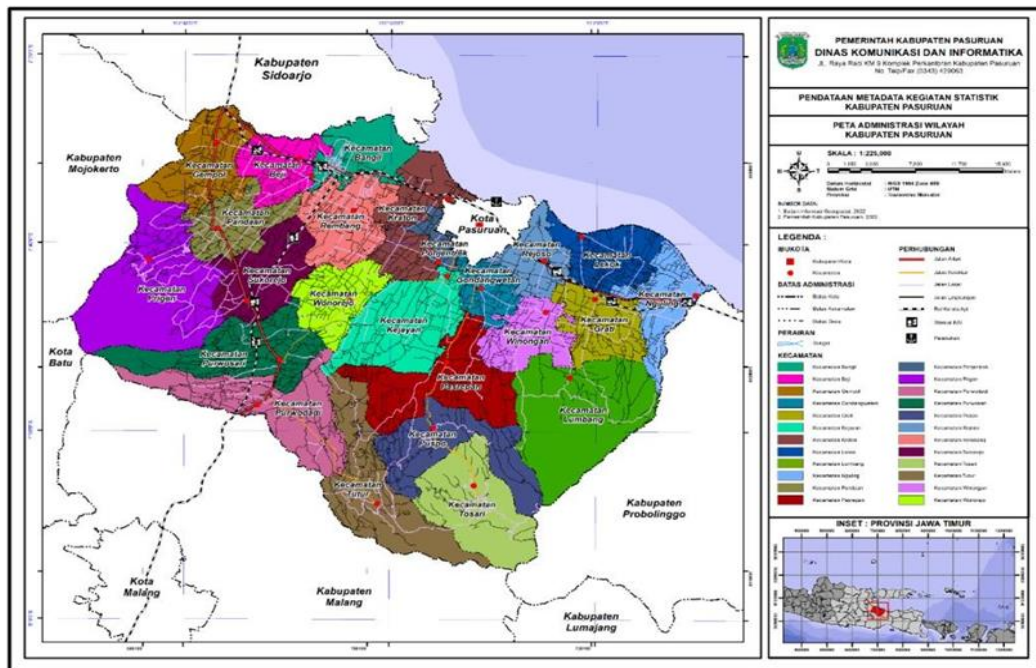
No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)	Presentase (%)
		Desa	Kelurahan		
1	Purwodadi	13	-	102,46	6,95
2	Tutur	12	-	86,30	5,85
3	Puspo	7	-	58,35	3,96
4	Lumbang	12	-	125,55	8,52
5	Pasrepan	17	-	89,95	6,10
6	Kejayan	24	1	79,15	5,37
7	Wonorejo	15	-	47,30	3,21
8	Purwosari	14	1	59,87	4,06
9	Sukorejo	19	-	58,18	3,95
10	Prigen	9	-	121,90	8,27
11	Pandaan	14	4	43,27	2,94
12	Gempol	15	-	64,92	4,40

No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km2)	Presentase (%)
		Desa	Kelurahan		
13	Beji	12	2	39,90	2,71
14	Bangil	4	11	44,60	3,03
15	Rembang	17	-	42,52	2,88
16	Kraton	25	-	50,75	3,44
17	Pohjentrek	11	3	11,88	0,81
18	Gondang Wetan	19	1	26,25	1,78
19	Winongan	18	-	45,97	3,12
20	Grati	14	1	50,78	3,45
21	Nguling	15	-	42,60	2,89
22	Lekok	11	-	46,57	3,16
23	Rejoso	16	-	37,00	2,51
24	Tosari	8	-	98,00	6,65
Kabupaten Pasuruan Total:		341	24	1.474,2	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Ditinjau dari perspektif ekonomi, letak geografis wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki posisi yang sangat strategis dan menguntungkan. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang berada tepat di simpul segitiga jalur ekonomi vital yang menghubungkan koridor Surabaya - Jember / Banyuwangi / Bali, koridor Surabaya - Malang, serta lintas Malang - Jember / Banyuwangi / Bali. Konektivitas wilayah ini semakin diperkuat dengan adanya lintasan jalur kereta api yang melayani angkutan penumpang maupun barang untuk rute Surabaya - Bangil - Banyuwangi dan Surabaya - Bangil - Malang.

Nilai strategis tersebut kian bertambah dengan adanya dukungan infrastruktur jalan bebas hambatan yang terintegrasi, meliputi ruas Tol Porong - Gempol, Gempol - Pandaan, Pandaan - Malang, Gempol - Pasuruan, hingga Pasuruan - Probolinggo. Pembangunan akses tol ini secara signifikan memangkas waktu tempuh menuju Surabaya, sehingga menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai destinasi investasi yang sangat tepat dan menarik bagi pengembangan sektor industri. Adapun visualisasi mengenai peta wilayah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan telah disajikan secara rinci pada Gambar berikut:



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pasuruan
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2. Potensi Sumber Daya Daerah

2.2.1. Topografi

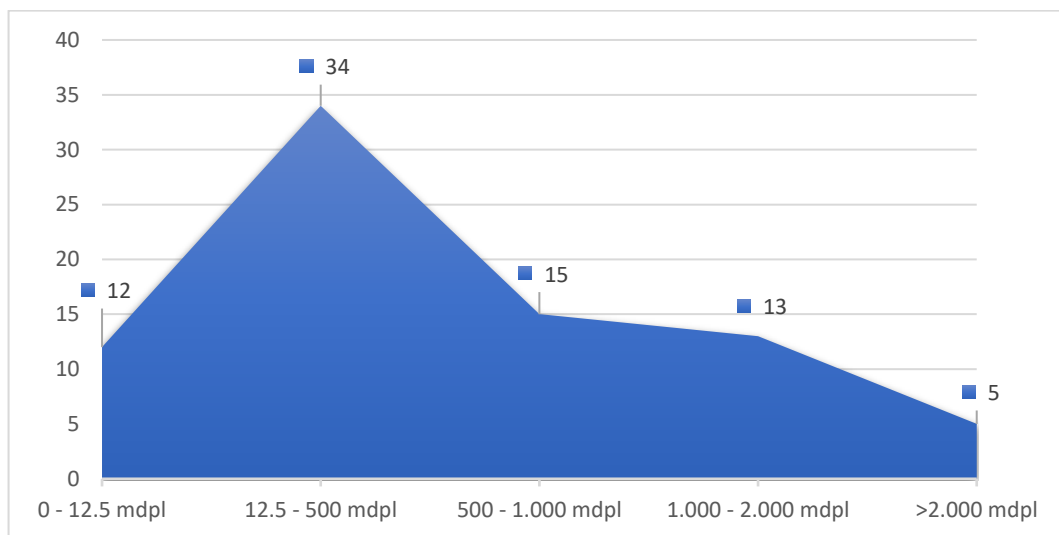
Secara topografis, bentang alam wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan variasi elevasi yang sangat beragam, terentang mulai dari titik terendah di 0 mdpl hingga mencapai puncak tertinggi di 3.313 meter di atas permukaan laut (mdpl). Data ketinggian ini tercatat secara rinci di setiap wilayah administrasi kecamatan. Karakteristik wilayah ini terbagi secara jelas berdasarkan letak geografisnya; dataran rendah mendominasi kawasan bagian utara, khususnya di sepanjang garis Pesisir Selat Madura, dengan rentang ketinggian antara 0 hingga 290 mdpl. Konsekuensi dari kondisi topografi yang rendah ini menyebabkan kawasan tersebut diidentifikasi memiliki potensi kerawanan terhadap ancaman bencana banjir.

Sebaliknya, kontur dataran tinggi terpusat pada bagian tenggara yang merupakan bagian dari Kawasan Gunung Bromo, serta di bagian barat daya yang meliputi Kawasan Gunung Welirang. Morfologi kawasan pegunungan di Kabupaten Pasuruan ini sebagian besar ditandai dengan kondisi kelereng yang terjal atau curam, yang secara alamiah membawa implikasi risiko berupa potensi bencana tanah longsor.

Lebih lanjut, berdasarkan analisis tingkat kemiringan lahan atau kelerengan, wilayah Kabupaten Pasuruan dapat diklasifikasikan secara spesifik ke dalam tujuh (7) kategori zona, yaitu sebagai berikut:

1. Zona Kelerengan 0 - 2% (Datar): Wilayah ini meliputi cakupan yang luas, antara lain mencakup seluruh wilayah Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kraton, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Lekok. Selain itu, zona ini juga mencakup sebagian wilayah dari Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Winongan, Kecamatan Grati, serta Kecamatan Nguling.
2. Zona Kelerengan 2 - 5% (Landai): Kategori ini tersebar meliputi sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Winongan, Kecamatan Grati, dan Kecamatan Nguling.
3. Zona Kelerengan 5 - 8% (Agak Miring): Kawasan yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Winongan, dan Kecamatan Lekok.
4. Zona Kelerengan 8 - 15% (Miring): Wilayah dengan kemiringan ini mencakup sebagian dari Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Winongan, serta Kecamatan Grati.
5. Zona Kelerengan 15 - 25% (Agak Curam): Daerah yang memiliki tingkat kemiringan ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tutar, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol, dan Kecamatan Beji.

6. Zona Kelerengan 25 - 45% (Curam): Kawasan dengan topografi curam ini terdapat pada sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Gempol.
7. Zona Kelerengan > 45% (Sangat Curam): Zona dengan kemiringan ekstrem ini meliputi sebagian wilayah di kawasan pegunungan, yaitu Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, serta Kecamatan Prigen.



Gambar 2. 2 Kondisi Topografi Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Ketinggian
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Berdasarkan visualisasi data yang disajikan pada Gambar tersebut, kondisi topografi wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan karakteristik yang sangat dinamis dan bervariasi apabila ditinjau dari aspek ketinggian lahan atau elevasi. Keragaman bentang alam ini menjadi dasar fundamental dalam pemetaan karakteristik geografis daerah tersebut. Oleh karena itu, merujuk pada perbedaan elevasi yang ada, wilayah Kabupaten Pasuruan diklasifikasikan secara spesifik ke dalam 5 (lima) kategori atau jenis wilayah. Rincian sistematis mengenai kelima klasifikasi wilayah tersebut dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 2. 2 Kondisi Ketinggian Topografi Berdasarkan Klasifikasinya

No	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
1	Wilayah Pesisir	0 - 12,5	18.819.04	Kawasan pengembangan usaha perikanan dan	Pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol,

No	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
				pertambahan	Kecamatan Beji, Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kraton, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, Winongan, Kecamatan Grati, Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling
2	Wilayah Dataran	12,5 - 500	50.384,02	Kawasan pengembangan pertanian, permukiman, perindustrian	Pada sebagian wilayah kecamatan - kecamatan di Kabupaten Pasuruan kecuali Kecamatan Tosari
3	Wilayah Perbukitan	500 - 1.000	21.877,17	Kawasan untuk tanaman keras/tahunan dan sebagai penyangga bagi kawasan perlindungan tanah dan air serta untuk lahan pertanian tanaman pangan dengan sistem terasiring	Sebagian kawasan Kecamatan Lumbang, Kecamatan Gempol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, Kecamatan Tosari, Pasrepan, Kecamatan Puspo, Kecamatan Purwosari, dan Kecamatan Prigen
4	Wilayah Pegunungan	1.000 - 2.000	18.615,08	Kawasan penyangga untuk perlindungan tanah dan air	Sebagian kawasan Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, Tosari,

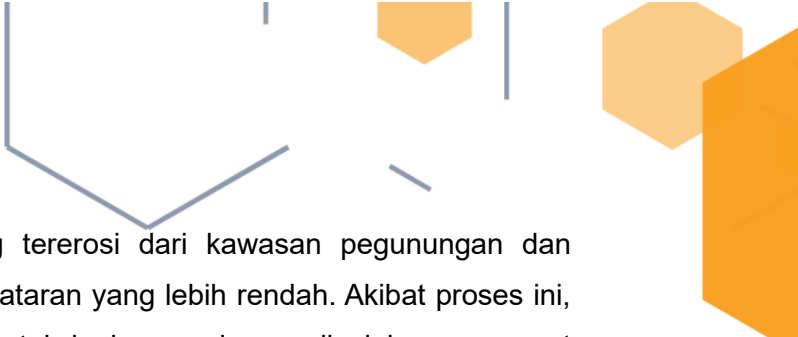
No	Jenis Wilayah	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Fungsional Wilayah	Persebaran Wilayah
					Kecamatan Lumbang, Kecamatan Puspo, Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Prigen
5	Kawasan Pegunungan Tinggi	>2.000	7.920,77	Kawasan hutan lindung yang berfungsi untuk melindungi kawasan bawahannya	Sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Puspo, Purwosari, dan Kecamatan Prigen

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.2.2. Geologi dan Jenis Tanah

Secara geologis, karakteristik litologi wilayah bagian selatan Kabupaten Pasuruan merupakan bagian integral dari bentang alam Pegunungan Malang Selatan yang secara dominan tersusun oleh struktur batuan vulkanik. Pembentukan formasi batuan ini merupakan hasil dari aktivitas vulkanisme gunung berapi yang terjadi pada masa lampau (paleovolcanism). Material penyusun kawasan ini mencakup variasi jenis batuan beku dan piroklastik, seperti andesit, basalt, serta batuan piroklastik lainnya. Keberadaan gunung-gunung api strato yang menjulang tinggi, khususnya Gunung Arjuno dan Gunung Welirang, menjadi bukti nyata sekaligus sumber material utama dari deposit batuan vulkanik yang tersebar luas di wilayah selatan ini.

Sementara itu, pada sisi bagian utara dan timur Kabupaten Pasuruan, kondisi geologinya didominasi oleh hamparan batuan sedimen. Jenis batuan ini terbentuk melalui proses sedimentasi yang kompleks, meliputi endapan sungai (fluvial), bentukan delta, hingga sedimen laut (marine sediment). Proses pembentukannya sangat dipengaruhi oleh dinamika geologis seperti mekanisme pengendapan material, sedimentasi berkelanjutan, serta aktivitas tektonik. Jaringan sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan berperan vital dalam



transportasi material endapan yang tererosi dari kawasan pegunungan dan perbukitan di sekitarnya menuju ke dataran yang lebih rendah. Akibat proses ini, pada kawasan dataran rendah terbentuk lapisan endapan alluvial yang sangat subur dan kaya akan kandungan bahan organik, yang pada gilirannya menjadi fondasi utama bagi kesuburan tanah untuk mendukung sektor pertanian yang makmur di wilayah tersebut.

Lebih jauh lagi, posisi geografis Wilayah Kabupaten Pasuruan berada dalam zona yang tergolong aktif secara tektonik. Hal ini ditandai dengan keberadaan jalur-jalur patahan (sesar) dan rekahan geologi yang mengindikasikan adanya potensi kerawanan terhadap bencana gempa bumi. Aktivitas tektonik yang berlangsung dalam kurun waktu geologis tersebut juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan konfigurasi relief permukaan bumi serta pola aliran sungai (drainase) yang ada saat ini. Di samping itu, beberapa bagian dari wilayah Kabupaten Pasuruan juga teridentifikasi memiliki kandungan deposit batu gamping (batu kapur). Batuan ini umumnya terbentuk dari proses sedimentasi laut purba dan kini menjadi salah satu sumber daya alam mineral yang bernilai ekonomis tinggi, khususnya sebagai bahan baku utama untuk mendukung industri konstruksi dan bahan bangunan.

Ditinjau dari perspektif struktur geologi secara makro, wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi secara proporsional ke dalam dua kelompok formasi geologi besar. Kelompok pertama adalah formasi gunung api kuartir muda (young quaternary) yang mendominasi wilayah dengan cakupan luasan mencapai 52,43%, sedangkan kelompok kedua adalah formasi kuartir tua (old quaternary) yang mencakup luasan sebesar 34,95%. Secara lebih spesifik, kondisi geologi wilayah ini tersusun atas dua belas (12) satuan batuan yang meliputi: Satuan Alluvium (Qa), Satuan Tuff Rabano (Qvtr), Satuan batuan gunung api kuartir atas Penanggungan (Qvn), Satuan batuan gunung api Arjuno-Welirang (Qvaw), Satuan batuan gunung api kuartir tengah Ringgit (Qvr), serta Satuan gunung api kuartir Tengger tua (Qpvtr).

Secara garis besar, klasifikasi jenis batuan yang terdapat di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori utama, yaitu: kelompok batuan permukaan, kelompok batuan sedimen, dan kelompok batuan gunung api. Rincian penjelasan teknis mengenai karakteristik masing-masing jenis batuan tersebut telah disajikan secara lengkap pada Tabel berikut.

Tabel 2. 3 Jenis Batuan di Wilayah Kabupaten Pasuruan

Jenis Batuan	Karakteristik dan Persebaran
Endapan Permukaan	
Batuan Alluvium	1. Terdiri dari bahan kerakal, kerikil, pasir, lempung dan lumpur 2. Terdiri dari endapan sungai Rejoso dan endapan pantai sepanjang Selat Madura
Batuan Sedimen	
Formasi Kabuh	1. Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batu lempung tufan, batu pasir gampingan, konglomerat, lempung dan tuf vulkan 2. Sebarannya tidak luas, terdapat disekitar Desa Raci dan di Beji
Formasi Jombang	1. Terdiri dari bahan breksi, batu pasir tufan, batu lempung tufan, lempung, batu gamping dan tufan 2. Sebarannya terdapat di sekitar Raci, sebelah selatan Bangil, Beji dan Gondangwetan
Formasi Welang	1. Terdiri Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batupasir, lempung, konglomerat dan tuf vulkan 2. Sebarannya tidak luas di Sungai Welang
Batuan Gunung Api	
Batuan Gunung Api Quarter Bawah (Gendis)	1. Terdiri dari bahan breksi gunung api, tuf breksi, lava, tuf dan aglomerat
Batuan Gunung Api Quarter Tengah (Ringgit)	1. Terdiri dari batuan gunung api ringgit, batuan gunung api tengger tua
Batuan Gunung Api Arjuna - Welirang	1. Terdiri dari breksi gunung api, lava, breksi tufan dan tuf
Batuan Gunung Api Tengger	1. Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, tuf abu dan aglomerat
Tuf Rabano	1. Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, breksituf dan tuf halus

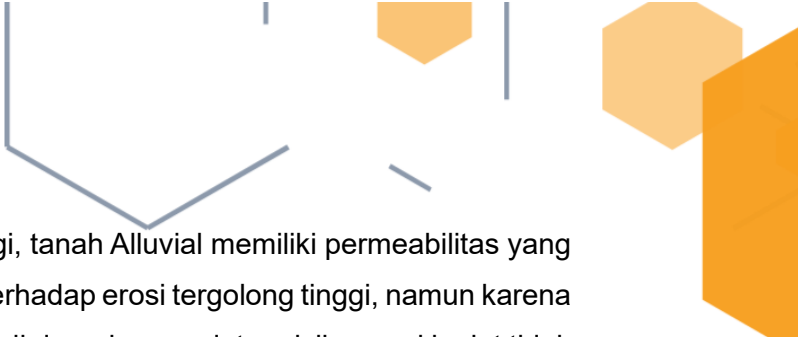
Jenis Batuan	Karakteristik dan Persebaran
Batuan Gunung Api Kuarter Atas Penanggungan	1. Terdiri dari breksi gunung api, lava tuf, breksi tufan, aglomerat dan lahar
Batuan Gunung Api Bromo	1. Terdiri dari breksi gunung api, lava, tuf, tuf breksi, dan lahar 2. Batuan ini merupakan endapan hasil kegiatan erupsi dari kelompok Gunung Bromo.
Pasir Gunung Api Tengger	1. Terdiri dari pasir gunung api, bom gunung api dan batu apung 2. Pasir gunung api ini merupakan endapan piroklastika muda yang terendapkan dalam kawah tengger, berbentuk tapal kuda yang mengelilingi kelompok G. Bromo

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Kompleksitas proses geologi yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang di wilayah Kabupaten Pasuruan telah meninggalkan jejak yang signifikan. Fenomena ini membentuk banyak rekaman peristiwa geologi yang unik dan menarik, yang memiliki nilai ilmiah serta estetika tinggi. Oleh karena itu, potensi ini perlu dikelola dan ditetapkan sebagai Warisan Geologi (Geological Heritage). Langkah pelestarian ini menjadi sangat krusial agar keberadaan situs-situs geologi tersebut tetap terjaga keasliannya dan terhindar dari kerusakan, sekaligus mendorong pengakuan status Warisan Geologi tersebut tidak hanya pada tingkat Nasional, tetapi juga menembus pengakuan di tingkat Internasional.

Lebih lanjut, beralih pada aspek pedologi atau karakteristik tanah, wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki variasi jenis tanah yang cukup beragam. Berdasarkan karakteristik fisik dan kimianya, jenis tanah di wilayah ini secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kelompok utama. Identifikasi ini penting untuk menentukan daya dukung lahan terhadap berbagai aktivitas pembangunan dan pertanian. Berikut adalah rincian keenam kelompok tanah tersebut:

1. Tanah Alluvial Jenis tanah ini memiliki karakteristik fisik berupa warna dominan kelabu dengan tekstur liat. Tingkat keasaman tanah ini bervariasi (aneka), namun memiliki kandungan zat organik yang tergolong lemah. Meskipun demikian, tingkat kejenuhan basanya berkisar antara sedang



hingga tinggi. Dari sisi hidrologi, tanah Alluvial memiliki permeabilitas yang rendah. Meskipun kepekaan terhadap erosi tergolong tinggi, namun karena sebarannya mayoritas berada di daerah yang datar, risiko erosi lanjut tidak terjadi secara signifikan. Pemanfaatan: Lahan dengan jenis tanah ini sangat cocok dan umum digunakan untuk budidaya padi sawah, tanaman palawija, serta kegiatan perikanan darat.

2. Tanah Regosol Tanah Regosol dicirikan dengan warna yang bervariasi dari kelabu hingga kuning dengan tekstur yang kasar atau berpasir. Kandungan liat pada tanah ini relatif sedikit, yakni kurang dari 40%. Sifat kimianya menunjukkan keasaman dan kejenuhan basa yang beraneka ragam, serta kandungan zat organik yang rendah. Tanah ini memiliki permeabilitas atau kemampuan meloloskan air yang tinggi, serta memiliki kepekaan yang tinggi pula terhadap erosi. Pemanfaatan: Jenis tanah ini mendukung untuk kegiatan pertanian seperti padi sawah, tanaman palawija, perkebunan tebu, serta budidaya berbagai jenis sayuran.
3. Tanah Andosol Tanah yang umumnya terbentuk dari material vulkanik ini memiliki ciri khas warna hitam hingga kuning. Teksturnya berkisar dari lempung hingga debu, dengan kandungan liat yang cenderung menurun. Derajat keasamannya berada pada rentang agak masam hingga netral, dengan kandungan zat organik yang lemah dan kejenuhan basa. Sifat fisiknya memiliki permeabilitas sedang, namun perlu diwaspadai karena memiliki kepekaan yang besar terhadap ancaman erosi. Pemanfaatan: Lahan Andosol sangat produktif untuk komoditas dataran tinggi seperti sayur-mayur, tanaman bunga-bunga, perkebunan teh, kopi, serta pengembangan hutan pinus.
4. Tanah Grumusol Karakteristik fisik tanah Grumusol ditandai dengan warna kelabu hingga hitam pekat. Tekstur tanah ini didominasi oleh liat, di mana kandungan liatnya akan semakin meningkat seiring bertambahnya kedalaman tanah. Secara kimiawi, tanah ini memiliki reaksi sedikit asam hingga alkalin (basa), dengan kadar zat organik yang rendah namun memiliki kejenuhan basa yang tinggi. Permeabilitas tanah ini rendah, yang menyebabkan air sulit meresap, dan memiliki kepekaan erosi yang besar. Pemanfaatan: Tanah ini dimanfaatkan secara luas untuk pertanian padi sawah, tanaman jagung, kedelai, tebu, kapas, serta sangat cocok untuk pertumbuhan hutan jati.

5. Tanah Mediteran Tanah Mediteran mudah dikenali dari warnanya yang kuning hingga merah. Tekstur tanah ini adalah lempung liat dengan tingkat keasaman mulai dari agak masam hingga netral. Kandungan zat organik di dalamnya tergolong rendah, namun memiliki kejenuhan basa yang tinggi. Sifat permeabilitasnya sedang, sementara kepekaan terhadap erosi berkisar dari besar hingga sedang, tergantung pada kondisi lingkungan sekitarnya. Pemanfaatan: Potensi lahan ini umumnya digunakan untuk areal persawahan (padi sawah), lahan tegalan, serta area pertumbuhan rumput untuk pakan ternak.
6. Tanah Latosol Jenis tanah ini memiliki warna khas merah hingga kuning dengan tekstur liat yang konsisten dari lapisan atas hingga ke bawah. Tingkat keasamannya berkisar dari masam hingga agak masam. Kandungan zat organiknya bervariasi dari rendah hingga agak sedang di lapisan permukaan (top soil) dan menurun pada lapisan yang lebih dalam. Kejenuhan basanya rendah hingga sedang, namun memiliki permeabilitas yang tinggi dan keunggulan berupa kepekaan erosi yang kecil, sehingga relatif stabil. Pemanfaatan: Tanah Latosol sangat mendukung berbagai jenis tanaman pertanian dan perkebunan, meliputi padi sawah, jagung, tanaman umbi-umbian, kelapa, coklat (kakao), cengkeh, kopi, maupun sebagai area hutan tropika.

2.2.3. Klimatologi

Secara klimatologis, karakteristik wilayah Kabupaten Pasuruan secara umum dikategorikan memiliki tipe iklim tropis basah. Kondisi cuaca dan iklim di daerah ini sangat dipengaruhi oleh dinamika sirkulasi udara regional, khususnya hembusan angin Muson yang bertiup secara periodik. Keberadaan angin Muson ini memegang peranan vital dalam membentuk pola iklim wilayah serta menentukan siklus pergantian musim. Fenomena alam tersebut mengakibatkan terjadinya dualisme musim, yakni musim penghujan yang ditandai dengan aktivitas angin Muson Timur, serta musim kemarau yang terjadi akibat pengaruh hembusan angin Muson Barat. Adapun gambaran spesifik mengenai data dan kondisi iklim aktual yang terjadi di Kabupaten Pasuruan sepanjang Tahun 2024, disajikan secara terperinci dalam Tabel berikut.

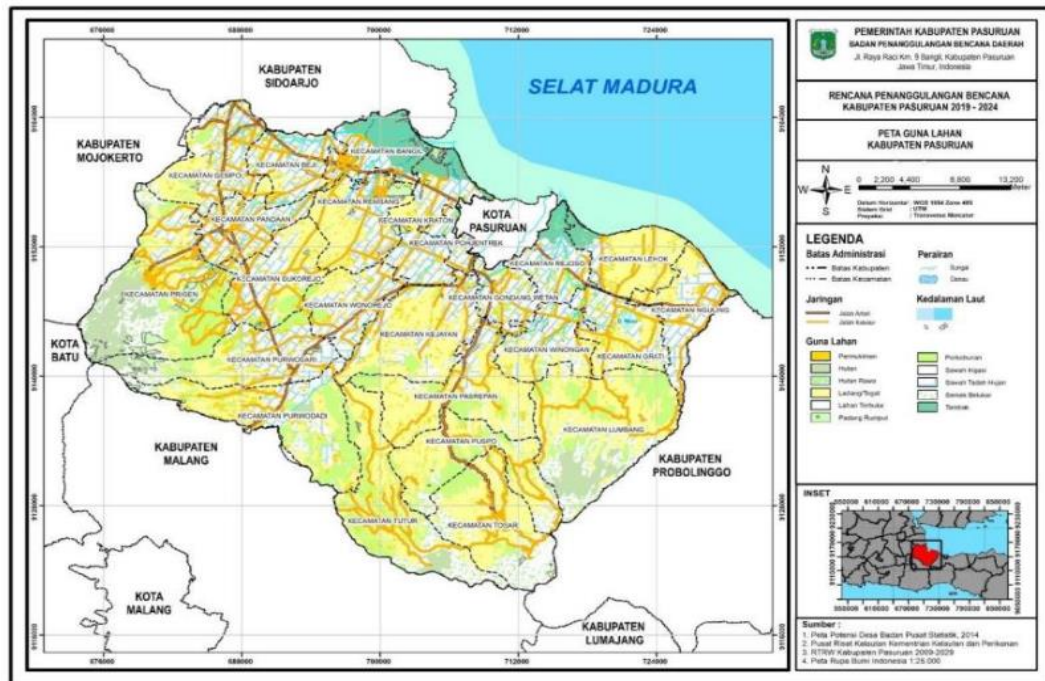
Tabel 2. 4 Iklim Kabupaten Pasuruan

Kecepatan Angin	Maks 13 Knots terjadi di bulan Maret dan April
Rata-rata Kelembapan Maksimum	91% di bulan Februari dan Desember
Hari Hujan	Terbanyak selama 25 hari di bulan Maret dan Desember
Rata-rata Penyinaran Matahari	Paling lama 6,3 jam di bulan Agustus
Curah Hujan	Maks 736,1 mm/tahun terjadi di bulan Desember
Rata-rata Suhu Tertinggi	Mencapai 24,5 C terjadi di bulan Oktober

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

2.2.4. Penggunaan Lahan

Ditinjau dari aspek tata guna lahan, pola pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pasuruan menunjukkan dominasi yang signifikan pada sektor pertanian. Hal ini terindikasi dari penggunaan lahan terbesar yang dialokasikan untuk areal persawahan dengan sistem irigasi, yang mencatatkan total luasan mencapai 38.391,34 Hektar. Di sisi lain, proporsi lahan yang dimanfaatkan sebagai kawasan terbangun yang meliputi permukiman, kawasan industri, dan fasilitas infrastruktur lainnya tercatat seluas 17.301,60 Hektar. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai distribusi spasial dan komposisi peruntukan lahan lainnya, rincian data secara mendetail telah diuraikan dalam Tabel berikut:



Gambar 2. 3 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

Tabel 2. 5 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan

No	Penggunaan	Presentase
1	Aneka Industri	0,994
2	Industri Kecil	0,023
3	Jasa Permukiman	10,169
4	Peternakan Unggas	0,021
5	Tambak	1,696
6	Sawah Irigasi	26,187
7	Sawah Tadah Hujan	1,536
8	Buah-Buahan	0,006
9	Kebun Campuran	3,242
10	Perkebunan	2,805
11	Tegalan/Ladang	36,051
12	Hutan Sejenis	11,878
13	Padang Rumput	0,707
14	Semak	2,708
15	Kolam Air Tawar	0,001
16	Lapangan Olahraga	0,215
17	Tanah Kosong yang Diperuntukkan	0,033
18	Tanah Terbuka	1,224
19	Sungai	0,217
20	Danau/Situ/Telaga	0,127
21	Jalan Aspal	0,081
22	Pemakaman	0,081

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pasuruan, 2024

2.2.5. Potensi Pengembangan Wilayah

Secara ekonomis, Kabupaten Pasuruan dianugerahi berbagai keunggulan komparatif maupun kompetitif yang menjadi potensi daerah yang sangat strategis. Apabila seluruh potensi tersebut dapat dioptimalisasi pemanfaatannya dengan manajemen yang tepat, maka hal tersebut akan menjadi katalisator utama dalam mendorong percepatan peningkatan perekonomian daerah secara signifikan. Salah satu pilar utama yang menjadi keunggulan tersebut adalah:

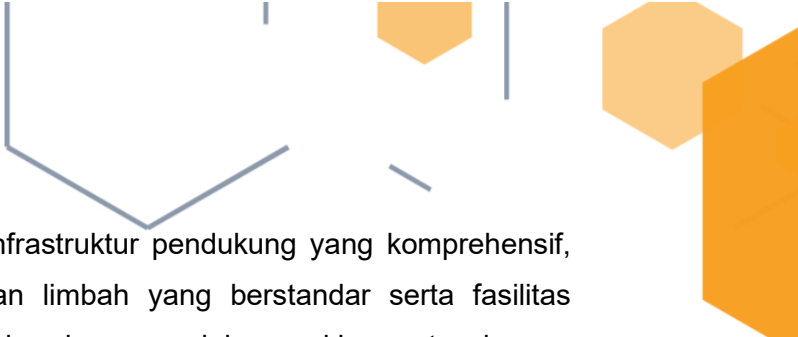
1. Ketersediaan dan Konektivitas Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur jalan yang memadai dan terintegrasi, yang telah menghubungkan hampir seluruh pelosok wilayah Kabupaten Pasuruan, menjadi tulang punggung konektivitas antarwilayah. Aksesibilitas yang tinggi ini memberikan dukungan yang sangat vital bagi akselerasi perkembangan di berbagai sektor strategis, meliputi pertumbuhan ekonomi, pengembangan destinasi pariwisata, produktivitas pertanian, kemajuan sektor industri, serta kelancaran transportasi. Lebih jauh lagi, konektivitas ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan mobilitas.

Selain mengandalkan prasarana jalan raya, sistem transportasi logistik barang dan mobilitas jasa juga diperkuat dengan dukungan moda transportasi berbasis rel. Jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan menjadi sarana pendukung yang efisien, dengan melayani dua koridor utama yang strategis, yakni jurusan selatan (Surabaya - Bangil - Malang - Blitar) dan jurusan timur (Surabaya - Pasuruan - Jember - Banyuwangi).

Sebagai daerah yang memiliki basis perekonomian kuat pada sektor pertanian dan industri, Kabupaten Pasuruan telah dilengkapi dengan sistem jaringan irigasi teknis yang handal. Infrastruktur ini berfungsi krusial dalam mendukung produktivitas lahan pertanian serta kebutuhan air baku bagi kawasan industri. Sistem jaringan irigasi yang tersedia dirancang untuk mampu mengairi lahan pertanian secara memadai, yang pengelolaannya dioptimalkan melalui mekanisme pengelolaan irigasi partisipatif guna menjamin keberlanjutan pasokan air.

Sementara itu, dari sisi pengembangan investasi, ketersediaan Kawasan Industri yang terpadu menjadi nilai tambah tersendiri. Kawasan



ini telah dilengkapi dengan infrastruktur pendukung yang komprehensif, termasuk fasilitas pengelolaan limbah yang berstandar serta fasilitas penunjang lainnya. Keunggulan kawasan ini semakin nyata dengan adanya konektivitas langsung (aksesibilitas) menuju jaringan jalan tol yang menghubungkan arah Surabaya - Malang hingga Banyuwangi/Bali, yang menjamin efisiensi logistik.

Tidak hanya itu, ketersediaan komponen infrastruktur utilitas dasar lainnya juga telah terpenuhi dalam jumlah yang cukup memadai, meliputi ketersediaan air bersih, suplai energi listrik yang stabil, jaringan pipa gas untuk industri, serta infrastruktur telekomunikasi yang modern. Dengan demikian, ekosistem infrastruktur yang telah terbangun secara menyeluruh ini akan menjadi fondasi yang kokoh dalam menunjang perkembangan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Pasuruan secara berkelanjutan."

2. Potensi Wisata

Kabupaten Pasuruan menyimpan kekayaan potensi pariwisata yang sangat beragam dan bernilai tinggi, mencakup berbagai spektrum mulai dari keindahan alam, kekayaan sejarah, hingga inovasi wisata buatan dan agrowisata. Salah satu daya tarik utama yang menjadi primadona dan telah diakui sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional adalah wisata Sunrise Puncak Penanjakan Gunung Bromo. Destinasi ini terletak di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan menawarkan panorama matahari terbit yang ikonik serta pemandangan kaldera yang spektakuler.

Selain pesona Bromo, Kabupaten Pasuruan juga dianugerahi berbagai wisata alam lainnya yang tersebar di berbagai penjuru wilayah. Wisata berbasis perairan dan air terjun menjadi unggulan, meliputi Air Terjun Kakek Bodho, Pemandian Alam Banyu Biru yang legendaris, keindahan Danau Ranu Grati, serta kejernihan Sumber Air Umbulan. Deretan air terjun eksotis lainnya yang patut dikunjungi antara lain Air Terjun Coban Cemoro Gading, Air Terjun Sumber Nyonya, Air Terjun Putuk Truno, Air Terjun Coban Baung, Air Terjun Coban Jala, Air Terjun Rambut Moyo, hingga Air Terjun Coban Waru. Tidak hanya di dataran tinggi, potensi wisata bahari dan pesisir juga tersedia, seperti Pantai Pasir Panjang di Kecamatan Lekok, serta ekosistem Hutan Mangrove yang asri di Pantai

Penunggul (Kecamatan Nguling), Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Kraton.

Dari aspek sejarah dan spiritualitas, Kabupaten Pasuruan kaya akan situs wisata budaya dan religi yang menjadi saksi perjalanan peradaban masa lampau. Peninggalan masa klasik Hindu-Buddha dapat ditemukan pada situs Candi Laras, Candi Satrio Manggung, Candi Kebo Ireng, Candi Gununggangsir, Candi Belahan, Candi Sepilar, Candi Makutoromo, Candi Jawi, serta situs Dewa Wisata Purbakala Tambak Sari. Jejak sejarah perjuangan juga terekam di Goa Jepang/Inna Tretes. Sementara itu, wisata religi Islam atau ziarah makam leluhur meliputi Makam Ki Ageng Penanggungan, Makam Sakerah, Makam Mbah Bangil, Makam Mbah Ratu Ayu, Makam Mbah Semendhi, dan Makam Mbah Segoropuro. Bagi para pencari ketenangan spiritual, terdapat pula lokasi pertapaan seperti Pertapaan Abiyoso dan Pertapaan Indrokilo.

Melengkapi keindahan alam dan budaya, sektor pariwisata juga didukung oleh pengembangan Wisata Buatan yang menawarkan alternatif rekreasi modern dan pengalaman baru bagi wisatawan keluarga. Beberapa destinasi unggulan dalam kategori ini antara lain Saygon Water Park dan Taman Dayu Water Park.

Sektor pertanian yang subur di Kabupaten Pasuruan juga diintegrasikan menjadi daya tarik Wisata Agro yang edukatif dan rekreatif. Destinasi ini tersebar luas, meliputi Agrowisata Apel, Agro Kopi, serta Agro Bunga Krisan dan Paprika yang terpusat di Kecamatan Tutar. Selain itu, terdapat pula sentra Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Tutar dan Kecamatan Grati, budidaya Agro Jamur di Kecamatan Sukorejo dan Purwodadi, serta sentra Agro Durian yang dapat ditemui di Kecamatan Lumbang, Purwodadi, Tutar, dan Puspo. Destinasi agrowisata lainnya yang menarik untuk dikunjungi meliputi Agro Wisata Bhakti Alam di Kecamatan Tutar, wisata sejarah industri Agro PG Kedawung di Kecamatan Grati, perkebunan Agro Mangga di Kecamatan Rembang dan Sukorejo, wisata edukasi Kebun Pak Budi di Kecamatan Purwosari, serta hamparan harum Kebun Bunga Sedap Malam di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Bangil.

Terakhir, Kabupaten Pasuruan juga memfasilitasi segmen Wisata Minat Khusus yang menawarkan pengalaman eksklusif dan petualangan.



Destinasi yang masuk dalam kategori ini antara lain Taman Safari Indonesia II yang terkenal sebagai konservasi satwa, kawasan elit Taman Dayu, fasilitas olahraga golf di Finna Golf & Country Club, kawasan wisata Kaliandra, Bukit Flora, serta area berkemah di Baung Camp. Pengembangan pariwisata ini juga diperkuat dengan keberadaan Desa Wisata yang dikelola secara partisipatif oleh masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Desa-desa wisata ini tersebar strategis di berbagai kecamatan, yaitu di Kecamatan Tosari, Kecamatan Tukur, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Grati, Kecamatan Gempol, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Winongan.

3. Potensi Industri

Sektor industri merupakan salah satu pilar utama perekonomian di Kabupaten Pasuruan, dengan spektrum yang luas meliputi industri skala besar, menengah, hingga industri kecil. Persebaran industri besar terkonsentrasi di beberapa wilayah strategis yang didukung oleh aksesibilitas yang baik, yakni meliputi Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Rembang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Bangil, dan Kecamatan Kejayan. Sementara itu, industri kecil dan menengah (IKM) tumbuh subur dan menjadi penggerak ekonomi di wilayah perdesaan. Sektor IKM ini bergerak dalam berbagai bidang yang variatif, antara lain industri makanan dan minuman, kerajinan bordir, tekstil Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), konveksi, meubel kayu, serta kerajinan logam.

Dalam peta industri kreatif daerah, salah satu sektor unggulan yang telah memiliki reputasi kuat adalah kerajinan bordir, konveksi, dan batik. Kecamatan Bangil telah lama dikenal sebagai sentra kerajinan bordir dengan keunggulan kompetitif pada desain yang inovatif dan kualitas yang prima. Tingginya permintaan pasar yang sering kali melebihi kapasitas produksi di Bangil memicu terbentuknya jejaring produksi yang meluas ke kecamatan penyangga lainnya, seperti Kecamatan Beji, Wonorejo, Rembang, Pandaan, Sukorejo, dan Winongan. Jangkauan pemasaran produk bordir ini tidak hanya mendominasi pasar lokal, tetapi juga sukses menembus pasar ekspor ke negara-negara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, hingga kawasan Timur Tengah. Di sektor lain, industri



konveksi berkembang pesat di Kecamatan Gempol dengan spesialisasi produk berupa celana jeans, kaos, dan celana olahraga (sport). Tidak ketinggalan, industri batik pewarna alam juga menunjukkan eksistensinya yang semakin diakui oleh konsumen mancanegara, dengan pasar ekspor mencakup Korea, Malaysia, dan Australia.

Potensi sumber daya alam juga mendorong berkembangnya sentra industri kayu dan meubel. Sentra-sentra ini tersebar di berbagai titik, antara lain di Desa Sentul (Kecamatan Purwodadi), Desa Tambaksari (Kecamatan Kraton), Desa Wonorejo (Kecamatan Wonorejo), Desa Sungikulon dan Desa Sungiwetan (Kecamatan Pohjentrek), serta wilayah Kecamatan Winongan dan Rejoso. Para pengrajin di wilayah ini sangat kreatif dalam menghasilkan berbagai produk bernilai tambah, mulai dari mainan edukatif anak-anak, aksesoris otomotif (setir mobil, handle persneling, dashboard), kotak tisu, papan catur, hingga produk furnitur atau meubel. Pemasaran produk berbasis kayu ini telah menjangkau pasar domestik hingga internasional.

Selain kayu, Kabupaten Pasuruan juga memiliki sentra kerajinan logam mulia, khususnya perak, yang berpusat di Kecamatan Bangil dan Gempol. Karya pengrajin perak ini telah berhasil menembus pasar global, termasuk ekspor ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa. Di sisi lain, industri pendukung otomotif berupa industri kecil spare part kendaraan bermotor tumbuh berkembang di Kecamatan Winongan, dengan distribusi pasar utama menyuplai kebutuhan di kota besar seperti Malang dan Surabaya.

Untuk mendukung iklim investasi, Kabupaten Pasuruan memiliki kawasan industri terpadu, yaitu Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). Sebagai kawasan berikat, PIER menawarkan lingkungan investasi yang aman, kondusif, dan menjanjikan bagi para investor. Selain PIER, pemerintah daerah juga masih memiliki cadangan kawasan peruntukan industri di luar area tersebut yang membuka peluang besar bagi pengembangan kawasan industri baru di masa depan.

Sektor industri kecil makanan dan minuman (mamin) yang berbasis bahan baku lokal juga menunjukkan tren pertumbuhan yang pesat di seluruh kecamatan. Salah satu ikon kuliner, yaitu sentra Pia di Kecamatan Gempol, terus berkembang dan menjadi sektor padat karya yang mampu

menyerap banyak tenaga kerja lokal, dengan pemasaran yang meluas ke Malang dan Surabaya. Potensi agroindustri juga dimanfaatkan dengan baik, seperti industri olahan apel, kopi, dan susu yang tumbuh di Kecamatan Tukur; serta industri aneka keripik yang tersebar di Kecamatan Sukorejo, Pandaan, Prigen, Tosari, dan Purwodadi. Di wilayah pesisir, industri pengolahan hasil perikanan berkembang di Kecamatan Rejos, Lekok, Grati, Bangil, dan Beji. Terdapat pula produk unik seperti minuman herbal Pokak di Kecamatan Winongan serta olahan sirup dan dodol salak di Kecamatan Gondangwetan.

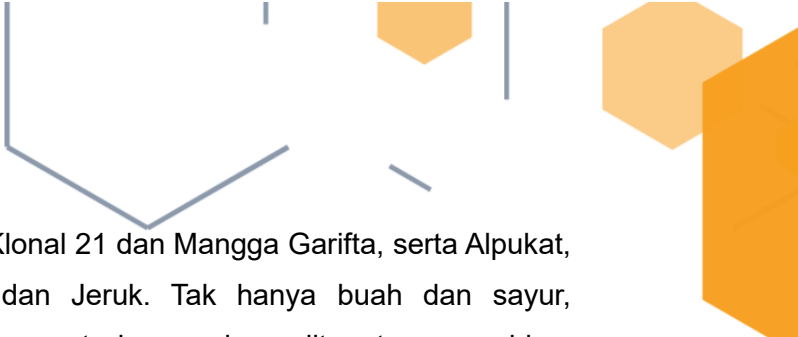
Tumbuh kembangnya sentra-sentra industri potensial ini memberikan optimisme dan harapan baru bagi penguatan ekonomi sektor riil daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan. Keberlanjutan industri kecil menengah ini juga ditopang oleh ketersediaan infrastruktur pemasaran yang strategis, seperti Kawasan Wisata Masjid Cheng Hoo, Pasar Buah Pandaan, Sentra Produk Unggulan di Bangil, kawasan Taman Dayu, serta Sentra Kulakan produk UMKM/IKM di Kecamatan Gempol yang berfungsi sebagai etalase produk-produk lokal.

4. Potensi Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Pasuruan merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam luar biasa, menjadikannya salah satu lumbung pangan strategis di Jawa Timur. Berdasarkan data tahun 2024, wilayah ini memiliki bentang alam yang mendukung pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan secara terintegrasi dan berkualitas tinggi.

Keanekaragaman Sektor Pertanian dan Perkebunan Di sektor pertanian, Kabupaten Pasuruan memproduksi berbagai komoditas pangan utama seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi jalar yang tersebar hampir di seluruh kecamatan, terutama di wilayah dataran rendah seperti Purwodadi, Wonorejo, hingga Grati.

Kekuatan utama lainnya terletak pada sektor hortikultura yang terbagi berdasarkan topografi wilayah. Wilayah dataran tinggi seperti Kecamatan Tukur, Puspo, dan Tosari menjadi sentra sayuran dan buah subtropis, menghasilkan kentang, paprika, wortel, kubis, serta buah-buahan premium seperti apel dan stroberi. Sementara itu, wilayah dataran rendah dan menengah dikenal sebagai penghasil buah tropis unggulan,



khususnya Mangga Gadung Klonal 21 dan Mangga Garifta, serta Alpukat, Pisang Cavendish, Durian, dan Jeruk. Tak hanya buah dan sayur, florikultura juga berkembang pesat dengan komoditas tanaman hias, Anggrek, Krisan, dan Bunga Sedap Malam yang banyak ditemui di wilayah Prigen, Rembang, dan Bangil.

Sektor perkebunan komersial didukung oleh komoditas bernilai ekonomi tinggi. Tebu menjadi tanaman yang dominan di banyak kecamatan, disusul oleh Kopi dan Cengkeh yang tumbuh subur di lereng pegunungan, serta komoditas lain seperti Kapuk, Tembakau, dan Kelapa.

Sentra Peternakan yang Produktif Kabupaten Pasuruan juga dikenal sebagai sentra peternakan yang vital. Populasi ternak tersebar merata dengan spesialisasi tertentu. Komoditas sapi potong dan unggas (ayam buras, petelur, pedaging, itik) dapat ditemukan di hampir seluruh kecamatan. Namun, yang menjadi ciri khas adalah peternakan Sapi Perah. Wilayah seperti Tutar, Puspo, Purwodadi, Grati, dan Lekok menjadi pusat produksi susu segar yang signifikan. Selain itu, ternak kecil seperti kambing, domba, dan kelinci juga dikembangkan secara luas oleh masyarakat sebagai penopang ekonomi kerakyatan.

Kekayaan Sektor Perikanan: Dari Kolam hingga Laut Potensi perikanan di Kabupaten Pasuruan melengkapi kekayaan agrarisnya. Sektor ini terbagi menjadi perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang tersebar di seluruh kecamatan, kecuali di empat kecamatan dataran tinggi (Tutar, Puspo, Tosari, dan Lumbang) yang memang difokuskan untuk agrikultur pegunungan.

Di wilayah pesisir utara seperti Kecamatan Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok, dan Nguling sektor perikanan sangat dominan dengan hasil laut dan tambak. Perikanan tangkap menghasilkan tongkol, teri nasi, cumi-cumi, kakap, kepiting, dan udang. Sementara itu, budidaya tambak (air payau) di wilayah ini memproduksi Bandeng, Udang (Windu, Vanamei), dan Rumput Laut dalam jumlah besar.

Untuk wilayah daratan (non-pesisir), budidaya perikanan air tawar berkembang pesat melalui metode kolam. Komoditas utamanya meliputi Ikan Mas, Tawes, Mujair, Nila, Gurami, Lele, dan Patin. Keunikan tersendiri terdapat di Kecamatan Grati, yang selain memiliki potensi laut, juga

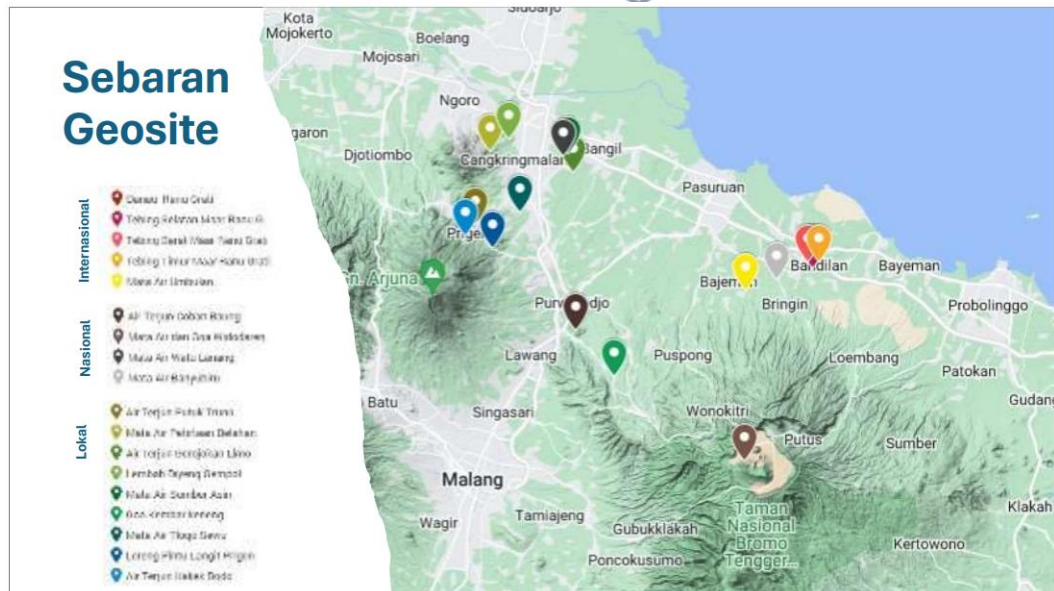
mengembangkan budidaya sistem Jaring Apung (kemungkinan besar di Ranu Grati) dengan komoditas seperti Nila, Tombro, dan Gurami.

Secara keseluruhan, Kabupaten Pasuruan menunjukkan ekosistem ekonomi yang kuat dengan pembagian zonasi komoditas yang jelas antara wilayah pegunungan, dataran rendah, dan pesisir.

5. Potensi Keragaman Geologi

Berdasarkan pelaksanaan kajian mendalam mengenai Geoheritage (warisan geologi) yang dilakukan pada Tahun 2024, telah berhasil diidentifikasi dan diinventarisasi berbagai bentuk keragaman geologi (geodiversity) yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan. Temuan ini menunjukkan kekayaan fenomena geologis yang signifikan. Adapun hasil identifikasi geodiversity tersebut diklasifikasikan berdasarkan hierarki nilainya menjadi tiga kategori utama, yaitu:

- 1) Geoheritage Bertaraf Internasional Pada tingkatan tertinggi ini, terdapat 5 (lima) situs geologi yang memiliki nilai signifikansi dunia. Situs-situs tersebut meliputi fenomena hidrologi Mata Air Artesis Umbulan, serta kompleks vulkanik purba Ranu Grati yang terdiri secara rinci atas Danau Maar Ranu Grati beserta formasi dinding kalderanya, yakni Tebing Barat Maar Ranu Grati, Tebing Timur Maar Ranu Grati, dan Tebing Selatan Maar Ranu Grati.
- 2) Geoheritage Bertaraf Nasional Pada tingkatan nasional, teridentifikasi sebanyak 4 (empat) situs geologi yang menjadi aset penting negara. Kelompok ini mencakup Mata Air Artesis Banyubiru, pesona alam Air Terjun Coban Baung, Mata Air Watulanag, serta keunikan sistem hidrologi dan speleologi di Mata Air dan Goa Widodaren.
- 3) Geoheritage Bertaraf Lokal Pada tingkatan lokal, terdapat keragaman geologi yang paling banyak jumlahnya, yakni 9 (sembilan) situs. Situs-situs ini meliputi Mata Air Petirtaan Belahan, Air Terjun Gerojokan Limo, Mata Air Artesis Telogo Sewu, Air Terjun Kakek Bodo, Air Terjun Putuk Truno, bentang alam Lereng Pintu Langit Prigen, Mata Air Sumberasin, Goa Kembar Kaneng, serta fenomena geologi unik Brown Canyon Gempol.



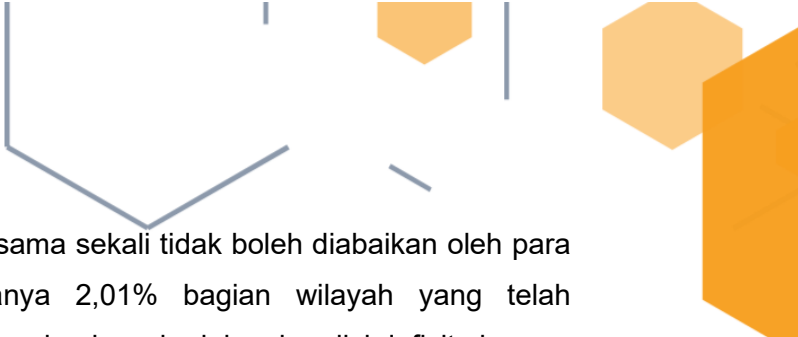
Gambar 2. 4 Peta Sebaran Geosite di Kabupaten Pasuruan
Sumber: Kajian Geoheritage Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

2.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.3.1. Daya Dukung Air

Evaluasi yang bersifat komprehensif dan mendalam mengenai keberlanjutan sumber daya alam, dengan fokus utama pada aspek daya dukung air, telah berhasil dilaksanakan sebagai bagian integral dari penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini disusun sebagai landasan ilmiah untuk mendukung perumusan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan untuk periode perencanaan tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaannya, analisis mengenai kondisi daya dukung air tanah di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan dilakukan dengan menggunakan pendekatan spasial yang memiliki tingkat presisi tinggi, yakni dengan menerapkan metode sistem grid (grid system). Penggunaan pendekatan teknis ini dinilai sangat krusial karena memungkinkan dilakukannya pemetaan yang akurat dan terperinci mengenai sebaran neraca air di setiap segmen wilayah secara spesifik.

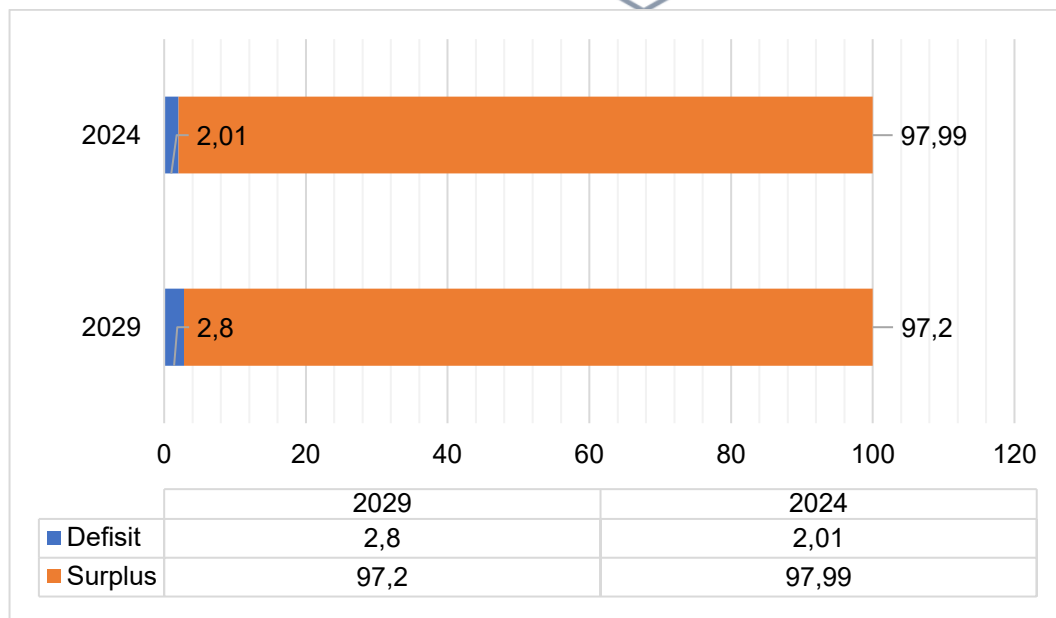
Berdasarkan hasil visualisasi dan interpretasi data spasial tersebut, dapat diidentifikasi secara jelas bagaimana kondisi ketersediaan air yang diklasifikasikan berdasarkan proporsi wilayah surplus dan wilayah defisit. Pada kondisi eksisting tahun 2024, ketahanan air di Kabupaten Pasuruan secara umum menunjukkan status yang relatif aman dan terkendali. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa mayoritas kebutuhan air di wilayah ini masih dapat terpenuhi dengan sangat baik, yang terindikasi secara statistik dengan cakupan wilayah yang berada dalam kondisi surplus mencapai angka dominan sebesar 97,99%. Kendati demikian,



terdapat sinyal kerawanan dini yang sama sekali tidak boleh diabaikan oleh para pemangku kepentingan, yaitu adanya 2,01% bagian wilayah yang telah teridentifikasi mulai mengalami tekanan dan berada dalam kondisi defisit air.

Lebih lanjut, apabila ditinjau berdasarkan analisis proyeksi untuk jangka menengah hingga tahun 2029, terlihat adanya tren pergeseran neraca air yang mengarah pada kondisi yang perlu diwaspadai secara serius. Berdasarkan model proyeksi tersebut, diprediksi akan terjadi peningkatan luas wilayah yang mengalami defisit menjadi 2,80%. Peningkatan area defisit ini secara otomatis akan diikuti dengan penurunan proporsi wilayah yang memiliki surplus air menjadi 97,20%. Meskipun secara kuantitatif angka pergeseran menuju defisit tersebut tampak relatif kecil, namun adanya tren kenaikan defisit yang terjadi secara konsisten dalam kurun waktu lima tahun memberikan indikasi kuat mengenai potensi penurunan daya dukung air yang berlangsung secara bertahap di masa mendatang.

Fenomena penurunan kapasitas daya dukung lingkungan ini disinyalir kuat merupakan dampak akumulatif dari berbagai faktor tekanan (driver) pembangunan. Faktor utamanya adalah peningkatan permintaan kebutuhan air baku yang beriringan dengan laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, serta dampak dari fenomena perubahan iklim global yang secara signifikan mempengaruhi pola curah hujan dan siklus pengisian kembali (recharge) ketersediaan sumber daya air tanah. Oleh sebab itu, indikasi peningkatan tren defisit ini menuntut adanya langkah antisipatif yang konkret dan segera, melalui perumusan kebijakan pengelolaan tata kelola air yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi sangat krusial untuk menjaga stabilitas keseimbangan antara sisi kebutuhan (demand) dan sisi ketersediaan (supply) air di masa depan agar tidak terjadi krisis air. Adapun visualisasi lengkap mengenai peta sebaran kondisi daya dukung air ini telah disajikan secara rinci pada Gambar berikut:

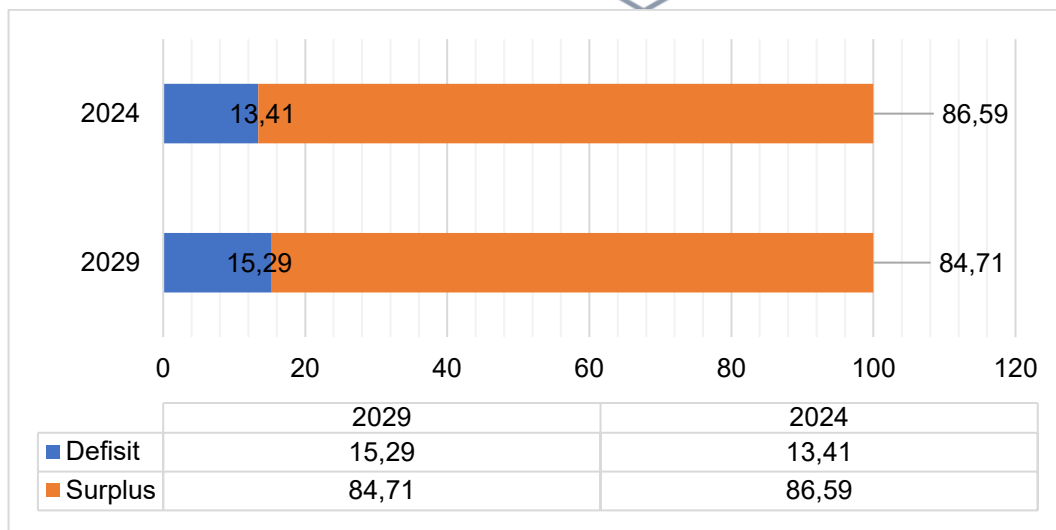


Gambar 2. 5 Daya Dukung Air Tahun 2024 dan Tahun 2029
 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

2.3.2. Daya Dukung Pangan

Merujuk pada hasil analisis mendalam yang termuat dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, gambaran mengenai kondisi daya dukung pangan di wilayah ini pada tahun 2024 menunjukkan performa ketahanan pangan yang kuat. Secara agregat, mayoritas wilayah Kabupaten Pasuruan berada dalam kondisi aman, yang ditandai dengan capaian kondisi surplus sebesar 86,59%. Angka persentase yang dominan ini merepresentasikan suatu kondisi di mana total ketersediaan dan pasokan pangan mampu melampaui jumlah kebutuhan konsumsi masyarakat secara signifikan.

Meskipun demikian, masih terdapat catatan yang perlu mendapatkan perhatian, yakni adanya proporsi wilayah sebesar 13,41% yang teridentifikasi mengalami kondisi defisit. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian kecil wilayah atau kelompok masyarakat tertentu yang kebutuhan pangannya belum dapat terpenuhi secara optimal dari produksi lokal atau pasokan yang ada. Untuk memahami sebaran lokasi antara area yang mengalami surplus dan area yang mengalami defisit secara lebih spesifik, visualisasi spasialnya telah disajikan secara terperinci pada Gambar berikut:

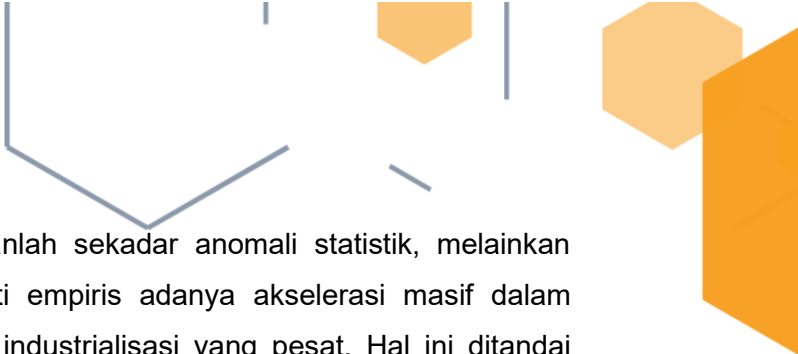


Gambar 2. 6 Grafik Daya Dukung Pangan Tahun 2024 dan Tahun 2029
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

2.3.3. Ketahanan Energi

Dalam sebuah ekosistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, data demografi kependudukan di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berfungsi sebagai catatan statistik semata, melainkan memegang peranan yang sangat vital dan fundamental. Data ini menjadi basis perhitungan utama dalam menyusun proyeksi kebutuhan masa depan serta alat ukur yang presisi untuk menilai tingkat ketahanan energi wilayah. Salah satu indikator kunci yang paling representatif dalam memotret kondisi tersebut adalah tingkat konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita). Secara definisi dan teknis, konsumsi listrik per kapita dipahami sebagai rasio perbandingan antara total pemakaian tenaga listrik di suatu area dibagi dengan jumlah total penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut dalam kurun waktu periode satu tahun anggaran. Angka rasio ini mencerminkan akumulasi total volume energi listrik dalam satuan kWh (kilo Watt hours) yang dimanfaatkan oleh masyarakat, yang mencakup penggunaan secara langsung (rumah tangga) maupun tidak langsung (fasilitas publik dan industri) yang bersumber dari berbagai varian sumber energi yang tersedia di jaringan kelistrikan.

Merujuk pada hasil telaah mendalam terhadap data historis yang bersumber dari validasi Perusahaan Listrik Negara (PLN), terekam sebuah fenomena menarik di mana grafik konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Pasuruan selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dan konsisten. Sorotan khusus dan atensi mendalam perlu ditujukan pada kondisi aktual di tahun 2024, di mana terjadi sebuah lonjakan angka konsumsi yang tergolong sangat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



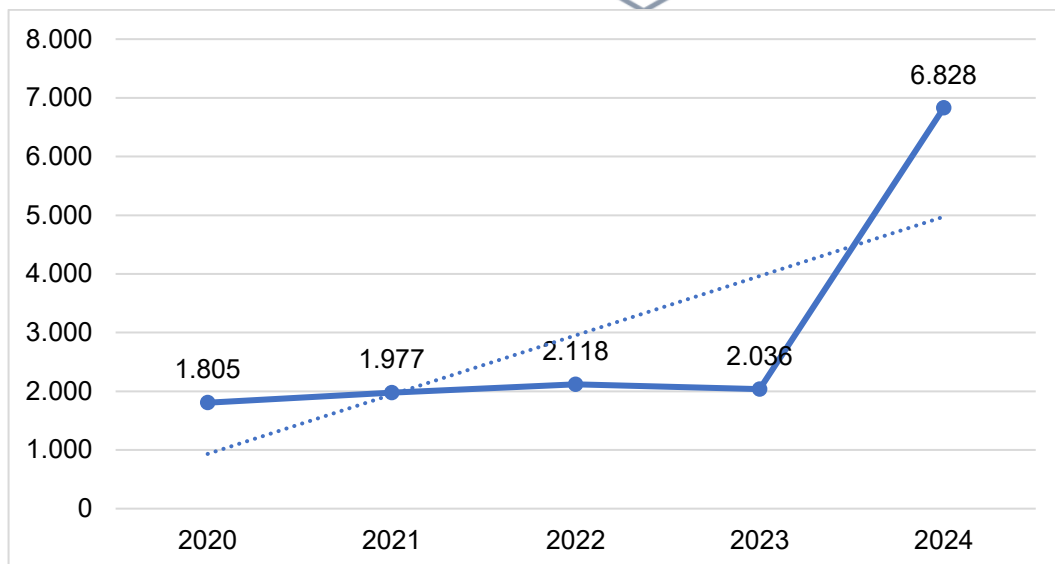
Fenomena kenaikan tajam ini bukanlah sekadar anomali statistik, melainkan memberikan indikasi kuat dan bukti empiris adanya akselerasi masif dalam aktivitas ekonomi daerah serta laju industrialisasi yang pesat. Hal ini ditandai secara nyata dengan bertumbuhnya sektor-sektor usaha baru dan ekspansi industri yang beroperasi secara intensif, yang secara otomatis mendorong permintaan energi.

Dinamika lonjakan permintaan energi yang luar biasa ini membawa implikasi strategis yang serius dan menuntut adanya perumusan langkah-langkah penanganan yang bersifat komprehensif dan terukur. Fenomena tersebut mendorong urgensi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat sektor energi melalui tiga langkah prioritas utama, yakni:

Penguatan Infrastruktur Energi secara Masif: Sangat diperlukan upaya percepatan yang konkret dalam hal ekstensifikasi dan perluasan jangkauan jaringan listrik hingga ke seluruh pelosok wilayah untuk menjamin rasio elektrifikasi yang merata. Selain itu, pembangunan unit gardu induk baru di titik-titik lokasi strategis serta peningkatan kapasitas terpasang pada pembangkit listrik menjadi hal yang mutlak dilakukan agar sistem kelistrikan daerah mampu menopang beban puncak (peak load) yang diproyeksikan akan terus bertambah seiring dengan kemajuan ekonomi yang pesat.

Akselerasi Diversifikasi Sumber Energi: Pemerintah perlu mendorong transformasi energi secara progresif dengan memperluas diversifikasi sumber daya energi. Langkah strategis ini diimplementasikan dengan menggali dan mengembangkan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang tersedia di daerah, seperti tenaga surya atau biomassa. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat ketergantungan daerah yang selama ini masih tinggi terhadap pasokan listrik berbasis bahan bakar fosil, sekaligus mendukung kelestarian lingkungan.

Peningkatan Efisiensi dan Konservasi Energi: Mengimplementasikan manajemen pemakaian listrik atau Demand Side Management yang efisien, hemat, dan efektif di semua sektor. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketersediaan pasokan energi tidak hanya sekadar andal (reliable) dalam memenuhi lonjakan kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin prinsip keberlanjutan (sustainable) demi menjaga ketahanan energi jangka panjang bagi generasi masa depan."



Gambar 2. 7 Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

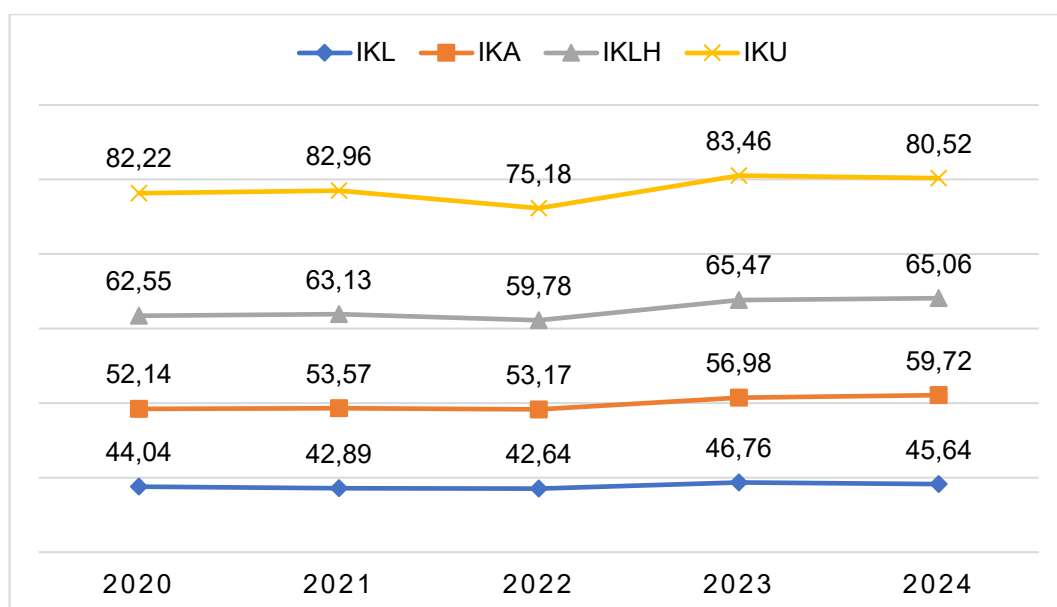
Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pasuruan, 2024

2.4. Lingkungan Hidup Berkualitas

Pola pemanfaatan dan tata kelola penggunaan lahan di suatu wilayah bukan hanya sekadar aktivitas fisik semata, melainkan memiliki korelasi yang sangat erat serta dampak yang fundamental terhadap fluktuasi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dinamika perubahan bentang alam yang didorong oleh aktivitas manusia, seperti alih fungsi lahan hutan menjadi area komersial (deforestasi), ekspansi urbanisasi perkotaan yang cepat dan masif, serta penerapan sistem pertanian intensif yang eksploitatif, dapat membawa konsekuensi serius. Salah satu dampak utamanya adalah pengurangan area tutupan vegetasi hijau secara drastis yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga alami ekosistem. Kondisi ini secara berantai berpotensi memicu peningkatan polusi udara dan air, memperparah degradasi struktur dan kualitas tanah, serta menggerus kekayaan keanekaragaman hayati. Secara akumulatif, keseluruhan faktor negatif tersebut akan melemahkan daya dukung lingkungan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup daerah secara signifikan.

Sebaliknya, pergeseran menuju penerapan paradigma praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi solusi strategis yang sangat krusial untuk memitigasi kerusakan tersebut. Strategi konkret seperti pengembangan pertanian organik yang ramah lingkungan serta upaya rehabilitasi lahan-lahan yang kritis atau terdegradasi terbukti mampu memberikan kontribusi positif dalam mendorong capaian IKLH. Upaya-upaya konstruktif ini berperan

penting dalam menjaga stabilitas kesuburan tanah, melindungi siklus hidrologi demi keberlanjutan sumber daya air, serta memperkaya ekosistem keanekaragaman hayati. Hal ini menjadi sangat fundamental, mengingat IKLH itu sendiri sejatinya merupakan nilai komposit yang terintegrasi dari tiga indikator utama performa lingkungan, yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Oleh karena itu, manajemen penggunaan lahan yang tepat tidak hanya memperbaiki kondisi fisik tanah, tetapi akan berpengaruh langsung dan simultan terhadap perbaikan ketiga komponen penyusun indeks tersebut..



Gambar 2. 8 Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

Sebagaimana tervisualisasi secara jelas pada Gambar 1.11, tren capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan performa apabila disandingkan dengan capaian pada tahun 2023. Penurunan agregat nilai indeks ini salah satunya dipicu oleh merosotnya angka Indeks Kualitas Udara (IKU) dari tahun 2023 ke tahun 2024. Analisis mendalam menunjukkan bahwa degradasi kualitas udara ini terkonsentrasi pada kawasan-kawasan dengan kepadatan transportasi tinggi, di mana emisi gas buang kendaraan bermotor menjadi kontributor pencemar utama. Kondisi ini diperparah dengan minimnya keberadaan tegakan pohon sebagai penyangga (buffer) alami di titik-titik krusial, khususnya yang teridentifikasi pada lokasi sampling di Exit Tol Grati, serta sepanjang koridor jalur lalu lintas utama

Pasuruan - Probolinggo, Pasuruan - Malang, dan Pasuruan - Surabaya. Menyikapi kondisi tersebut, diperlukan langkah mitigasi yang konkret berupa intensifikasi penanaman pohon peneduh di sepanjang jalur padat transportasi serta penerapan kebijakan yang ketat terkait pemenuhan baku mutu emisi kendaraan bermotor.

Selain faktor transportasi, penurunan kualitas lingkungan hidup secara umum juga didorong oleh akumulasi berbagai faktor tekanan lingkungan lainnya. Faktor-faktor tersebut meliputi praktik pembuangan air limbah domestik dan/atau air limbah industri yang belum memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup, atau bahkan dibuang langsung ke badan air tanpa melalui proses pengolahan yang memadai pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Di sisi lain, sektor industri juga berkontribusi melalui belum optimalnya kelengkapan alat pengendali pencemaran udara pada cerobong-cerobong sumber emisi. Masalah ini semakin kompleks dengan terjadinya fenomena alih fungsi lahan yang masif yang memicu degradasi lingkungan, belum terpenuhinya target persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan, serta tren berkurangnya tutupan lahan vegetasi.

Dalam konteks pengendalian pencemaran, terdapat korelasi yang sangat signifikan antara ketersediaan RTH di wilayah perkotaan maupun peningkatan tutupan lahan terhadap perbaikan kualitas udara. Vegetasi dalam RTH memiliki fungsi vital ekologis dalam kemampuan penyerapan berbagai polutan udara berbahaya (seperti debu partikulat, CO, SO₂, dan NO₂). Saat ini, sebaran aset RTH telah mencakup wilayah perkotaan di seluruh kecamatan (24 Kecamatan). Guna meningkatkan fungsi ekologis tersebut, serangkaian upaya strategis untuk optimalisasi RTH terus dilakukan, yang meliputi:

1. Ekstensifikasi RTH: Meningkatkan kuantitas ketersediaan RTH di kawasan perkotaan melalui pembangunan titik-titik lokasi RTH baru yang representatif.
2. Pemanfaatan Lahan Sempadan: Mengoptimalkan fungsi lahan sempadan sebagai sabuk hijau (green belt), mencakup area sempadan sungai, sempadan jalan raya, sempadan jalur SUTTET (Saluran Udara Tegangan Tinggi Ekstra Tinggi), sempadan rel kereta api, hingga sempadan danau.
3. Program PJLH: Mengoptimalkan program Penyedia Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) yang difokuskan pada penyediaan lahan konservasi tanaman keras baik jenis kayu-kayuan maupun tanaman buah-buahan produktif khususnya pada area di luar Kawasan Hutan Negara.

Sementara itu, pada komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL), juga tercatat adanya penurunan nilai indeks dari tahun 2023 ke tahun 2024. Perlu digarisbawahi bahwa penurunan ini utamanya disebabkan oleh kendala administratif teknis dalam proses penetapan delineasi tutupan vegetasi pada sistem aplikasi IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada verifikasi data tahun 2023, delineasi tutupan lahan telah terverifikasi valid sehingga berkontribusi pada lonjakan signifikan nilai IKL dibanding tahun 2022. Namun, pada saat proses verifikasi ulang untuk data tahun 2024, sebagian data delineasi mengalami penolakan (reject) oleh tim verifikator pusat. Penolakan ini terjadi akibat ditemukannya tumpang tindih (overlap) delineasi dan titik koordinat dalam satu wilayah yang sama. Konsekuensinya, luasan tutupan vegetasi yang diakui secara sistem menjadi berkurang, sehingga nilai IKL tahun 2024 mengalami koreksi penurunan akibat penyesuaian data tersebut. Sebagai tindak lanjut, diperlukan upaya perbaikan mendasar dalam hal peningkatan akurasi inventarisasi data serta presisi dalam delineasi peta tutupan lahan di masa mendatang.

2.5. Kawasan Rawan bencana dan Perubahan Iklim

Kawasan rawan bencana didefinisikan sebagai wilayah atau area geografis yang memiliki tingkat risiko tinggi untuk mengalami dampak buruk dari berbagai jenis fenomena, baik itu bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana yang dipicu oleh aktivitas manusia (*man-made disaster*). Tingginya tingkat kerawanan ini tidak terlepas dari karakteristik kondisi geofisik wilayah Kabupaten Pasuruan yang sangat kompleks dan beragam. Keberadaan jajaran gunung berapi aktif, hamparan dataran rendah yang luas, serta kondisi ekologis dataran tinggi yang mulai mengalami degradasi lingkungan, menjadikan Kabupaten Pasuruan memiliki spektrum potensi bencana alam yang cukup luas.

Berdasarkan pemetaan potensi, terdapat enam kategori utama kawasan rawan bencana di wilayah ini, yaitu:

1. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi Wilayah Kabupaten Pasuruan diapit oleh aktivitas vulkanik yang signifikan. Potensi ini terbagi menjadi dua klaster utama. Pertama, Kawasan Gunung Bromo yang memiliki area rawan bencana seluas 1.320 Ha serta daerah dengan status waspada seluas 751 Ha. Area ini secara administratif mencakup Desa Ngadirejo, Desa Mororejo, Desa Wonokitri, dan Desa Kedawung yang terletak di Kecamatan Tosari. Kedua, Kawasan Gunung Welirang yang memiliki area rawan bencana seluas 1.368 Ha dan daerah waspada seluas 809 Ha.

Wilayah paparannya meliputi sebagian dari Desa Lumbangrejo dan Kelurahan Pecalukan di Kecamatan Prigen, serta meluas hingga Desa Cendono, Desa Sumberejo, dan Desa Tambaksari di wilayah Kecamatan Purwosari.

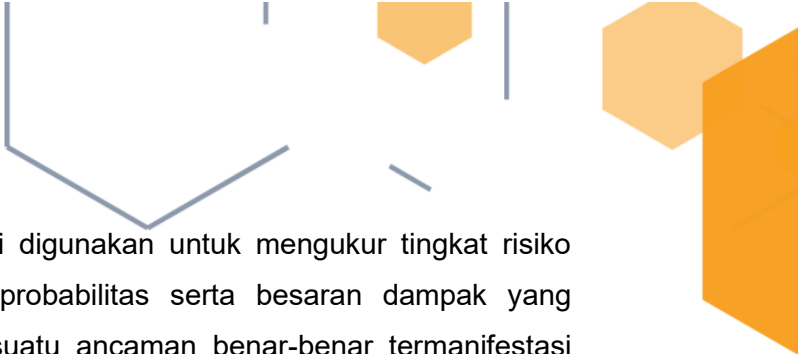
2. Kawasan Rawan Longsor dan Gerakan Tanah Mengingat topografi wilayah yang berbukit, potensi kawasan rawan longsor di Kabupaten Pasuruan teridentifikasi cukup luas, yakni mencapai 37.626,4 Ha. Kerawanan ini secara spesifik terdapat di wilayah dengan tingkat kemiringan lereng yang curam, yaitu lebih dari 40% (kelerengan > 40%). Zona merah kerawanan longsor ini terkonsentrasi di kawasan dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang, dan Kecamatan Prigen.
3. Kawasan Rawan Banjir Ancaman hidrometeorologi berupa banjir memiliki potensi luasan terdampak sebesar 11.948,15 Ha. Bencana ini dominan mengancam wilayah dataran rendah atau daerah hilir yang menjadi muara dari Daerah Aliran Sungai (DAS). Kecamatan yang masuk dalam zona rawan ini antara lain Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Grati, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, dan Kecamatan Winongan. Mekanisme banjir umumnya dipicu oleh tingginya curah hujan di daerah hulu sungai yang tidak mampu tertampung sehingga mengakibatkan air meluap ke kawasan hilir. Selain banjir luapan sungai, terdapat pula ancaman banjir pasang air laut atau *rob* yang secara spesifik mengancam wilayah pesisir, khususnya di Kecamatan Lekok dan Kecamatan Kraton.
4. Kawasan Rawan Angin Puyuh/Puting Beliung Fenomena cuaca ekstrem berupa angin puyuh atau puting beliung memiliki potensi kejadian di wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Pandaan, dan Kecamatan Sukorejo. Selain itu, kewaspadaan juga perlu ditingkatkan di beberapa kecamatan lain, mengingat adanya tren anomali iklim yang semakin tidak menentu dalam beberapa tahun terakhir yang dapat memicu kejadian serupa di lokasi yang lebih luas.
5. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Potensi kebakaran hutan mengancam wilayah-wilayah yang memiliki tutupan vegetasi hutan dan semak belukar yang kering, terutama saat musim

kemarau. Area yang rentan meliputi Kawasan Hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dikelola oleh Perhutani, Kawasan Cagar Alam (CA) Gunung Baung, Cagar Alam Gunung Abang, serta Taman Wisata Alam (TWA) Tretes. Selain itu, kawasan pegunungan di R. Soeryo serta kompleks Pegunungan Arjuno, Welirang, dan Penanggungan yang mencakup wilayah Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Gempol juga memiliki risiko tinggi terhadap karhutla.

6. Kawasan Rawan Kekeringan Ancaman bencana kekeringan di Kabupaten Pasuruan diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan risiko berdasarkan intensitas dan dampaknya, yaitu:

- Ancaman Kekeringan Tinggi: Berpotensi terjadi secara meluas di beberapa desa, meliputi:
 - Kecamatan Lumbang: Desa Kronto, Desa Pancur, Desa Karang Asem, Desa Cukurguling, Desa Lumbang, Desa Bulukandang, Desa Karangjati, dan Desa Watulumbang.
 - Kecamatan Kejayan: Desa Ambal-Ambil, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule, Desa Lorokan, Desa Kedungpengaron, dan Desa Benerwojo.
 - Kecamatan Lekok: Desa Pasinan, Desa Wates, Desa Semedusari, dan Desa Branang.
 - Kecamatan Winongan: Desa Kedungrejo, Desa Umbulan, Desa Jeladri, Desa Sumberejo, dan Desa Sruwi.
 - Kecamatan Puspo: Desa Palangsari, Desa Puspo, dan Desa Jimbaran.
 - Kecamatan Gempol: Desa Bulusari.
 - Kecamatan Grati: Desa Karanglo.
- Ancaman Kekeringan Sedang: Teridentifikasi di wilayah Kecamatan Pasrepan, mencakup Desa Sapulante, Desa Mangguan, Desa Petung, Desa Sibon, Desa Lemahbang, dan Desa Tambakrejo.
- Ancaman Kekeringan Rendah: Terjadi pada skala terbatas di Kecamatan Lumbang (Desa Banjarimbo dan Desa Welulang) serta Kecamatan Winongan (Desa Minggir).

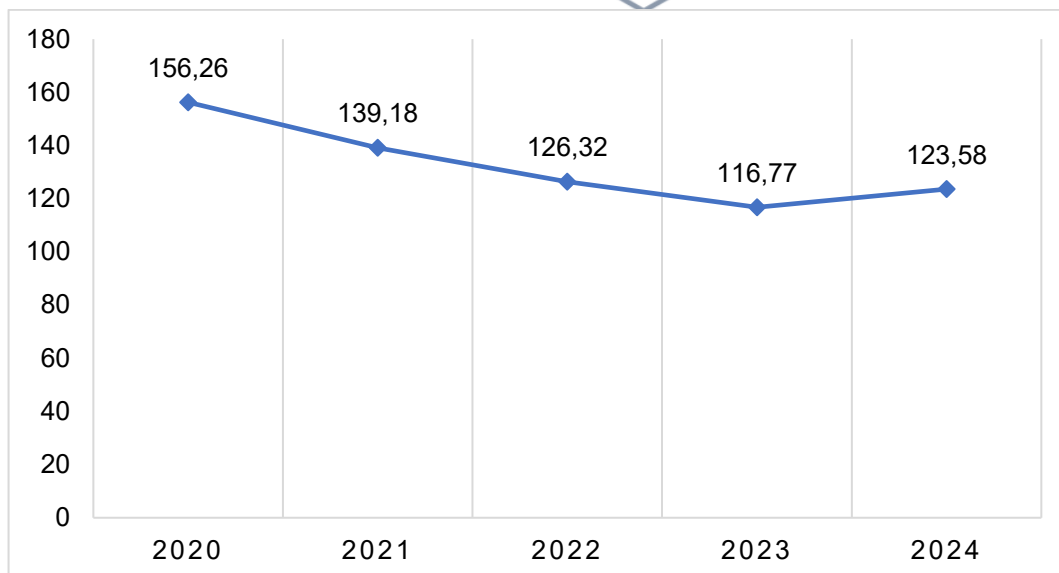
Seluruh potensi kebencanaan yang telah diuraikan sebelumnya dipotret secara sistematis dan dianalisis secara komprehensif melalui instrumen Indeks



Risiko Bencana (IRB). Instrumen ini digunakan untuk mengukur tingkat risiko secara kuantitatif dengan menilai probabilitas serta besaran dampak yang diperkirakan akan muncul apabila suatu ancaman benar-benar termanifestasi menjadi peristiwa bencana di Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian, IRB tidak hanya merekam keberadaan ancaman, tetapi juga menggambarkan konsekuensi nyata yang mungkin ditimbulkan terhadap manusia, aset, lingkungan, dan aktivitas sosial-ekonomi wilayah.

Secara metodologis, IRB merupakan hasil integrasi dari tiga komponen utama, yaitu indeks ancaman (hazard) yang merepresentasikan intensitas dan frekuensi potensi bahaya, indeks kerentanan (vulnerability) yang mencerminkan tingkat keterpaparan dan kelemahan sistem sosial, ekonomi, fisik, serta lingkungan, dan indeks kapasitas (capacity) yang menunjukkan kemampuan daerah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta respons terhadap bencana. Interaksi ketiga komponen tersebut menghasilkan gambaran risiko yang utuh dan proporsional, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penilaian yang objektif dan terukur.

Hasil pengkajian risiko bencana berbasis IRB ini menjadi landasan strategis dalam perumusan kebijakan dan program Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Strategi PRB diarahkan secara simultan untuk menekan tingkat bahaya dan kerentanan melalui pengendalian pemanfaatan ruang, penguatan aspek sosial dan ekonomi, serta perlindungan lingkungan, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, IRB berfungsi tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan yang bersifat preventif dan berorientasi pada ketahanan wilayah. Adapun tren capaian nilai IRB Kabupaten Pasuruan secara visual disajikan dalam gambar berikut sebagai ilustrasi dinamika tingkat risiko bencana dari waktu ke waktu.:



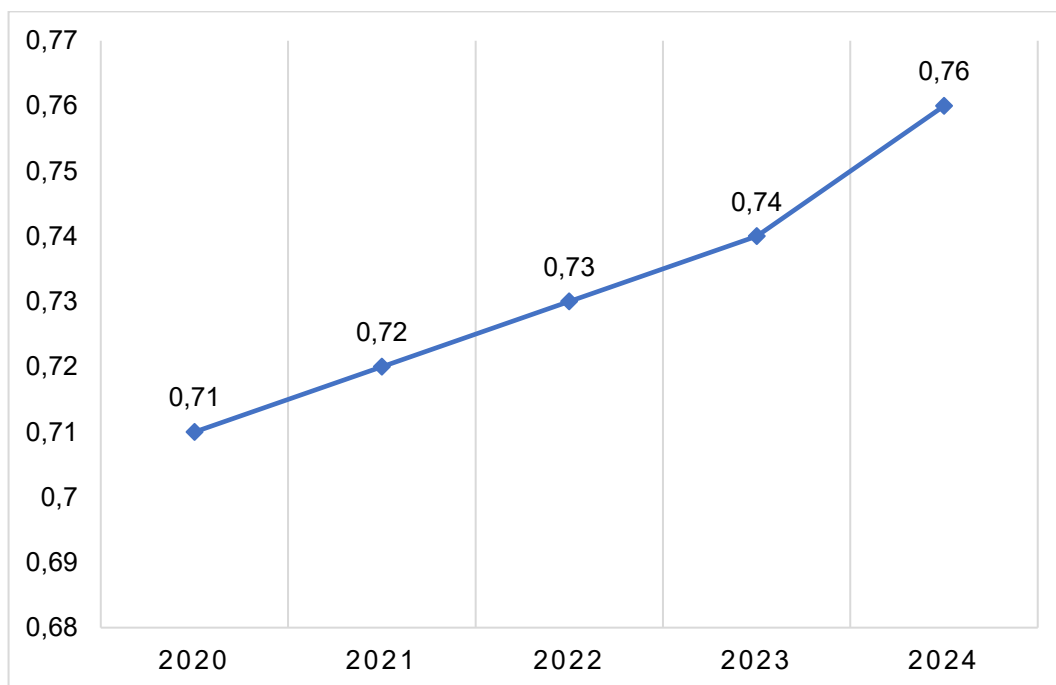
Gambar 2. 9 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024
 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024
 Catatan: Tahun 2024 menggunakan data H&V 2021

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap data runtun waktu (*time series*) yang mencakup periode lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2024, kinerja penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Pasuruan memperlihatkan capaian yang sangat positif dan menggembirakan. Indikator keberhasilan ini tercermin jelas dari nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) yang secara konsisten mengalami tren penurunan di setiap tahun pelaporannya. Akumulasi dari berbagai upaya strategis penurunan risiko yang dilakukan secara berkelanjutan ini telah berhasil mengubah peta kerawanan daerah, sehingga menempatkan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 masuk ke dalam kategori risiko bencana tingkat Sedang, sebuah perbaikan status yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian substansial dalam penurunan risiko bencana ini didorong secara signifikan oleh penguatan partisipasi aktif masyarakat di tingkat tapak, utamanya melalui akselerasi program pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana). Progresivitas pembentukan dan pemberdayaan desa tangguh ini terlihat sangat nyata dari data pertumbuhan tahunan yang terus menunjukkan grafik meningkat. Pada tahun 2020, tercatat baru terdapat 10 desa/kelurahan yang berstatus tangguh bencana. Jumlah ini kemudian bertambah secara bertahap menjadi 14 desa/kelurahan pada tahun 2021, meningkat lagi menjadi 18 desa/kelurahan pada tahun 2022, dan mencapai 20 desa/kelurahan pada tahun 2023. Puncaknya, terjadi lonjakan kinerja yang cukup signifikan pada tahun 2024

dengan total capaian kumulatif sebanyak 30 desa/kelurahan yang telah berhasil dikukuhkan statusnya sebagai wilayah tangguh bencana.

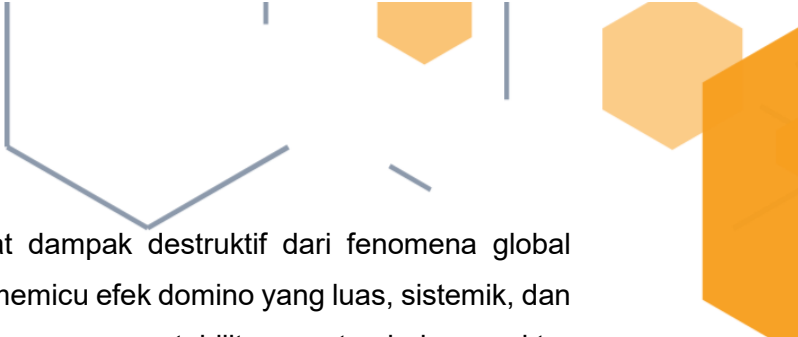
Ditinjau secara teoritis maupun praktis, tren penurunan nilai IRB ini memiliki korelasi linier yang kuat dan berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman. Fenomena positif ini selaras dengan naiknya grafik Indeks Ketahanan Daerah (IKD), sebuah metrik yang merepresentasikan tingkat kesiapan dan ketangguhan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengelola keseluruhan siklus manajemen bencana. Peningkatan ketahanan daerah yang solid ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dibangun di atas fondasi penguatan lima pilar utama kapasitas yang fundamental, yaitu penguatan struktur kelembagaan yang responsif, optimalisasi sistem peringatan dini (*early warning system*) yang akurat, penyelenggaraan pendidikan kebencanaan yang masif kepada publik, serta implementasi upaya mitigasi fisik maupun non-fisik dan kesiapsiagaan yang terencana dengan matang. Gambaran komprehensif mengenai hubungan kausalitas antara penurunan risiko dan peningkatan ketahanan daerah ini disajikan secara visual dalam Gambar berikut:



Gambar 2. 10 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

Eskalasi fenomena bencana alam yang melanda suatu wilayah kini tidak lagi dapat dipandang secara parsial sebagai akibat tunggal dari faktor kerawanan geofisik lokal semata. Lebih jauh dari itu, frekuensi dan intensitas bencana telah

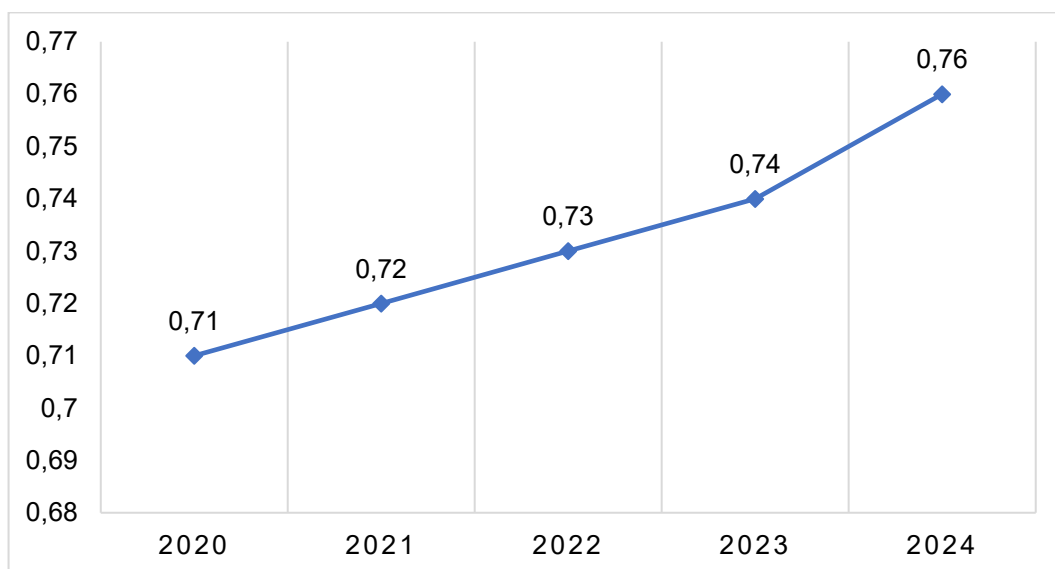


berakselerasi secara dramatis akibat dampak destruktif dari fenomena global perubahan iklim. Perubahan iklim ini memicu efek domino yang luas, sistemik, dan multidimensi, yang tidak hanya mengancam stabilitas pertumbuhan sektor ekonomi dan menghambat produktivitas daerah, tetapi juga memengaruhi kualitas kesehatan masyarakat secara umum melalui munculnya vektor penyakit baru, hingga mengganggu keseimbangan ekosistem alam yang vital. Secara spesifik, ancaman langsung yang paling nyata dan meresahkan dari krisis iklim ini bermanifestasi dalam bentuk kenaikan muka air laut (*sea level rise*) yang secara spesifik membahayakan keberlangsungan kawasan pesisir melalui ancaman abrasi dan banjir rob, serta anomali cuaca berupa peningkatan intensitas dan frekuensi kejadian cuaca ekstrem yang polanya semakin volatil, acak, dan sulit diprediksi dampaknya.

Merespons dinamika lingkungan yang semakin kritis tersebut, implementasi upaya mitigasi perubahan iklim menjadi langkah mutlak, imperatif, dan mendesak yang harus dilakukan guna mereduksi risiko kerusakan sistemik bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Dalam kerangka strategis ini, pelaksanaan kegiatan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) menempati posisi sentral sebagai langkah fundamental atau batu pijakan awal. Upaya inventarisasi ini bertujuan untuk menyediakan basis data yang akurat, valid, dan komprehensif guna mengidentifikasi, mengukur, serta memetakan sumber-sumber emisi karbon secara presisi. Tujuannya adalah agar strategi pengurangan emisi dapat dirumuskan secara *evidence-based* dan dieksekusi secara terukur, sistematis, serta tepat sasaran pada sektor-sektor prioritas yang menjadi penyumbang emisi terbesar, seperti sektor energi, limbah, maupun pertanian.

Selanjutnya, efektivitas kinerja mitigasi daerah ini dievaluasi secara ketat melalui indikator intensitas emisi GRK, dengan fokus utama pada parameter Potensi Penurunan Emisi GRK Kumulatif dalam satuan ton CO₂ ekuivalen (ton CO₂eq). Berdasarkan hasil pemantauan data terintegrasi melalui platform Sistem Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan Nasional Rendah Karbon (AKSARA) dengan data mutakhir yang diakses pada tanggal 30 Mei 2024, tercatat fakta yang menggembirakan bahwa potensi penurunan emisi di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren positif berupa kenaikan grafik yang sangat signifikan sejak tahun dasar 2020. Lonjakan capaian angka potensi penurunan ini bukan sekadar representasi statistik di atas kertas semata, melainkan sebuah manifestasi konkret dari kuatnya komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten

Pasuruan dalam berkontribusi aktif menyukseskan upaya global mengurangi emisi Gas Rumah Kaca, demi mewujudkan visi pembangunan daerah yang rendah karbon, hijau, dan berkelanjutan. Adapun rincian detail mengenai tren capaian komitmen penurunan emisi ini divisualisasikan secara lengkap pada Gambar berikut:



Gambar 2. 11 Penurunan Emisi GRK Kumulatif di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024 (AKSARA, 30 Mei 2024)

2.6. Demografi

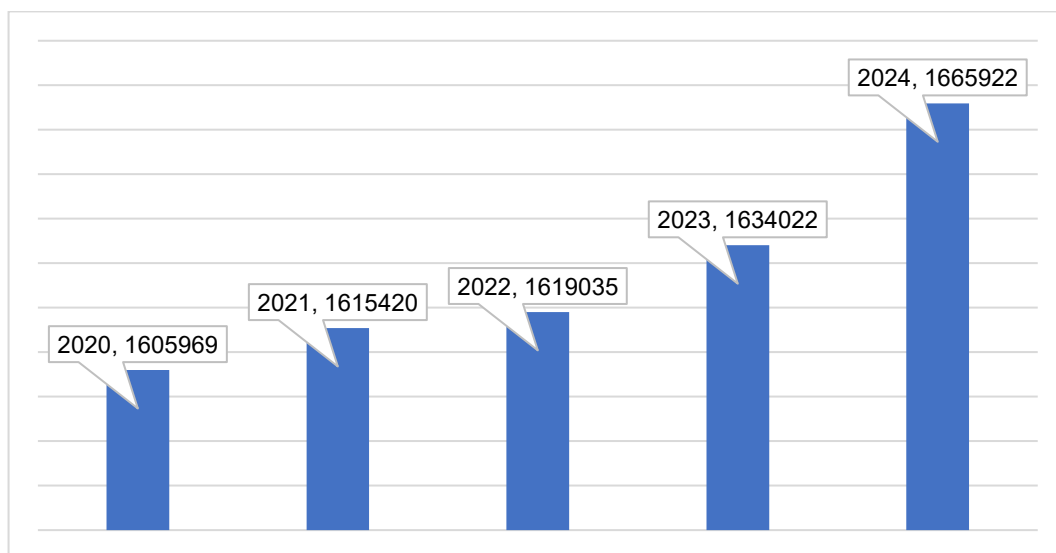
Dalam perspektif pembangunan daerah yang holistik, penduduk menempati posisi sentral sebagai salah satu modal dasar (basic capital) yang paling fundamental. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya disandarkan pada aspek kuantitas atau besaran jumlah penduduk semata, melainkan harus diimbangi dengan perhatian yang serius terhadap aspek kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar memang memiliki potensi, tetapi apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas, kompetensi, dan produktivitas, justru berpotensi memicu permasalahan sosial yang kompleks dan bertransformasi menjadi beban atau hambatan (liability) dalam akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah.

2.6.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan analisis terhadap data runtun waktu selama periode lima tahun (2020-2024) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten

Pasuruan, dinamika kependudukan di wilayah ini menunjukkan tren yang dinamis. Tercatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan secara konsisten mengalami kenaikan, dengan catatan khusus pada tahun 2024 di mana laju pertumbuhan penduduk mengalami lonjakan peningkatan yang paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam periode tersebut.

Data tren demografi ini memegang nilai signifikansi yang tinggi sebagai basis data utama dalam formulasi perencanaan pembangunan strategis maupun perumusan kebijakan sosial di daerah. Hal ini dikarenakan keberadaan populasi penduduk yang besar secara langsung berkorelasi dengan jaminan ketersediaan pasokan tenaga kerja (labor supply). Ketersediaan sumber daya manusia ini sangat krusial untuk mengisi kebutuhan pasar kerja dan menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor unggulan, mulai dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan yang masif, hingga sektor jasa. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk yang sehat dan terkendali diharapkan mampu menjamin ketersediaan jumlah angkatan kerja yang produktif guna mendukung daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.



Gambar 2. 12 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Analisis terhadap perkembangan demografi di Kabupaten Pasuruan selama periode lima tahun terakhir (2020-2024) memperlihatkan tren yang cukup dinamis. Berdasarkan data visualisasi grafik, jumlah total penduduk secara konsisten mengalami tren kenaikan positif di setiap tahunnya, bergerak dari angka 1.605.969 jiwa pada tahun 2020 hingga mencapai 1.665.922 jiwa pada tahun

2024. Kenaikan kuantitas ini mencerminkan daya tarik wilayah serta pertumbuhan alami yang terus berjalan.

Namun, jika ditinjau dari sisi laju pertumbuhan penduduk (LPP), tren yang terjadi menunjukkan pola fluktuasi yang signifikan, yang merefleksikan dinamika keberhasilan dan tantangan dalam kebijakan kependudukan:

1. Fase Akselerasi Awal (2021-2022): Terjadi peningkatan laju pertumbuhan dari 0,59% pada tahun 2021 menjadi 0,81% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan adanya lonjakan pertumbuhan pasca-awal pandemi.
2. Fase Perlambatan (2023): Pada tahun 2023, laju pertumbuhan berhasil ditekan secara signifikan menjadi 0,58%. Angka ini menjadi titik terendah dalam periode pengamatan, yang mengindikasikan efektivitas intervensi program pengendalian penduduk pada tahun tersebut.
3. Fase Percepatan Kembali (2024): Memasuki tahun 2024, terjadi *rebound* atau percepatan kembali laju pertumbuhan yang cukup tajam mencapai angka 0,93%.

Secara keseluruhan, fluktuasi ini khususnya kemampuan daerah dalam menekan laju pertumbuhan pada periode tertentu (seperti tahun 2023) mengindikasikan bahwa instrumen dan program pengendalian penduduk di Kabupaten Pasuruan telah berjalan, meskipun masih menghadapi tantangan volatilitas yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Pola naik-turunnya laju pertumbuhan ini menjadi *baseline* penting untuk evaluasi strategi keluarga berencana dan manajemen migrasi di masa mendatang.

2.6.2. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Selain aspek pertumbuhan, pemahaman mengenai struktur umur penduduk adalah faktor kunci dalam perencanaan kebijakan publik, baik di sektor ekonomi maupun sosial. Dengan membedah komposisi umur, pemerintah dapat merancang program yang lebih presisi dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan kelompok usia dominan.

Berikut adalah rincian data jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan berdasarkan kelompok umur pada tahun 2024:

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan menurut Kelompok Umur Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-laki (Ribuan Jiwa)	Perempuan (Ribuan Jiwa)	Jumlah (Ribuan Jiwa)
0-4	56.368	53.125	109.493
5-9	68.274	64.265	132.539

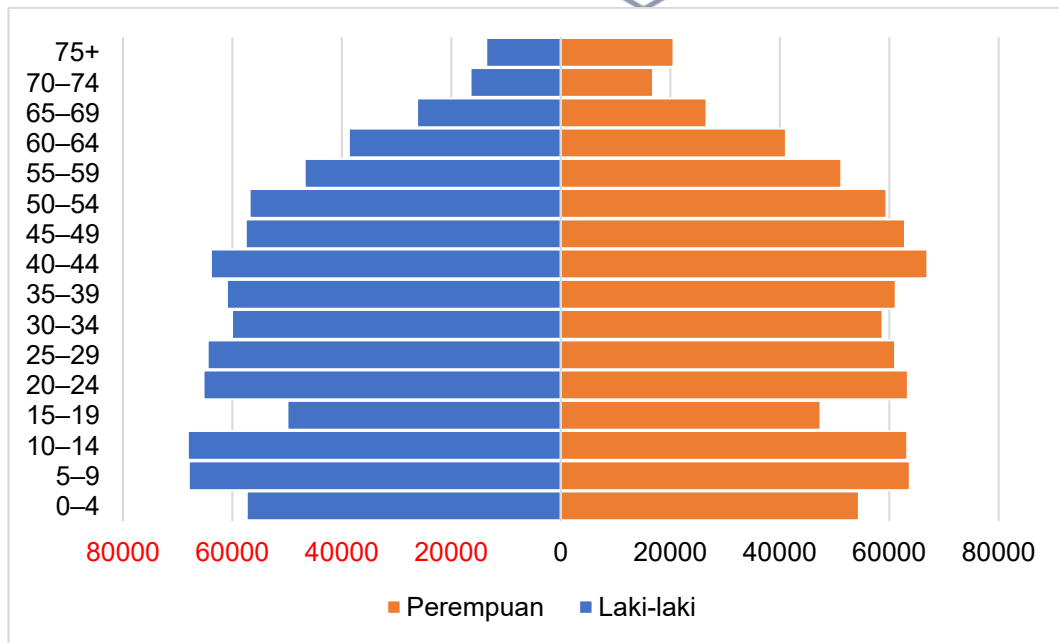
Kelompok Umur	Laki-laki (Ribuan Jiwa)	Perempuan (Ribuan Jiwa)	Jumlah (Ribuan Jiwa)
10-14	69.017	63.829	132.846
15-19	56.037	53.250	109.287
20-24	65.200	62.932	128.132
25-29	65.440	61.660	127.100
30-34	61.188	59.399	120.587
35-39	60.187	60.282	120.469
40-44	64.422	66.562	130.984
45-49	58.813	64.015	122.828
50-54	56.437	59.406	115.843
55-59	49.169	54.314	103.483
60-64	39.426	42.340	81.766
65-69	28.007	29.118	57.125
70-74	18.166	18.164	36.330
75+	14.954	22.156	37.110
Jumlah	831.105	834.817	1.665.922

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Merujuk pada Tabel di atas, dapat diidentifikasi pola persebaran usia yang signifikan. Kelompok umur 10-14 tahun tercatat sebagai kelompok dengan jumlah populasi tertinggi. Temuan ini membawa implikasi kebijakan bahwa pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan kapasitas fasilitas pendidikan menengah serta program pengembangan anak dan remaja.

Di sisi lain, jumlah penduduk terendah berada pada kelompok lansia (umur 70-74 tahun dan 75+). Angka yang mengecil pada kelompok usia lanjut ini dapat mengindikasikan adanya tingkat mortalitas yang lebih tinggi pada segmen tersebut, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor akses terhadap layanan kesehatan geriatri, kondisi kesehatan umum, atau faktor sosial ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Gambaran lebih komprehensif mengenai struktur demografi dapat dilihat melalui bentuk piramida penduduk yang menggabungkan variabel umur dan jenis kelamin. Visualisasi ini krusial untuk menentukan karakteristik demografi suatu wilayah, apakah sedang tumbuh, stagnan, atau menua. Berikut adalah visualisasi Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2024:



Gambar 2. 13 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2024
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Sebagaimana terlihat pada Gambar tersebut, piramida penduduk Kabupaten Pasuruan dikategorikan sebagai jenis Piramida Ekspansif. Bentuk piramida yang melebar di bagian bawah ini menunjukkan bahwa penduduk di wilayah ini berada dalam fase pertumbuhan (*growing population*).

Karakteristik utama dari piramida ekspansif ini meliputi:

1. Dominasi Penduduk Usia Muda: Sebagian besar populasi terkonsentrasi pada kelompok usia anak-anak dan remaja, yang menjadi basis bagi bonus demografi di masa depan.
2. Proporsi Lansia Kecil: Kelompok usia tua jumlahnya semakin mengerucut di bagian atas piramida.
3. Tingkat Kelahiran Tinggi: Dasar piramida yang lebar mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran bayi masih cukup tinggi.
4. Pertumbuhan Penduduk Tinggi: Secara agregat, wilayah ini masih mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat, yang menuntut penyediaan lapangan kerja dan layanan dasar yang masif.

2.6.3. Persebaran Penduduk & Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
 Dinamika persebaran penduduk merefleksikan pola konsentrasi pemukiman yang dipengaruhi oleh daya dukung wilayah dan aktivitas ekonomi. Berdasarkan analisis data demografi Kabupaten Pasuruan dari tahun 2020 hingga 2024 yang

mencakup 24 kecamatan, terlihat adanya pola distribusi yang tidak merata antarwilayah.

Kecamatan Gempol secara konsisten tercatat sebagai wilayah dengan densitas demografi tertinggi, dengan jumlah penduduk mencapai 133.197 jiwa pada tahun 2024. Tingginya angka ini menempatkan Gempol sebagai pusat konsentrasi penduduk utama di kabupaten. Sebaliknya, Kecamatan Tosari menjadi wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 18.925 jiwa pada tahun 2024. Jumlah ini merepresentasikan proporsi yang sangat kecil, yakni hanya sekitar 1,2% dari total keseluruhan penduduk Kabupaten Pasuruan, yang mengindikasikan karakteristik wilayah yang mungkin lebih didominasi oleh kawasan lindung atau topografi pegunungan dengan pemukiman yang terbatas.

Rincian lengkap data tren persebaran penduduk di setiap kecamatan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7 Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	70.015	70.438	70.601	71.345	72.781
2	Tutur	53.743	53.887	53.830	55.107	56.187
3	Puspo	27.722	27.771	27.778	28.164	28.762
4	Tosari	18.799	18.818	18.837	18.550	18.925
5	Lumbang	35.174	35.385	35.464	35.879	36.681
6	Pasrepan	52.396	52.594	52.596	53.259	54.556
7	Kejayan	65.374	65.603	65.589	67.235	68.733
8	Wonorejo	59.864	60.186	60.286	61.112	62.326
9	Purwosari	84.137	84.706	84.962	86.266	88.051
10	Prigen	87.227	87.649	87.745	88.671	90.372
11	Sukorejo	87.477	88.069	88.336	88.839	90.568
12	Pandaan	111.062	111.563	111.651	112.299	114.237
13	Gempol	129.990	130.596	130.719	130.809	133.197
14	Beji	87.022	87.864	88.385	89.930	91.405
15	Bangil	83.307	83.671	83.724	84.241	85.504
16	Rembang	66.711	67.294	67.631	68.840	70.810
17	Kraton	88.525	88.912	88.969	88.535	90.315
18	Pohjentrek	31.296	31.581	31.751	31.436	31.900
19	Gondangweta n	56.264	56.589	56.705	57.339	58.533
20	Rejoso	46.766	47.036	47.132	48.366	49.070
21	Winongan	44.287	44.569	44.686	45.565	46.331
22	Grati	78.930	79.368	79.512	80.858	82.186
23	Lekok	77.514	78.176	78.551	78.286	80.139

N o	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
24	Nguling	62.367	63.095	63.595	63.091	64.353
	Kabupaten Pasuruan	1.605.96 9	1.615.42 0	1.619.03 5	1.634.02 2	1.665.92 2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Indikator kepadatan penduduk merupakan parameter krusial dalam perencanaan tata ruang, karena menggambarkan intensitas tekanan demografis terhadap daya dukung lingkungan. Secara teoritis, standar kepadatan penduduk yang dianggap ideal untuk kenyamanan ruang hidup adalah 500 jiwa per kilometer persegi (km^2). Semakin tinggi angka kepadatan di atas ambang batas tersebut, semakin besar pula tantangan dalam penyediaan infrastruktur, sanitasi, dan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan analisis data Badan Pusat Statistik tahun 2024, distribusi kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan menunjukkan disparitas yang sangat tajam antarwilayah. Secara agregat, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Pasuruan telah mencapai 1.130,19 jiwa/ km^2 , angka yang jauh melampaui ambang batas ideal.

Tingkat kepadatan tertinggi terkonsentrasi di Kecamatan Pohjentrek, dengan angka densitas mencapai 2.685,19 jiwa/ km^2 . Angka ini mengindikasikan kondisi wilayah yang sangat padat (*overcrowded*), yang juga diikuti oleh wilayah urban lainnya seperti Kecamatan Pandaan (2.640,10 jiwa/ km^2) dan Kecamatan Beji (2.290,85 jiwa/ km^2). Tingginya kepadatan di wilayah-wilayah ini menuntut prioritas pada penataan kawasan kumuh dan manajemen limbah domestik.

Di sisi lain, spektrum kepadatan terendah berada di Kecamatan Tosari, dengan angka densitas hanya sebesar 193,11 jiwa/ km^2 . Wilayah ini, bersama dengan Kecamatan Lumbang (292,16 jiwa/ km^2) dan Kecamatan Puspo (492,92 jiwa/ km^2), menjadi satu-satunya tiga kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang masih berada dalam kategori kepadatan ideal (di bawah 500 jiwa/ km^2). Rendahnya kepadatan di wilayah-wilayah ini umumnya berkorelasi dengan karakteristik topografi pegunungan dan fungsi kawasan sebagai area konservasi atau pertanian.

Rincian lengkap mengenai tren kepadatan penduduk di seluruh kecamatan dari tahun 2021 hingga 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 8 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	687,47	689,06	696,32	710,34
2	Tutur	624,41	623,75	638,55	651,07
3	Puspo	475,94	476,06	482,67	492,92
4	Tosari	192,02	192,21	189,29	193,11
5	Lumbang	281,84	282,47	285,77	292,16
6	Pasrepan	584,70	584,72	592,10	606,51
7	Kejayan	828,84	828,67	849,46	868,39
8	Wonorejo	1.272,43	1.274,55	1.292,01	1.317,67
9	Purwosari	1.414,83	1.419,11	1.440,89	1.470,70
10	Prigen	719,02	719,81	728,79	741,36
11	Sukorejo	1.513,73	1.518,32	1.524,08	1.556,69
12	Pandaan	2.578,30	2.580,33	2.595,31	2.640,10
13	Gempol	2.011,65	2.013,54	2.014,93	2.051,71
14	Beji	2.202,11	2.215,16	2.253,88	2.290,85
15	Bangil	1.876,03	1.877,22	1.888,81	1.917,13
16	Rembang	1.582,64	1.590,57	1.619,00	1.665,33
17	Kraton	1.751,96	1.753,08	1.744,53	1.779,61
18	Pohjentrek	2.658,33	2.672,64	2.646,13	2.685,19
19	Gondangwetan	2.155,77	2.160,19	2.184,34	2.229,83
20	Rejoso	1.271,24	1.273,84	1.307,19	1.326,22
21	Winongan	969,52	972,07	991,19	1.007,85
22	Grati	1.562,98	1.565,81	1.592,32	1.618,47
23	Lekok	1.678,68	1.686,73	1.681,04	1.720,83
24	Nguling	1.481,10	1.492,84	1.481,01	1.510,63
Kabupaten Pasuruan		1.095,93	1.098,38	1.108,55	1.130,19

1 Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) merupakan indikator demografi vital yang mengukur perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Indikator ini biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Keseimbangan rasio ini memiliki implikasi strategis dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender.

Berdasarkan analisis, terlihat adanya dinamika pergeseran struktur gender penduduk di Kabupaten Pasuruan selama empat tahun terakhir. Pada periode tahun 2021 hingga 2022, Kabupaten Pasuruan masih didominasi oleh penduduk laki-laki, ditandai dengan angka rasio di atas 100, yakni 100,13 pada tahun 2021 dan 100,11 pada tahun 2022.

Namun, memasuki tahun 2023 dan 2024, terjadi titik balik (*turning point*) di mana komposisi penduduk perempuan mulai lebih mendominasi dibandingkan

laki-laki. Hal ini tecermin dari penurunan angka rasio menjadi 99,45 pada tahun 2023 dan sedikit naik namun tetap di bawah seratus pada angka 99,56 di tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa saat ini jumlah penduduk perempuan secara agregat lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki.

Jika ditinjau lebih spesifik per wilayah kecamatan pada tahun 2024, terdapat variasi yang cukup mencolok. Beberapa kecamatan masih mempertahankan dominasi laki-laki, seperti Kecamatan Prigen dengan rasio tertinggi sebesar 101,78. Sebaliknya, wilayah dengan dominasi perempuan (rasio terendah) terdapat di Kecamatan Nguling dengan angka rasio 96,40, yang mengindikasikan jumlah perempuan jauh melampaui laki-laki di wilayah tersebut.

Pergeseran dominasi jumlah penduduk ke arah perempuan ini membawa dampak turunan yang signifikan baik secara sosial maupun ekonomi:

1. Dampak Ekonomi: Peningkatan jumlah perempuan berpotensi mendorong partisipasi angkatan kerja wanita yang lebih besar. Hal ini menjadi peluang untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan kesetaraan pendapatan keluarga.
2. Dampak Sosial: Perubahan ini dapat mengubah dinamika peran dalam keluarga dan masyarakat, yang menuntut adanya kebijakan yang lebih inklusif untuk menjamin kesetaraan gender dan akses layanan publik yang setara bagi perempuan.

Data lengkap mengenai perbandingan rasio jenis kelamin di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 9 Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024
1	Purwodadi	103,00	103,10	101,09	101,62
2	Tutur	101,78	101,72	100,76	101,09
3	Puspo	99,06	99,10	98,51	99,49
4	Tosari	99,47	99,29	99,36	99,78
5	Lumbang	98,90	98,90	98,07	98,35
6	Pasrepan	97,32	97,35	96,82	96,89
7	Kejayan	96,96	97,15	96,52	96,62
8	Wonorejo	97,77	97,87	97,28	97,32
9	Purwosari	101,45	101,47	100,93	100,88
10	Prigen	102,20	102,14	101,73	101,78
11	Sukorejo	99,43	99,32	99,23	99,55
12	Pandaan	100,28	100,32	100,30	100,29
13	Gempol	101,41	101,30	101,20	101,11

14	Beji	101,09	101,07	100,38	100,55
15	Bangil	99,80	99,63	99,38	99,32
16	Rembang	97,23	97,20	96,54	96,75
17	Kraton	103,06	102,88	100,09	100,08
18	Pohjentrek	102,27	102,25	101,49	101,26
19	Gondangwetan	102,31	102,62	100,91	100,89
20	Rejoso	101,89	101,83	101,63	101,65
21	Winongan	99,40	99,30	99,47	99,30
22	Grati	99,09	98,99	97,98	98,02
23	Lekok	98,37	98,49	97,80	98,24
24	Nguling	96,40	96,33	96,42	96,40
Kabupaten Pasuruan		100,13	100,11	99,45	99,56

Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

2.6.4. Komposisi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan merupakan parameter fundamental untuk mengukur dinamika ekonomi dan produktivitas daerah. Berdasarkan data periode 2021-2024, struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pemulihan dan penguatan yang positif.

Secara kuantitas, jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya, bergerak dari 893.726 jiwa pada tahun 2021 menjadi 978.581 jiwa pada tahun 2024. Tren kenaikan ini berbanding terbalik dengan kelompok Bukan Angkatan Kerja (seperti mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya) yang terus mengalami penurunan dari 401.053 jiwa (2021) menjadi 320.809 jiwa (2024). Pergeseran ini mengindikasikan semakin banyaknya penduduk usia produktif yang beralih status untuk aktif masuk ke pasar kerja.

Meskipun jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas sempat mengalami fluktuasi berupa penurunan pada tahun 2023 menjadi 1.285.630 jiwa, namun indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) justru menunjukkan tren positif yang terus menanjak, mencapai 71,31% pada tahun 2024. Kenaikan TPAK ini merefleksikan tingginya semangat dan ketersediaan penduduk untuk bekerja.

Di sisi lain, keberhasilan penyerapan tenaga kerja tecermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang signifikan, dari 6,03% pada tahun 2021 turun menjadi 5,02% pada tahun 2024. Hal ini didorong oleh kenaikan jumlah penduduk yang bekerja yang mencapai 929.468 jiwa pada tahun 2024, sementara jumlah pengangguran berhasil ditekan menjadi 49.113 jiwa. Rincian indikator makro ketenagakerjaan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 10 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja	Jiwa	893726	916175	915507	978581
	Bekerja	Jiwa	839861	862062	865336	929468
	Pengangguran	Jiwa	53865	54113	50171	49113
2	Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	401053	389023	370123	320809
	Sekolah	Jiwa	80310	70415	82044	78547
	Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	247535	258013	237580	201369
	Lainnya	Jiwa	73208	60595	50499	40893
3	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Jiwa	1294779	1305198	1285630	1299390
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,03	70,19	71,21	71,31
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03	5,91	5,48	5,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Ditinjau dari jenis pekerjaannya, struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan terlihat didominasi oleh sektor formal dan industri. Berdasarkan Tabel tersebut, mayoritas penduduk Kabupaten Pasuruan bekerja sebagai Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honorer, dengan jumlah mencapai 359.929 jiwa pada tahun 2024. Dominasi ini selaras dengan karakteristik wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Sektor pertanian juga masih memegang peranan penting, terlihat dari jumlah Petani/Peternak/Nelayan yang stabil di angka 189.490 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, jenis pekerjaan dengan jumlah paling sedikit tercatat pada profesi Pembantu Rumah Tangga yang hanya berjumlah 626 jiwa pada tahun 2024.

Secara implisit, komposisi struktur pekerjaan tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang cukup tinggi terhadap sektor industri dan pertanian sebagai penopang utama penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini mencerminkan karakter ekonomi yang relatif produktif, namun sekaligus menuntut perhatian pada aspek perlindungan tenaga kerja, stabilitas pendapatan,

serta keberlanjutan sektor-sektor dominan tersebut agar ketahanan ekonomi daerah tetap terjaga dalam jangka panjang.

Data lengkap mengenai sebaran jenis pekerjaan penduduk dapat dilihat pada kelanjutan tabel berikut:

Tabel 2. 11 Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	2021	2022	2023	2024
1	Belum/Tidak Bekerja	366672	378282	391685	397661
2	Mengurus Rumah Tangga	230025	238608	246299	249523
3	Pelajar/Mahasiswa	235356	224234	213833	208582
4	PNS/TNI/Polri/Pensiunan	16834	16664	16565	16465
5	Petani/Peternak/Nelayan	189977	189391	189410	189490
6	Buruh Tani/Ternak/Nelayan	20114	20111	21479	21818
7	Perdagangan/Industri/Konstruksi/Transportasi	1862	1814	1844	1839
8	Buruh Harian Lepas	8948	9122	11640	12448
9	Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honoror	351171	357574	359011	359929
10	Guru/Dosen	11896	12306	12524	12693
11	Pembantu Rumah Tangga	638	622	625	626
12	Tukang Batu/Kayu	2149	2184	2650	2730
13	Pedagang/Wiraswasta	157972	159497	154107	161038
14	Kepala/Perangkat Desa	1186	1152	1106	1089
15	Lainnya	7123	4629	11244	4807

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024
(Data diolah)*

2.6.5. Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk merupakan indikator fundamental dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus cerminan kualitas tenaga kerja di suatu wilayah. Berdasarkan data runtun waktu tahun 2021-2024, profil pendidikan penduduk Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola distribusi yang mengerucut pada pendidikan dasar.

Secara kuantitas, penduduk dengan kualifikasi pendidikan Tamat SD/ sederajat masih mendominasi struktur demografi pendidikan, dengan proporsi mencapai 30,33% atau sebanyak 497.614 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, jenjang pendidikan tertinggi yakni S2/S3 memiliki jumlah populasi paling sedikit, yakni hanya 2.122 jiwa (0,13%). Ketimpangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan daya saing daerah di era ekonomi berbasis pengetahuan.

Meskipun demikian, terdapat pergeseran tren yang positif jika dilihat dari kontribusi per jenjang pendidikan. Kelompok penduduk dengan pendidikan rendah, khususnya yang Belum Tamat SD/ sederajat dan Tamat SD/ sederajat, menunjukkan tren penurunan persentase dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan akses pendidikan dasar dan keberhasilan program wajib belajar.

Di sisi lain, terjadi peningkatan yang menggembirakan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Penduduk yang menamatkan pendidikan SLTA/ sederajat mengalami kenaikan konsisten hingga mencapai 278.598 jiwa pada tahun 2024. Tren kenaikan serupa juga terjadi pada lulusan pendidikan tinggi (D1-D3, D4/S1, hingga S2/S3), yang menandakan semakin membaiknya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi pendidikan tinggi. Namun, perlu menjadi catatan khusus bahwa kelompok Tidak/ Belum Sekolah juga mengalami peningkatan angka yang cukup signifikan, yang kemungkinan besar berkorelasi dengan tingginya angka kelahiran (penduduk usia prasekolah) sebagaimana terlihat pada piramida penduduk ekspansif.

Rincian lengkap mengenai perkembangan komposisi pendidikan penduduk ini dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2. 12 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
1	Tidak/belum sekolah	324914	341313	357417	364634
2	Belum tamat SD/ sederajat	244233	235317	229615	226048
3	Tamat SD/ sederajat	505584	501397	498965	497614
4	Tamat SLTP/ sederajat	217145	216089	216327	217241
5	Tamat SLTA/ sederajat	260185	269151	276243	278598
6	D1/D2/D3	9614	9871	10118	10237
7	D4/S1	38552	41085	43275	44244
8	S2/S3	1825	1967	2062	2122
Total		1602052	1616190	1634022	1640738

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024,
diolah

Tabel 2. 13 Presentase Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
1	Tidak/belum sekolah	20,28	21,12	21,87	22,22
2	Belum tamat SD/ sederajat	15,25	14,56	14,05	13,78
3	Tamat SD/ sederajat	31,56	31,02	30,54	30,33
4	Tamat SLTP/ sederajat	13,55	13,37	13,24	13,24
5	Tamat SLTA/ sederajat	16,24	16,65	16,91	16,98
6	D1/D2/D3	0,6	0,61	0,62	0,62
7	D4/S1	2,41	2,54	2,65	2,7
8	S2/S3	0,11	0,12	0,13	0,13
Total		100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024, diolah

2.6.6. Komposisi Penduduk berdasarkan Agama dan Kepercayaan yang Dianut

Data mengenai komposisi agama dan kepercayaan merupakan indikator sosial yang penting untuk memetakan karakteristik sosiologis masyarakat serta merawat kerukunan antarumat beragama. Berdasarkan data runtun waktu tahun 2021-2024, struktur demografi religius di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola yang sangat stabil dengan dominasi mayoritas yang jelas.

Penganut agama Islam merupakan kelompok terbesar secara mutlak. Pada tahun 2024, jumlah penduduk muslim tercatat sebanyak 1.616.155 jiwa, yang merepresentasikan 98,50% dari total populasi. Angka ini menunjukkan peningkatan persentase yang perlahan namun konsisten dibandingkan tahun 2021 yang berada di angka 98,45%. Dominasi ini menegaskan identitas Kabupaten Pasuruan sebagai wilayah dengan basis komunitas muslim yang sangat kuat.

Di sisi lain, keberagaman tetap terlihat dengan keberadaan pemeluk agama lain. Secara statistik, Hindu menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah 14.999 jiwa (0,91%) pada tahun 2024, diikuti oleh penganut Kristen sebanyak 6.863 jiwa (0,42%) dan Katholik sebanyak 2.362 jiwa (0,14%).

Sementara itu, kelompok dengan jumlah penganut paling sedikit adalah agama Konghucu, yang pada tahun 2024 tercatat hanya berjumlah 17 jiwa (0,001%), serta penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berjumlah 23 jiwa. Meskipun proporsinya kecil, keberadaan berbagai kelompok

agama ini menandakan adanya heterogenitas yang terjaga dalam harmoni sosial di Kabupaten Pasuruan.

Rincian lengkap statistik penduduk berdasarkan agama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 14 Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama dan Kepercayaan	2021 Jiwa	2022 Jiwa	2023 Jiwa	2024 Jiwa
1	Islam	1580238	1591629	1609458	1616155
2	Kristen	6974	6883	6885	6863
3	Katholik	2430	2402	2377	2362
4	Hindu	14991	14891	14937	14999
5	Budha	367	351	326	319
6	Konghuchu	11	11	15	17
7	Kepercayaan	26	23	24	23
Total		1605037	1616190	1634022	1640738

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024, diolah

Tabel 2. 15 Presentase Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

No	Agama dan Kepercayaan	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %
1	Islam	98,455	98,48	98,497	98,501
2	Kristen	0,435	0,426	0,421	0,418
3	Katholik	0,151	0,149	0,145	0,144
4	Hindu	0,934	0,921	0,914	0,914
5	Budha	0,023	0,022	0,02	0,019
6	Konghuchu	0,001	0,001	0,001	0,001
7	Kepercayaan	0,002	0,001	0,001	0,001
Total		100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024, diolah

2.6.7. Proyeksi Demografi

Proyeksi penduduk merupakan instrumen perencanaan strategis yang dibangun melalui perhitungan ilmiah, dengan mempertimbangkan asumsi dinamika komponen pertumbuhan penduduk yakni fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (perpindahan). Keakuratan estimasi jumlah dan struktur

penduduk untuk lima tahun mendatang menjadi basis fundamental bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang presisi dan antisipatif.

Pemanfaatan data proyeksi demografi ini memiliki urgensi yang mencakup berbagai dimensi pembangunan strategis:

1. Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah: Data ini menjadi acuan dalam menghitung beban kebutuhan dasar di masa depan, memastikan ketersediaan infrastruktur vital seperti jaringan jalan, pasokan listrik, dan akses air bersih mampu mengimbangi laju pertumbuhan populasi.
2. Optimalisasi Layanan Publik: Estimasi jumlah penduduk usia sekolah dan kelompok rentan memungkinkan pemerintah merencanakan kapasitas fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.
3. Ekonomi dan Kesejahteraan: Proyeksi ini krusial untuk memetakan kebutuhan perumahan (*housing backlog*), menyiapkan strategi penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, serta merancang kebijakan ekonomi yang efektif.
4. Keberlanjutan Lingkungan: Data ini membantu dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung lingkungan, serta memperkuat kesiapsiagaan dalam manajemen bencana berbasis kepadatan wilayah.

Dengan demikian, proyeksi penduduk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Pasuruan tidak hanya berjalan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga berkelanjutan (*sustainable*) bagi generasi mendatang.

1. Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan hasil pemodelan demografi untuk periode jangka menengah (2025-2030), estimasi jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun laju pertumbuhannya cenderung melambat. Data ini krusial sebagai landasan alokasi sumber daya daerah agar pembangunan dapat berjalan efektif.

Mengacu pada Tabel tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan dari 1.669,40 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 1.721,87 ribu jiwa pada tahun 2030. Kenaikan populasi ini secara langsung berdampak pada tingkat kepadatan penduduk yang diprediksi akan meningkat dari 1.132,55 jiwa/km² di tahun 2025 hingga mencapai angka di kisaran 1.161 jiwa/km² menjelang tahun

2030. Peningkatan densitas ini menuntut perhatian khusus pada penataan ruang dan penyediaan fasilitas publik.

Menariknya, struktur komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan pergeseran tren. Jika pada tahun 2025 rasio jenis kelamin diperkirakan masih seimbang di angka 100,00 (jumlah laki-laki dan perempuan setara), maka pada tahun-tahun berikutnya jumlah perempuan diproyeksikan akan mulai melampaui jumlah laki-laki. Hal ini terlihat dari penurunan angka rasio jenis kelamin (sex ratio) secara bertahap menjadi 99,54 pada tahun 2030.

Selain itu, terdapat indikasi perlambatan laju pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Laju pertumbuhan yang berada di angka 0,73% pada tahun 2025 diproyeksikan akan melandai menjadi 0,47% pada tahun 2030. Penurunan laju pertumbuhan ini dapat menjadi indikator keberhasilan program pengendalian penduduk atau perubahan pola fertilitas masyarakat.

Rincian lengkap data proyeksi jumlah, komposisi gender, dan kepadatan penduduk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 16 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	1669,4	1681,02	1692,08	1702,57	1712,51	1721,87
Laki-Laki (Ribuan Jiwa)	834,72	840,21	845,38	850,23	854,76	858,96
Perempuan (Ribuan Jiwa)	834,68	840,82	846,7	852,34	857,74	862,91
Laju Pertumbuhan (%)	0,73	0,7	0,66	0,62	0,58	0,47
Rasio Jenis Kelamin (%)	100	99,93	99,84	99,75	99,65	99,54
Kepadatan (Jiwa/Km ²)	1132,55	1140,43	1147,94	1155,05	1161,8	1153,05

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024, diolah

2. Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pemetaan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur memegang peranan vital dalam perencanaan pembangunan sektoral. Data ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebutuhan spesifik di masa depan, mulai dari penyediaan sarana pendidikan dasar, kesiapan lapangan kerja, hingga layanan kesehatan geriatri. Berdasarkan proyeksi tahun 2025-2030, struktur umur penduduk Kabupaten Pasuruan menunjukkan adanya transisi demografi yang signifikan.

Mengacu pada Tabel tersebut, terlihat tren penurunan yang konsisten pada kelompok penduduk usia dini dan sekolah. Kelompok umur 0-4 tahun diproyeksikan menurun dari 116,68 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 111,48 ribu jiwa pada tahun 2030. Penurunan serupa juga terjadi pada kelompok umur 5-14 tahun. Hal ini mengindikasikan keberhasilan program pengendalian kelahiran serta perubahan pola fertilitas di masyarakat, yang di satu sisi akan meringankan beban ketergantungan usia muda (young dependency ratio).

Sebaliknya, terjadi lonjakan yang sangat signifikan pada kelompok penduduk lanjut usia. Kelompok umur 60-64 tahun diprediksi meningkat tajam dari 83,06 ribu jiwa (2025) menjadi 96,33 ribu jiwa (2030). Kenaikan yang lebih dramatis terlihat pada kelompok lansia tua (75+ tahun), yang melonjak dari 36,72 ribu jiwa menjadi 52,88 ribu jiwa pada akhir periode proyeksi.

Fenomena ini menandakan bahwa Kabupaten Pasuruan sedang bergerak menuju struktur penduduk tua (aging population). Pergeseran ini menuntut adanya reorientasi kebijakan, di mana fokus pembangunan ke depan tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja bagi usia produktif, tetapi juga perluasan akses perlindungan sosial dan layanan kesehatan jangka panjang yang ramah lansia.

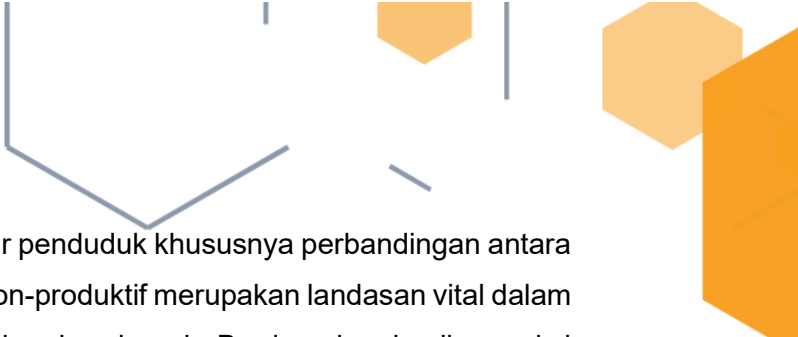
Rincian lengkap proyeksi penduduk per kelompok umur dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2. 17 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	116,68	115,51	114,41	113,36	112,38	111,48
5-9	119,32	118,11	116,66	115,32	114,72	116,14
10-14	122,46	122,97	123,41	123,47	122,45	119,01
15-19	119,49	119,84	120,33	120,87	121,41	121,95
20-24	120,88	119,94	119,22	118,74	118,53	118,59
25-29	126,64	125,25	123,77	122,29	120,93	119,79
30-34	130,29	129,64	128,85	127,91	126,82	125,57
35-39	129,71	130,16	130,27	130,09	129,71	129,19
40-44	123,59	124,11	125,14	126,43	127,64	128,5
45-49	123,63	123,93	123,51	122,74	122,13	122,03
50-54	111,75	113,7	115,96	118,23	120,08	121,22
55-59	101,45	103,18	104,5	105,61	106,83	108,34
60-64	83,06	85,88	88,77	91,61	94,16	96,33
65-69	63,4	66,17	68,73	71,14	73,57	76,1
70-74	40,34	43,18	46,14	49,14	52,04	54,75
75+	36,72	39,47	42,44	45,64	49,12	52,88
Jumlah	1669,4	1681,02	1692,08	1702,57	1712,51	1721,87

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024, diolah

- Proyeksi Penduduk Usia Produktif, Penduduk Usia Lanjut, Angka Ketergantungan, dan Bonus Demografi



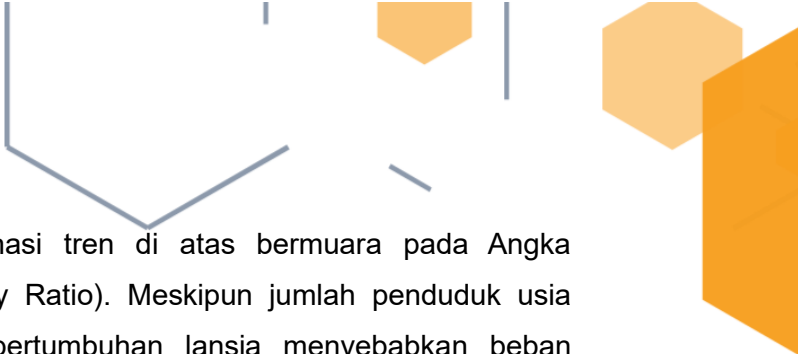
Analisis terhadap struktur umur penduduk khususnya perbandingan antara kelompok usia produktif dan non-produktif merupakan landasan vital dalam merancang kebijakan ekonomi makro daerah. Berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2030, Kabupaten Pasuruan diprediksi akan mengalami dinamika demografi yang menuntut adaptasi kebijakan yang cepat, terutama terkait pemanfaatan bonus demografi dan kesiapan menghadapi penuaan penduduk.

Secara umum, penduduk Kabupaten Pasuruan diprediksi menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,66%. Namun, pergeseran struktur demografis yang terjadi di dalamnya memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang di masa depan.

Pertama, terkait Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun). Kabupaten Pasuruan masih berada dalam fase Bonus Demografi yang optimal. Hal ini terlihat dari proporsi penduduk usia produktif yang sangat dominan, yakni mencapai 70,11% pada tahun 2025. Meskipun diproyeksikan mengalami fluktuasi dan sedikit penurunan menjadi 69,20% pada tahun 2030, angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk masih berada pada usia kerja yang potensial untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

Kedua, terjadi tren penurunan pada Penduduk Usia Muda (0-14 tahun). Persentase kelompok ini diproyeksikan menyusut secara bertahap dari 21,47% pada tahun 2025 menjadi 20,13% pada tahun 2030. Penurunan ini mengindikasikan bahwa beban tanggungan dari kelompok usia muda semakin berkurang seiring dengan keberhasilan pengendalian kelahiran.

Ketiga, tantangan utama muncul dari lonjakan Penduduk Usia Lanjut (65 tahun ke atas). Data menunjukkan percepatan pertumbuhan populasi lansia yang signifikan, bergerak dari 8,41% pada tahun 2025 hingga menembus angka dua digit menjadi 10,67% pada tahun 2030. Kenaikan proporsi ini menandakan bahwa Kabupaten Pasuruan mulai bertransisi menuju struktur penduduk tua (aging population), yang membawa konsekuensi pada perlunya peningkatan layanan kesehatan geriatri dan sistem jaminan sosial yang lebih inklusif.



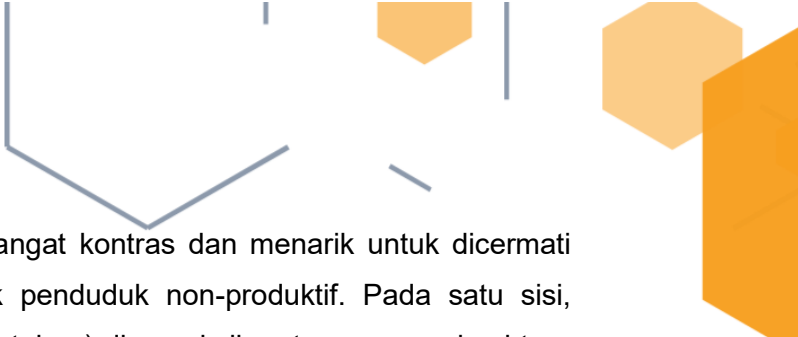
Implikasi dari kombinasi tren di atas bermuara pada Angka Ketergantungan (Dependency Ratio). Meskipun jumlah penduduk usia muda menurun, pesatnya pertumbuhan lansia menyebabkan beban ketergantungan penduduk secara total justru mengalami peningkatan. Angka ketergantungan diproyeksikan naik dari 42,62 pada tahun 2025 menjadi 44,51 pada tahun 2030. Secara statistik, angka 44,51 ini bermakna bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Pasuruan menanggung beban ekonomi sekitar 45 orang penduduk non-produktif (anak-anak dan lansia). Tren peningkatan beban ini menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk segera mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja sebelum beban demografi menjadi semakin berat di masa depan.

2.7. Kondisi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

2.7.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

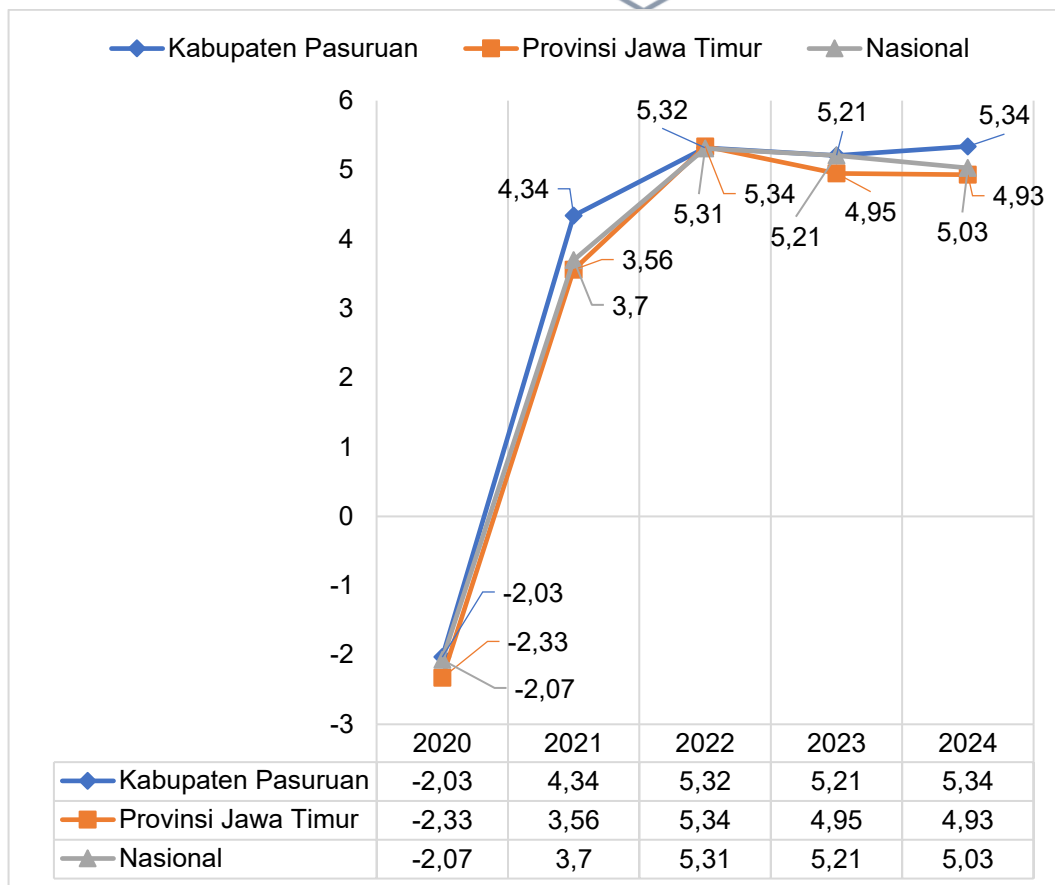
Proyeksi demografi untuk periode tahun 2025 hingga 2030 memberikan gambaran yang sangat krusial dan mendalam mengenai peta jalan pergeseran beban ekonomi serta transformasi struktur tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan. Secara agregat, jumlah penduduk diproyeksikan akan terus tumbuh secara stabil dengan laju rata-rata pertumbuhan sebesar 0,66% per tahun. Namun, di balik angka pertumbuhan kuantitatif yang terlihat moderat dan terkendali ini, sesungguhnya sedang terjadi perubahan fundamental dan dinamis pada komposisi internal kelompok umur penduduk. Pergeseran struktur ini membawa implikasi serius yang menuntut perhatian khusus serta strategi adaptif dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah maupun panjang.

Ditinjau dari sisi potensi modal manusia dan ekonomi, Kabupaten Pasuruan saat ini masih berada dalam koridor emas fase Bonus Demografi. Kondisi menguntungkan ini ditandai dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang persentasenya sangat masif dibandingkan kelompok usia lainnya. Pada tahun 2025, proporsi kelompok produktif ini tercatat mencapai angka dominan sebesar 70,11% dari total populasi. Meskipun diprediksi akan mengalami sedikit koreksi penurunan secara alami menjadi 69,20% pada tahun 2030, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa ketersediaan suplai tenaga kerja di daerah ini masih sangat melimpah. Cadangan sumber daya manusia ini merupakan aset vital yang siap digerakkan untuk menopang percepatan roda aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.



Di sisi lain, dinamika yang sangat kontras dan menarik untuk dicermati terjadi pada kedua kutub kelompok penduduk non-produktif. Pada satu sisi, kelompok penduduk usia muda (0-14 tahun) diproyeksikan terus mengalami tren penurunan proporsi, yakni bergerak turun dari 21,47% pada tahun 2025 menjadi 20,13% pada tahun 2030. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikator keberhasilan program pengendalian fertilitas dan keluarga berencana. Namun sebaliknya, fenomena penuaan penduduk (aging population) justru mulai terlihat nyata dan signifikan. Proporsi penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) diprediksi akan melonjak cukup tajam dari 8,41% pada tahun 2025 menjadi 10,67% pada tahun 2030. Kenaikan yang menembus ambang batas psikologis 10% ini menjadi sinyal peringatan dini yang kuat bagi pemerintah daerah untuk segera berbenah, terutama dalam memperkuat infrastruktur layanan kesehatan geriatri yang spesifik serta menyiapkan sistem jaminan sosial dan perlindungan lansia yang lebih komprehensif.

Akumulasi dari berbagai perubahan struktur umur tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio). Meskipun beban tanggungan dari kelompok anak-anak secara statistik berkurang, pesatnya laju pertumbuhan jumlah lansia menyebabkan beban ekonomi total yang harus dipikul oleh penduduk produktif justru mengalami peningkatan. Angka ketergantungan ini diproyeksikan naik dari posisi 42,62 pada tahun 2025 menjadi 44,51 pada tahun 2030. Secara riil dan sederhana, angka rasio 44,51 pada tahun 2030 mengandung makna bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Pasuruan harus menanggung beban ekonomi hidup untuk sekitar 45 orang penduduk non-produktif (yang merupakan gabungan antara anak-anak dan lansia). Tren peningkatan rasio ketergantungan ini menuntut adanya upaya strategis yang mendesak untuk memaksimalkan produktivitas dan kualitas angkatan kerja yang ada saat ini, sebelum beban demografi menjadi semakin berat dan kompleks di masa depan.

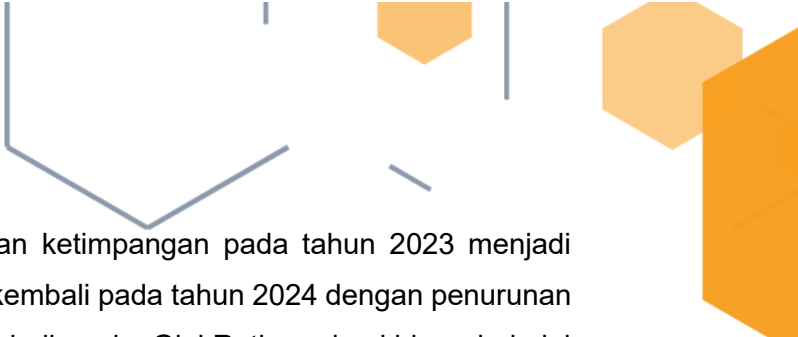


Gambar 2. 14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024
 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.7.2. Indeks/Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator makro ekonomi utama yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan pengeluaran atau kesenjangan pendapatan antar penduduk di suatu wilayah. Nilai Indeks Gini bergerak dalam rentang 0 hingga 1. Apabila koefisien bernilai 0, hal itu menandakan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 menandakan ketimpangan sempurna. Secara umum, semakin rendah nilai Indeks Gini, semakin merata distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Berdasarkan standar internasional, angka Indeks Gini yang berkisar antara 0,3 hingga 0,5 dikategorikan sebagai tingkat ketimpangan moderat (sedang).

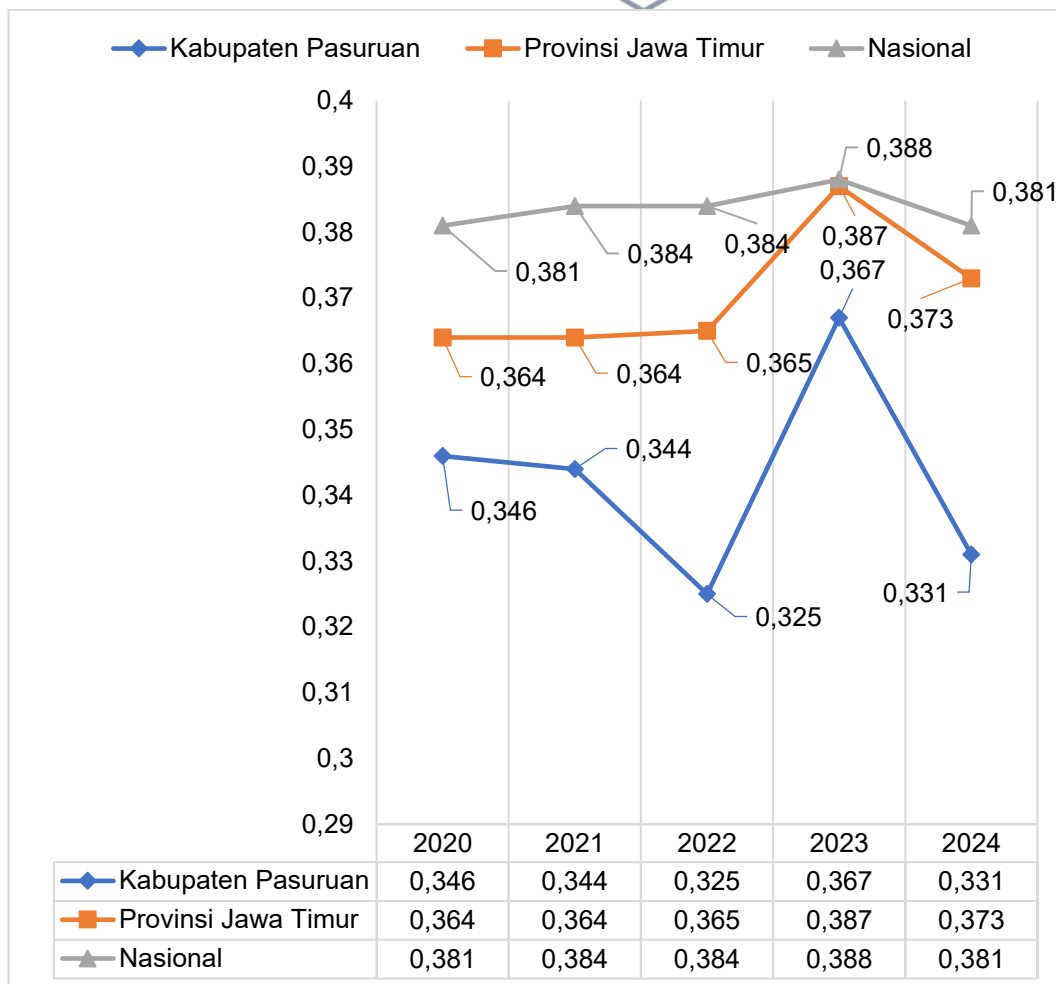
Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, dinamika ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan pola yang fluktuatif namun tetap terkendali dalam kategori moderat. Pada paruh pertama periode pengamatan, terjadi perbaikan pemerataan yang signifikan di mana Indeks Gini menyentuh titik terendah (paling merata) pada tahun 2022 dengan angka 0,325.



Meskipun sempat mengalami lonjakan ketimpangan pada tahun 2023 menjadi 0,367, kondisi ini berhasil dipulihkan kembali pada tahun 2024 dengan penurunan angka menjadi 0,331. Penurunan kembali angka Gini Ratio pada akhir periode ini mengindikasikan perbaikan distribusi pendapatan yang positif, di mana kue pembangunan dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat.

Dalam konteks komparasi kewilayahan, capaian pemerataan ekonomi Kabupaten Pasuruan menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan rata-rata regional maupun nasional. Data menunjukkan konsistensi di mana angka Indeks Gini Kabupaten Pasuruan selalu lebih rendah (lebih merata) dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional di setiap tahun pengamatan. Sebagai ilustrasi nyata pada tahun 2024, saat ketimpangan Nasional berada di angka 0,381 dan Jawa Timur di angka 0,373, Kabupaten Pasuruan mampu menekan ketimpangan jauh lebih rendah di angka 0,331. Hal ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan memiliki kualitas yang baik karena bersifat inklusif (merata) dan kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain.

Data lengkap mengenai perbandingan Indeks Gini tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 2. 15 Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.7.3. Angka Kemiskinan

Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), pengentasan kemiskinan (*No Poverty*) menempati Tujuan Pertama sebagai agenda prioritas global. Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan, yang diukur melalui pendekatan pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan sendiri merupakan nilai rupiah minimum yang diperlukan seseorang untuk hidup layak, yang terdiri dari komponen makanan (setara 2.100 kilokalori) dan komponen non-makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan capaian yang positif dan



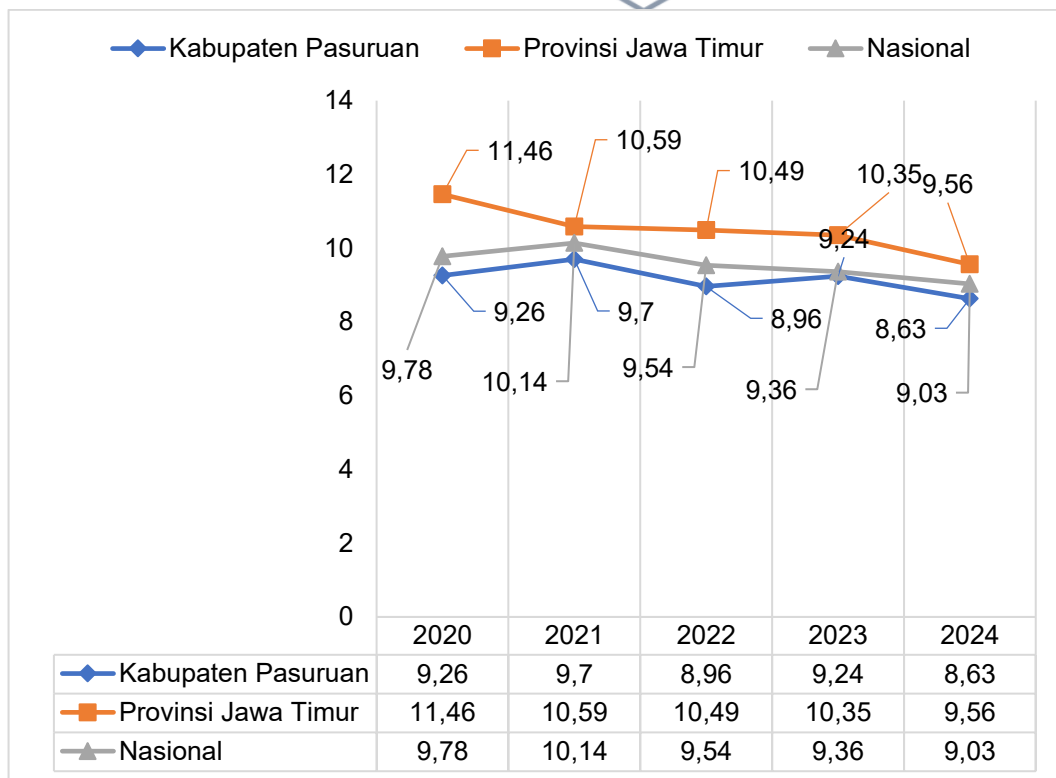
kompetitif. Secara umum, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan selalu berada di bawah (lebih baik) dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Pasuruan tercatat sebesar 8,63%, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Jawa Timur (9,56%) dan Nasional (9,03%). Hal ini mengindikasikan bahwa program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di daerah berjalan cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat rentan.

Selain melihat persentase (Head Count Index), kualitas kemiskinan juga diukur melalui Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

- Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,22 (2023) menjadi 1,09 (2024). Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati Garis Kemiskinan, yang berarti beban pengeluaran mereka untuk keluar dari kemiskinan semakin ringan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami perbaikan, turun dari 0,26 (2023) menjadi 0,21 (2024). Penurunan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin mengecil (distribusi pengeluaran di kalangan warga miskin semakin merata).

Namun, tantangan terlihat pada kenaikan Garis Kemiskinan (GK) yang terus meningkat setiap tahunnya. GK naik dari Rp429.624 (2023) menjadi Rp450.088 per kapita/bulan (2024). Kenaikan standar biaya hidup ini menuntut adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang lebih progresif agar penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan (*near poor*) tidak jatuh kembali ke jurang kemiskinan akibat inflasi atau kenaikan harga kebutuhan pokok.

Berikut adalah data rincian indikator kemiskinan di Kabupaten Pasuruan serta tabel perbandingannya dengan tingkat Provinsi dan Nasional:



Gambar 2. 16 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 2. 18 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	151,43	159,78	148,62	154,09	144,84
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,26	9,7	8,96	9,24	8,63
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	355.299	368.686	394.016	429.624	450.088
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,15	1,17	1,29	1,22	1,09
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,23	0,24	0,29	0,26	0,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data pada kedua tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pasuruan berhasil memulihkan kondisi kesejahteraan masyarakat pasca-pandemi dengan capaian tahun 2024 yang sangat baik. Keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga 8,63% (terendah dalam 5 tahun terakhir) yang dibarengi dengan penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah bersifat inklusif. Meskipun demikian, kenaikan standar Garis Kemiskinan harus terus diwaspadai sebagai sinyal perlunya pengendalian inflasi daerah yang efektif.

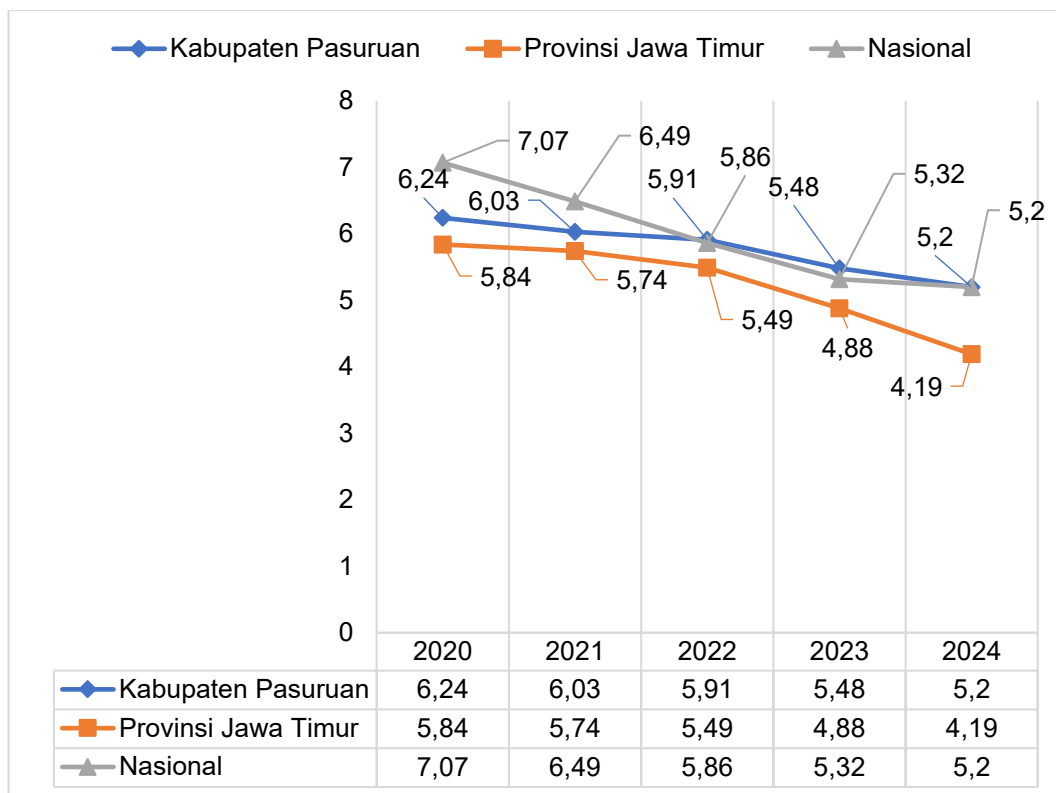
2.7.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan proporsi jumlah pengangguran terhadap jumlah total angkatan kerja. Tingginya angka TPT biasanya dipicu oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan (permintaan tenaga kerja) dengan jumlah pencari kerja (penawaran tenaga kerja). Oleh karena itu, penurunan TPT menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bersandingan dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat sebagai strategi komprehensif penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren pemulihan yang konsisten. TPT Kabupaten Pasuruan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, bergerak dari angka 6,24% pada tahun 2020 menjadi 5,20% pada tahun 2024. Penurunan bertahap ini mengindikasikan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja di sektor riil dan efektivitas pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Namun, jika dilihat dari perspektif komparasi regional, Kabupaten Pasuruan masih menghadapi tantangan struktural. Data menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pasuruan selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur di sepanjang periode pengamatan. Pada tahun 2024, saat Jawa Timur berhasil menekan pengangguran hingga angka 4,19%, Kabupaten Pasuruan masih berada di angka 5,20% (setara dengan angka Nasional). Kesenjangan ini menjadi sinyal bagi Pemerintah Daerah untuk lebih agresif dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan (skilling, reskilling, upskilling) agar kompetensi tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan industri, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang padat karya.

Rincian perkembangan data TPT dan perbandingannya dapat dilihat pada gambar bagan berikut:



Gambar 2. 17 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa pasar kerja di Kabupaten Pasuruan terus membaik yang ditandai dengan penurunan angka pengangguran secara berturut-turut selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, fakta bahwa angka TPT daerah masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur menuntut fokus kebijakan yang lebih tajam pada sisi *supply* (peningkatan *skill* SDM) dan sisi *demand* (investasi padat karya) untuk mengakselerasi penyerapan tenaga kerja di masa mendatang.

2.7.5. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur estimasi pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah dalam periode tertentu. Nilai ini diperoleh dari total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk. Secara teoritis, semakin tinggi angka PDRB per kapita, semakin tinggi pula tingkat kemakmuran atau standar hidup rata-rata penduduk di wilayah tersebut.

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, kinerja PDRB per kapita Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren yang positif dan kompetitif. Secara nominal, nilai PDRB per kapita terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, dalam komparasi kewilayahan, capaian Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir selalu lebih tinggi dibandingkan rata-rata PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Hal ini mengukuhkan posisi Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu penyangga ekonomi utama di Jawa Timur.

Namun, tingginya angka PDRB per kapita ini perlu dimaknai dengan cermat. Struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan didominasi oleh sektor industri pengolahan (kontribusi mencapai 60%) yang bertipologi padat modal. Kondisi ini menyebabkan perputaran nilai tambah ekonomi cenderung terkonsentrasi pada korporasi besar dan tidak serta-merta mencerminkan pendapatan riil yang diterima oleh setiap rumah tangga. Dengan kata lain, tingginya rata-rata tersebut "ditarik ke atas" oleh output industri besar, sementara masih terdapat kemungkinan kesenjangan pendapatan antar wilayah atau kelompok masyarakat. Oleh karena itu, angka ini lebih tepat dipandang sebagai indikator potensi ekonomi daerah ketimbang indikator tunggal kesejahteraan individu.

Dalam konstelasi regional Jawa Timur tahun 2024, Kabupaten Pasuruan menempati peringkat ke-5 tertinggi. Posisi ini berada di bawah Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, namun tetap berada jauh di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pemerataan, skala ekonomi Kabupaten Pasuruan sangatlah masif.

Kabupaten Pasuruan masuk dalam jajaran "Top 5" ekonomi raksasa di Jawa Timur. Meskipun angka PDRB per kapita terlihat impresif, tantangan utama bagi pemerintah daerah adalah memastikan terjadinya pemerataan pembangunan. Fokus kebijakan tidak boleh hanya terpaku pada pertumbuhan angka rata-rata, melainkan harus diarahkan pada mekanisme redistribusi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat menikmati kue pertumbuhan ekonomi tersebut, guna meminimalisir ketimpangan antara wilayah industri dan non-industri.

2.7.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator strategis untuk mengukur keberhasilan upaya pembangunan kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat (diukur dari Angka

Harapan Hidup), pengetahuan (diukur dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), serta standar hidup layak (diukur dari Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan).

Dalam melihat tren jangka panjang, data IPM Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi dua periode berdasarkan metodologi perhitungan, yaitu metode lama (SP2010) untuk tahun 2017-2021 dan metode baru (Long Form SP2020) untuk tahun 2022-2024. Berikut adalah perkembangan IPM periode pertama:

Tabel 2. 19 Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2021 (Metode SP2010)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
IPM	66,69	67,41	68,29	68,60	70,54
Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,90	70,17	70,17	70,23	70,25
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,05	12,30	12,31	12,41	12,58
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,82	6,38	7,11	7,40	7,41
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	-	-	10.381	10.164	10.297

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama periode 2017-2021, status pembangunan manusia di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan status dari kategori "Sedang" menjadi "Tinggi" ($IPM \geq 70$) tepat pada tahun 2021 dengan nilai 70,54. Meskipun terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan penurunan pada sisi ekonomi (Pengeluaran Per Kapita turun dari Rp10,38 juta menjadi Rp10,16 juta), nilai total IPM tetap tumbuh positif. Hal ini disebabkan oleh indikator kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) yang tetap menunjukkan tren kenaikan, membuktikan resiliensi sektor sosial dasar di tengah guncangan ekonomi.

Selanjutnya, mulai tahun 2022 perhitungan IPM menggunakan metode baru berbasis *Long Form* SP2020 yang memberikan potret kependudukan lebih akurat, khususnya pada indikator kematian dan umur harapan hidup.

Tabel 2. 20 Perkembangan IPM dan Komponen IPM di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024 (Metode Long Form SP2020)

Uraian	2022	2023	2024
IPM	71,29	71,91	72,36
Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,15	74,41	74,61
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,76	12,77	12,78
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,42	7,44	7,46
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	10.726	11.239	11.617

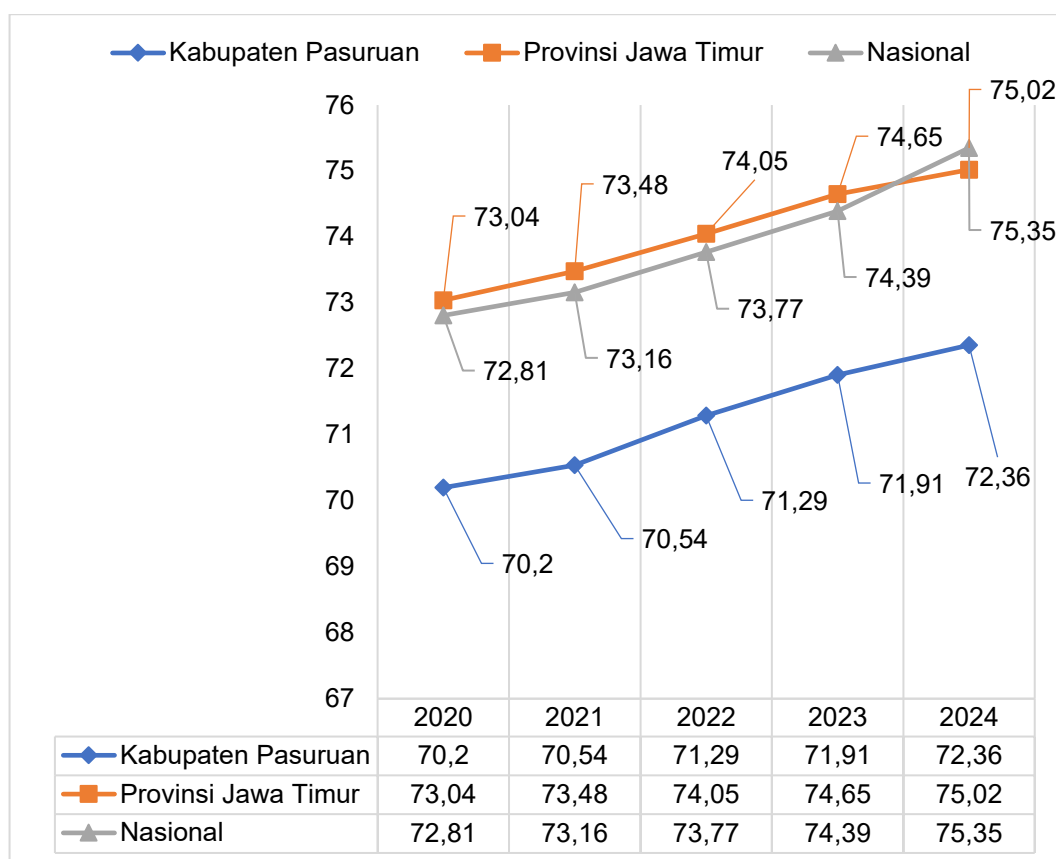
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Data yang dihasilkan melalui penerapan metode terbaru menunjukkan adanya lonjakan kualitas hidup masyarakat yang bersifat signifikan dan terukur. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasuruan tercatat mencapai 72,36, yang menempatkan daerah ini pada kategori pembangunan manusia yang relatif baik dan mencerminkan keberhasilan akumulatif dari kebijakan di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Angka tersebut tidak sekadar menunjukkan peningkatan numerik, tetapi juga merepresentasikan perbaikan struktural dalam kualitas hidup penduduk secara menyeluruh.

Perubahan metodologi penghitungan memberikan dampak yang sangat nyata, terutama pada komponen Angka Harapan Hidup (AHH). Dengan metode terbaru, AHH Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 tercatat mencapai 74,61 tahun, jauh melampaui hasil perhitungan dengan metode sebelumnya yang hanya berada di kisaran 70 tahun. Selisih ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan medis, serta efektivitas intervensi kesehatan publik selama beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang substansial. Koreksi metodologis ini sekaligus memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi riil kesehatan penduduk.

Di sisi ekonomi, indikator Pengeluaran Per Kapita menunjukkan tren pemulihan yang konsisten dan berkelanjutan pasca-pandemi. Pada tahun 2024, nilai pengeluaran per kapita mencapai Rp11,617 juta per tahun, menandakan

meningkatnya daya beli masyarakat serta mulai pulihnya aktivitas ekonomi rumah tangga. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan pendapatan, stabilitas konsumsi, dan kepercayaan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, data dalam tabel tersebut mengonfirmasi bahwa kualitas kesehatan, akses pendidikan, dan kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Pasuruan berada dalam lintasan pertumbuhan yang solid dan saling memperkuat. Meskipun demikian, capaian positif ini tetap perlu ditempatkan dalam kerangka komparatif yang lebih luas, sehingga posisi Kabupaten Pasuruan dapat dievaluasi secara objektif melalui perbandingan dengan capaian regional pada wilayah sekitarnya.



Gambar 2. 18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.7.7. Inflasi

Inflasi merupakan perubahan indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen diperoleh melalui survey dilaksanakan oleh BPS setiap bulan terhadap sejumlah harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat. Laju Inflasi perlu dilakukan pengendalian karena berdampak pada tingkat daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Survey BPS di Jawa Timur hanya dilakukan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota, yaitu:

(1) Kabupaten Jember ; (2) Kabupaten Banyuwangi; (3) Kabupaten Sumenep ; (4) Kota Kediri ; (5) Kota Malang ; (6) Kota Probolinggo ; (7) Kota Madiun ; dan Kota (8) Kota Surabaya. Berdasarkan hal tersebut maka dalam menggambarkan inflasi di Kabupaten Pasuruan mengacu pada daerah yang memiliki kemiripan pola konsumsi masyarakat, yaitu Kota Probolinggo.

Perkembangan inflasi dalam periode tahun 2019-2023 Kabupaten Pasuruan/Kota Probolinggo beserta perbandingannya dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana gambar dibawah ini. Secara umum inflasi dapat dikendalikan, namun terjadi lompatan yang tinggi secara menyeluruh terjadi di tahun 2022. Namun pada tahun 2023 kondisi inflasi Kembali dapat dikendalikan.



Gambar 2. 19 Inflasi Kabupaten Pasuruan/Kota Probolinggo, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.8. Aspek Pendidikan

2.8.1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah atau *mean years school* adalah rata-rata lama belajar siswa sampai lulus sekolah pada suatu jenjang pendidikan dan dinyatakan dalam tahun. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun polanya tindakannya. Adapun capaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam gambar berikut:

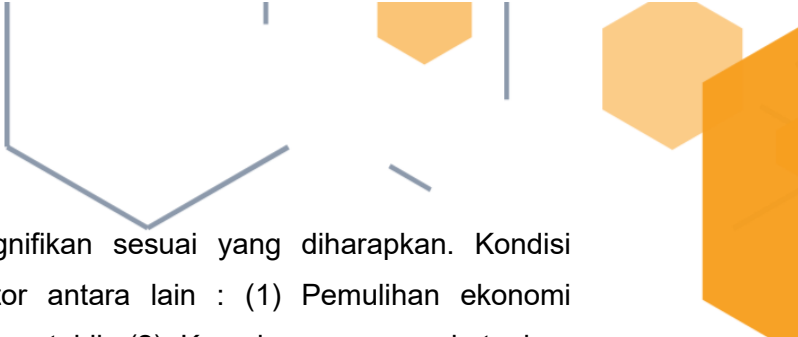


Gambar 2. 20 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pasuruan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Grafik Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pasuruan tahun 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan perbaikan akses dan partisipasi pendidikan penduduk. Pada tahun 2021, RLS tercatat sebesar 7,41 tahun, kemudian meningkat pada 2022 menjadi 7,42 tahun, dan kembali naik pada 2023 menjadi 7,44 tahun. Peningkatan berlanjut pada 2024 dengan capaian 7,46 tahun, hingga mencapai 7,47. Secara keseluruhan, selama empat tahun terjadi kenaikan sebesar 0,06 tahun, yang menunjukkan kemajuan bertahap namun stabil dalam capaian pendidikan. Kondisi tahun 2024 mengartikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Pasuruan telah menempuh pendidikan setara dengan kelas VII–VIII SMP, meskipun peningkatan yang relatif lambat mengindikasikan masih adanya tantangan struktural, seperti putus sekolah dan keterbatasan akses pendidikan bagi kelompok miskin dan rentan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selama periode empat tahun terakhir angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasuruan menunjukkan peningkatan meskipun tidak signifikan. Rata-rata penduduk Kabupaten Pasuruan usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah menempuh pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I). Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 telah melalui target tapi masih belum

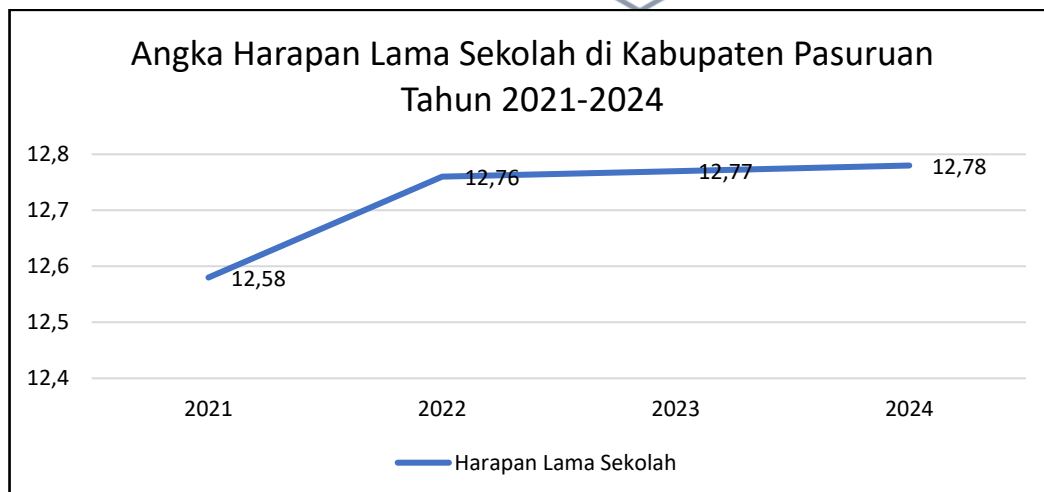


menunjukkan peningkatan yang signifikan sesuai yang diharapkan. Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain : (1) Pemulihan ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil; (2) Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang masih rendah terutama pada penduduk usai 18 tahun keatas yang tidak bersedia memulai atau melanjutkan pendidikan lewat jalur kesetaraan, (3) Data kependudukan yang belum update turut memberikan bagian dari rendahnya data pendidikan penduduk Kabupaten Pasuruan, (4) Gerakan Kembali Belajar yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan sebagai bagian dari usaha meningkatkan Rata Lama Sekolah dalam tahapan-tahapan proses yang masih dilakukan.

Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efesiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka (Lincoln, 1999). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga perusahaan akan bersedia memberikan upah/gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya.

2.8.2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan diperoleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Adapun capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan tahun 2021-2024 sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2. 21 Harapan Sekolah di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

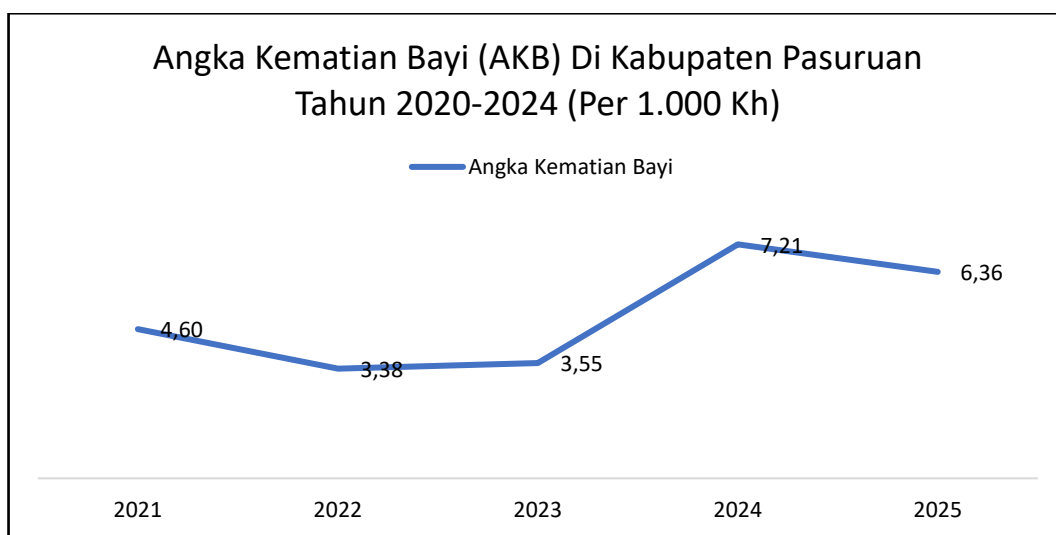
Grafik Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pasuruan tahun 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan yang stabil, yang mencerminkan semakin besarnya peluang anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan yang lebih panjang. Pada tahun 2021, HLS tercatat sebesar 12,58 tahun, kemudian meningkat cukup signifikan pada 2022 menjadi 12,76 tahun atau naik 0,18 tahun. Peningkatan berlanjut secara bertahap pada 2023 menjadi 12,77 tahun dan 2024 sebesar 12,78 tahun. Secara keseluruhan, selama 2021–2024 terjadi kenaikan sebesar 0,33 tahun, yang menunjukkan adanya perbaikan akses dan keberlanjutan pendidikan. Kondisi tahun 2024 mengartikan bahwa anak-anak di Kabupaten Pasuruan memiliki peluang untuk menyelesaikan pendidikan hingga hampir setara kelas XII SMA, namun masih diperlukan penguatan kebijakan pendidikan, khususnya untuk mencegah putus sekolah pada jenjang menengah dan memastikan kelompok miskin dan rentan dapat merealisasikan potensi pendidikan tersebut. Capaian yang tidak terlalu signifikan tersebut diakibatkan masih adanya hambatan sarana prasarana pendukung proses pembelajaran yang belum merata dan maksimal serta Angka Putus Sekolah yang masih relatif tinggi. Selain itu pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan juga menjadi kendala tersendiri.

2.9. Aspek Kesehatan

2.9.1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun program kesehatan ibu dan anak sebab angka kematian bayi ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Target Angka kematian ibu (AKI) berdasarkan SDGs (Sustainable Development Goals) harus di bawah 70 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030.

Indikator Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup digunakan untuk mengukur jumlah bayi (usia kurang dari satu tahun) yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama, sehingga indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah bayi (usia kurang dari satu tahun) yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dibagi jumlah kelahiran hidup dikalikan seribu. Perkembangan angka kematian bayi selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Adapun capaian angka kematian bayi di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 22 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2024

Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pasuruan pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,36 per 1.000 kelahiran hidup, yang secara absolut setara

dengan sekitar 146 kasus kematian bayi. Nilai 6,36 merupakan angka rasio, yang digunakan untuk menggambarkan tingkat risiko kematian bayi dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup, sedangkan 146 menunjukkan jumlah kejadian riil di lapangan. Dibandingkan tahun sebelumnya, AKB tahun 2025 mengalami penurunan dari 7,21 pada 2024, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, khususnya pada aspek persalinan, perawatan neonatal, dan intervensi gizi. Dengan demikian, capaian AKB 6,36 (146 kasus) pada tahun 2025 mengartikan bahwa meskipun masih terdapat kematian bayi yang perlu menjadi perhatian serius, risiko kematian bayi secara umum mulai menurun, sehingga upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan perlindungan kelompok rentan perlu terus diperkuat agar penurunan AKB dapat berkelanjutan.

Kematian bayi terbanyak karena Infeksi disebabkan Ibu Bersalin banyak yang mengalami KPD (Ketuban Pecah Dini). Asfiksia disebabkan bayi tidak mendapatkan penanganan Asfiksia oleh Bidan dengan baik sesuai dengan kompetensi, dan BBLR disebabkan karena Ibu Hamil KEK dan PEB. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kompetensi pada Bidan dan juga komunikasi secara intens dengan dokter spesialis anak yang keberadaannya pada RSUD Bangil dan RSUD Grati. Tujuan adanya jejaring antara Puskesmas, Polindes dan Bidan Praktek dengan RSUD Bangil dan RSUD Grati agar bayi Infeksi, Asfiksia bisa tertangani dengan baik sebelum dirujuk ke RSUD Bangil atau RSUD Grati. Kasus BBLR bisa terpantau dan ditingkatkan berat badan bayi apabila pemeriksaan kehamilan dilakukan secara rutin dan berkualitas, serta ibu hamil selalu mendapatkan penyuluhan.

Bila dilihat dari cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebanyak 100%, maka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitas pertolongan persalinan tersebut serta penanganan gawat darurat bayi oleh Bidan dan sistem rujukan yang baik dengan Puskesmas, Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan RSUD. Namun demikian ternyata bayi yang mengalami kematian tersebut telah mengalami proses rujukan ke Rumah Sakit. Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kematian bayi di Kabupaten Pasuruan diantaranya adalah pelaksanaan Penelusuran Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (P-PWS KIA), Audit Maternal Perinatal, Supervisi Fasilitatif, Peningkatan pemeriksaan ibu hamil melalui revitalisasi posyandu serta penyelenggaraan pelatihan untuk tenaga

medis meliputi Pelatihan Asuhan Persalinan Normal, Pelatihan Kelas Ibu Hamil, Pelatihan Kelas Ibu Balita, Sarasehan dalam rangka upaya penurunan Angka Kematian Bayi.

Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan posyandu. Pengembangan posyandu sangat penting dalam rangka pembangunan Kesehatan masyarakat, melalui partisipasi masyarakat dalam posyandu terdapat pos penimbangan, pelayanan gizi dan makanan tambahan. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Capaian Posyandu aktif di Kabupaten Pasuruan mencapai 87,8% mengalami peningkatan sebesar 12,9%. Capaian tersebut menggambarkan adanya optimalisasi status Posyandu sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan kualitas Posyandu menjadi penentu utama kemampuan posyandu partisipatif, hal ini dinilai berdasarkan kepesertaan ibu balita dalam kegiatan Posyandu, karena tokoh utama posyandu adalah ibu balita.

Tabel 2. 21 Posyandu Aktif di Kabupaten Pasuruan

No	Puskesmas	Jumlah	Strata				Posyandu Aktif Puri	% Aktif
			Pratama	Madya	Purnama	Mandiri		
1	Purwodadi	69	0	6	63	0	63	91,30%
2	Nongkojajar	43	0	18	25	0	25	58,14%
3	Sumberpitu	22	0	1	21	0	21	95,45%
4	Puspo	36	0	3	33	0	33	91,67%
5	Tosari	26	0	2	24	0	24	92,31%
6	Lumbang	36	0	17	19	0	19	52,78%
7	Pasrepan	72	0	5	47	20	67	93,06%
8	Kejayan	72	0	0	71	1	72	100,00%
9	Ambal-Ambil	48	0	16	32	0	32	66,67%
10	Wonorejo	88	0	3	84	1	85	96,59%
11	Purwosari	65	0	3	62	0	62	95,38%
12	Karangrejo	17	0	0	17	0	17	100,00%
13	Prigen	53	0	0	53	0	53	100,00%
14	Bulukandang	28	0	0	28	0	28	100,00%

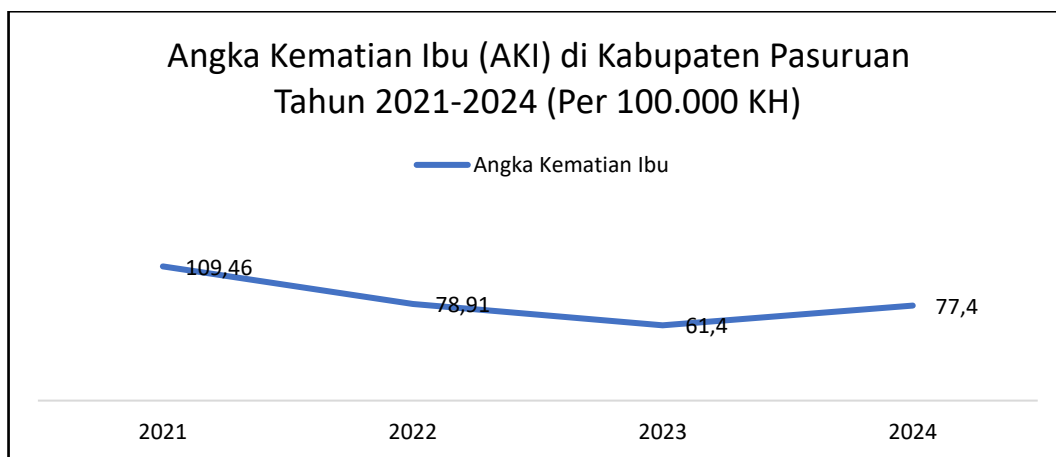
No	Puskesmas	Jumlah	Strata				Posyandu Aktif Puri	% Aktif
			Pratama	Madya	Purnama	Mandiri		
15	Sukorejo	89	0	20	67	2	69	77,53%
16	Pandaan	89	0	14	57	18	75	84,27%
17	Sebani	33	0	0	33	0	33	100,00%
18	Gempol	87	0	2	79	6	85	97,70%
19	Kepulungan	44	0	12	31	1	32	72,73%
20	Beji	101	0	2	95	4	99	98,02%
21	Bangil	44	0	2	42	0	42	95,45%
22	Raci	39	0	2	32	5	37	94,87%
23	Rembang	76	0	4	70	2	72	94,74%
24	Kraton	65	0	14	51	0	51	78,46%
25	Ngempit	58	0	8	50	0	50	86,21%
26	Pohjentrek	41	0	2	37	2	39	95,12%
27	Gondang Wetan	96	0	11	85	0	85	88,54%
28	Rejoso	66	0	5	56	5	61	92,42%
29	Winongan	86	0	20	50	16	66	76,74%
30	Grati	50	0	5	45	0	45	90,00%
31	Kedawung Wetan	28	0	0	24	4	28	100,00%
32	Lekok	92	0	22	61	9	70	76,09%
33	Nguling	62	0	16	46	0	46	74,19%
	Jumlah	1921	0	235	1590	96	1686	87,77%
			0,00%	12,23%	82,77%	5,00%		

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

2.9.2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu melahirkan digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu pada proses persalinan. Indikator ini diperoleh dengan perhitungan jumlah kematian ibu dalam satu tahun dibanding dengan jumlah kelahiran hidup dikalikan 100.000. Angka pengukuran resiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu

melahirkan dan masa nifas. Target Angka kematian ibu (AKI) berdasarkan SDGs (Sustainable Development Goals) harus di bawah 70 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030. Adapun data capaian AKI di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

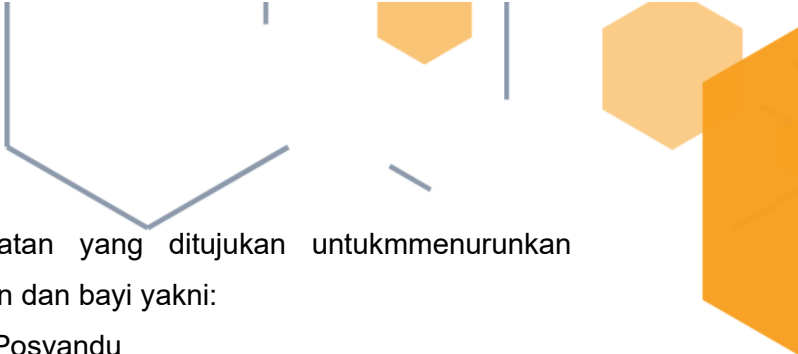


Gambar 2. 23 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2024

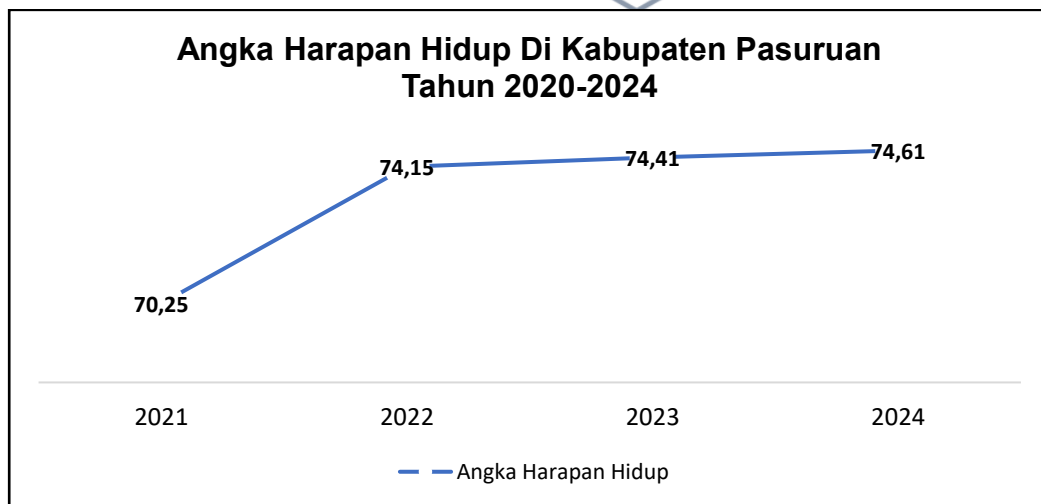
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 tercatat sebesar 77,4 per 100.000 kelahiran hidup, yang secara absolut setara dengan sekitar 13 kasus kematian ibu. Angka 77,4 merupakan indikator rasio, yang menggambarkan tingkat risiko kematian ibu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup, sedangkan 13 kasus menunjukkan jumlah kejadian nyata di lapangan. Dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 61,4, AKI tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga diperlukan penguatan intervensi kesehatan maternal secara berkelanjutan, khususnya pada kelompok ibu hamil berisiko tinggi dan wilayah dengan akses layanan kesehatan yang terbatas. Adapun upaya yang telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan yakni:

1. Meningkatkan kualitas pemeriksaan kehamilan (ANC/ Ante Natal Care) pada ibu hamil secara kontinyu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (Bidan);
2. Meningkatkan koordinasi melalui peningkatan sistem jejaring tenaga medis, sehingga pertolongan pada ibu hamil yang resiko tinggi dapat dilakukan sejak awal;
3. Membuat SIP (sistem informasi posyandu);
4. Meningkatkan pola rujukan kasus dan rujukan berjenjang sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan dan keterlambatan mengirim pasien;

- 
5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi yakni:
 - a) Gerakan Ibu Hamil sadar Posyandu
 - b) Pembinaan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) oleh Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
 - c) Pertemuan kader KIBBLA
 - d) Audit Maternal Perinatal
 - e) Pengembangan P4K di desa maslahat
 - f) Penelusuran Pemantauan Wilayah Setempat KIA (P-PWS KIA) ibu dan anak
 - g) Supervisi fasilitatif
 - h) Pelatihan APN
 - i) Pelatihan Kelas ibu hamil
 - j) Kemitraan Bidan dan dukun bayi – kader (melalui PERDA nomor 2 tahun 2009 tentang KIBBLA)
 - k) Peningkatan pemeriksaan ibu hamil melalui revitalisasi posyandu
 - l) Drill emergency kegawatdaruratan Maternal disetiap Puskesmas
 - m) Meningkatkan kerjasama sistem rujukan Kesehatan
 - n) Menambah fasilitas RS Rujukan (RSUD Grati) di Wilayah Timur.

2.9.3. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. AHH diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Data AHH Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan. Berdasarkan perhitungan Hasil Long Form SP2020, Angka Harapan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2024 cenderung meningkat sebagaimana gambar berikut:



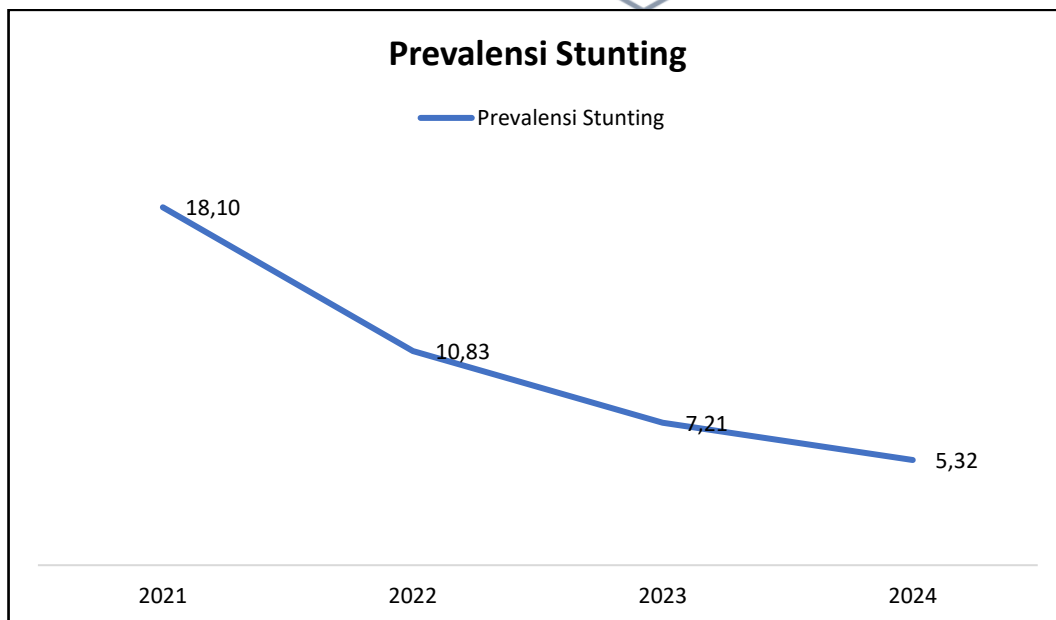
Gambar 2. 24 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan cenderung mengalami peningkatan selama periode lima tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024, rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,16% per tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup dapat diartikan jumlah penduduk lanjut usia cenderung meningkat sebagai dampak peningkatan kualitas hidup dengan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kabupaten Pasuruan.

2.9.4. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki resiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya.



Gambar 2. 25 Prevalensi Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2024

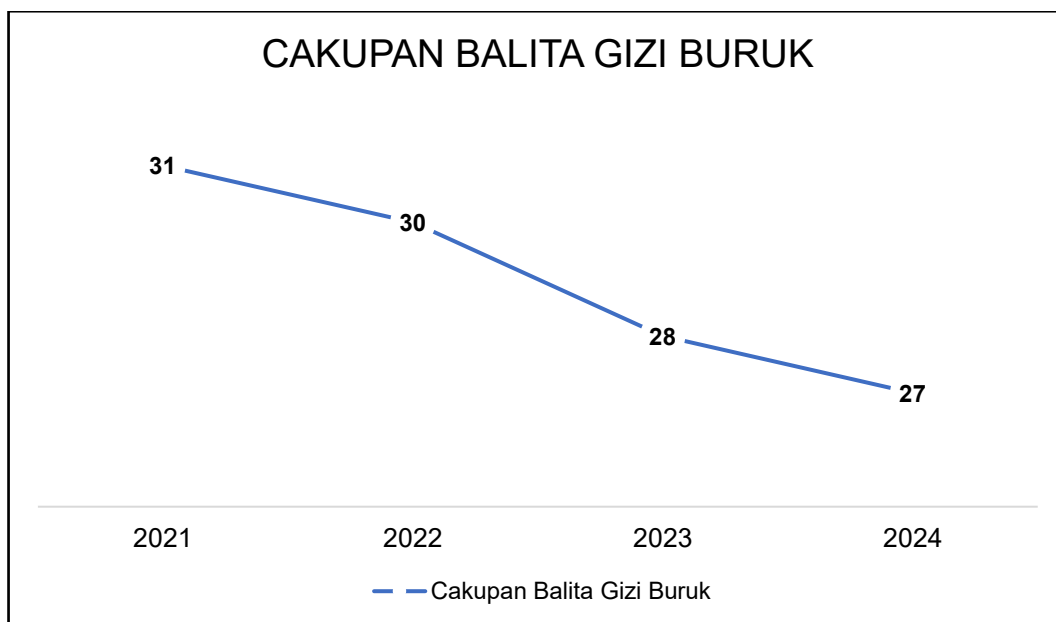
Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Grafik prevalensi stunting Kabupaten Pasuruan tahun 2021–2024 menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dan konsisten. Pada tahun 2021, prevalensi stunting masih berada pada level 18,10 persen, kemudian turun tajam pada 2022 menjadi 10,83 persen, atau berkurang 7,27 poin persentase. Penurunan berlanjut pada 2023 dengan capaian 7,21 persen, kemudian kembali menurun pada 2024 menjadi 5,32 persen, yang merupakan capaian terendah sepanjang periode pengamatan. Secara keseluruhan, dalam empat tahun terjadi penurunan sebesar 14,20 poin persentase, yang mencerminkan efektivitas intervensi terintegrasi di bidang gizi, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, serta perlindungan sosial. Kondisi tahun 2024 mengartikan bahwa Kabupaten Pasuruan telah berada pada kategori prevalensi stunting sangat rendah, namun upaya pencegahan tetap perlu dipertahankan dan difokuskan pada kelompok rentan agar tidak terjadi peningkatan kembali (rebound) di masa mendatang.

2.9.5. Cakupan Balita Gizi Buruk

Cakupan balita dengan gizi buruk merupakan gambaran kasus gizi buruk pada balita di waktu tertentu, dihitung berdasarkan tanda-tanda fisik dan klinis yang mengarah pada diagnosa gizi buruk. Indikator ini diperoleh dengan mengukur persentase jumlah balita dengan gizi buruk terhadap jumlah balita yang ada di Kabupaten Pasuruan. Cakupan persentase balita dengan gizi buruk di Kabupaten

Pasuruan mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuasi dan menurun di tahun 2024. Akan tetapi jumlah balita yang menderita gizi buruk, terus mengalami penurunan selama 5 (lima) periode terakhir dan disertai juga dengan penurunan jumlah balita pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.



Gambar 2. 26 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Grafik cakupan balita gizi buruk di Kabupaten Pasuruan tahun 2021–2024 menunjukkan tren penurunan yang relatif konsisten, meskipun mulai mengalami perlambatan pada akhir periode. Pada tahun 2021, jumlah balita gizi buruk tercatat sebanyak 31 kasus, kemudian menurun menjadi 30 kasus pada 2022, dan kembali turun cukup nyata pada 2023 menjadi 28 kasus. Penurunan berlanjut pada 2024 dengan capaian 27 kasus. Secara keseluruhan, selama periode 2021–2024 terjadi penurunan 4 kasus, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya penanganan gizi balita melalui intervensi kesehatan, perbaikan asupan gizi, dan pemantauan tumbuh kembang. Kondisi tahun 2024 mengartikan bahwa permasalahan gizi buruk telah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun masih terdapat kasus residual yang memerlukan penanganan lebih terfokus dan bersifat individual, khususnya pada balita dari keluarga miskin dan rentan agar target penghapusan gizi buruk dapat tercapai secara berkelanjutan.

Cakupan persentase balita dengan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan mulai tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan. Akan tetapi

secara jumlah balita yang menderita gizi buruk, terus mengalami penurunan setiap tahunnya selama 4 (empat) periode terakhir. Balita gizi buruk merupakan kondisi serius, dimana asupan makan seseorang tidak sesuai dengan nutrisi yang semestinya diperlukan. Penyebab utama gizi buruk adalah kekurangan asupan makanan yang bernutrisi sesuai kebutuhan masing-masing kelompok usia anak. Kekurangan asupan ini bisa terjadi karena tidak tersedianya bahan makanan yang berkualitas baik. Selain itu salah satu faktor penyebab gizi buruk adalah kemiskinan. Sehingga diperlukan upaya mengurangi beban pengeluaran dari beberapa pihak untuk menekan balita gizi buruk di Kabupaten Pasuruan.

2.10. Infrastruktur

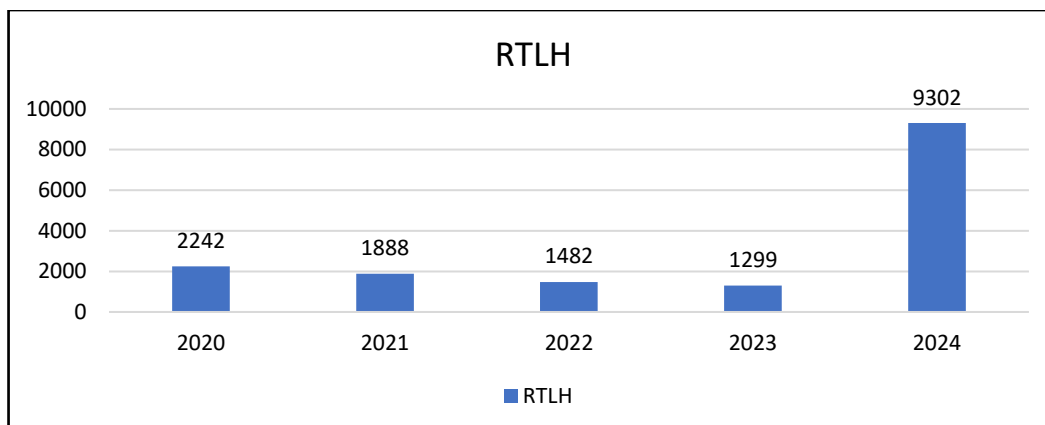
Indikator kinerja yang digunakan dalam bidang infrastruktur dasar adalah akses sanitasi layak, akses air minum layak, dan akses listrik. Kabupaten Pasuruan terus melakukan upaya untuk memastikan agar masyarakat dapat mengakses fasilitas air bersih dan menikmati tempat tinggal yang layak. Meskipun belum semua kawasan permukiman kumuh tertata dengan baik, namun demikian berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi degradasi kualitas lingkungan permukiman, dan untuk mendorong perbaikan kondisi kawasan permukiman yang makin baik bagi masyarakat.

Ketersediaan air bersih di rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat penting karena berdampak terhadap tingkat kesehatan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan rumah tangga di daerah tersebut. Oleh sebab itu air yang diperlukan rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan, yaitu mencakup fisik, kimia dan bakteriologis. Penggunaan air yang tidak bersih dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, antara lain: penyakit cholera, typhus, disentri dan penyakit kulit. Sumber air yang masuk dalam kelompok air bersih adalah berasal dari, Air kemasan, ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi korban bencana;

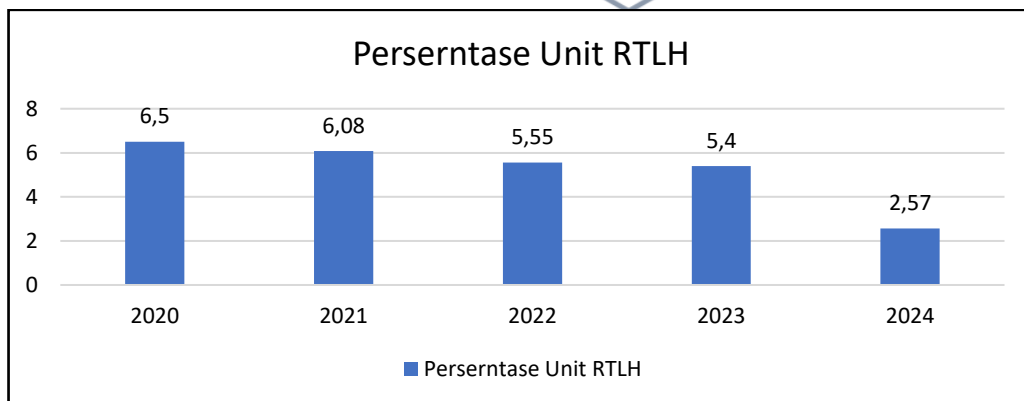
2. Fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.



Gambar 2. 27 RTLH Kabupaten Pasuruan

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024

Berdasarkan diagram Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Pasuruan Tahun 2020–2024, terlihat bahwa jumlah RTLH mengalami penurunan bertahap pada periode 2020–2023, dari 2.242 unit pada 2020 menjadi 1.299 unit pada 2023, yang menunjukkan adanya efektivitas intervensi perbaikan hunian dan peningkatan kualitas permukiman. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan menjadi 9.302 unit, yang mengindikasikan adanya perubahan basis data, pemutakhiran pendataan, atau perluasan kriteria pendataan RTLH, sehingga angka tersebut tidak semata-mata mencerminkan penurunan kinerja penanganan, tetapi lebih pada meningkatnya akurasi identifikasi kebutuhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan RTLH masih menjadi tantangan besar dan memerlukan penguatan kebijakan penanganan hunian layak yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis data mutakhir dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan.



Gambar 2. 28 Persentase Unit RTLH Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan



Gambar 2. 29 Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

Kinerja pelayanan urusan perumahan dan kawasan permukiman selain diukur dengan indikator SPM, juga dengan indikator kinerja kunci (IKK) level outcome. Berdasarkan dua gambar diatas dapat dilihat bahwa capaian SPM pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH realisasi hingga tahun 2023 adalah 5,4% dan secara akumulasi tertangani sebanyak 20.170 unit rumah atau 47,31%. Kemudian pada tahun 2024, persentase berkurangnya jumlah unit RTLH mencapai 2,57% atau sebanyak 574 unit. Kemudian jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU saat ini mencapai 100% atau 145 perumahan (data per Mei 2023), dan terdapat 10 pengembang yang sudah melakukan penyerahan PSU Perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 44 Perumahan masih dalam proses penyerahan.

BAB III

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN PASURUAN

3.1. Panduan Umum Tanggung Jawab Sosial (TJSL) berdasarkan SNI ISO 26000:2013

ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial hadir sebagai upaya untuk menjawab beragam perbedaan pemahaman dan praktik Corporate Social Responsibility (CSR) yang berkembang di berbagai organisasi. Standar ini disusun melalui proses yang inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari 99 negara selama periode 2005 hingga 2010, yang mencakup unsur dunia usaha, pemerintah, tenaga kerja, konsumen, organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, serta organisasi internasional. Proses yang partisipatif ini menjadikan ISO 26000 sebagai panduan global yang merepresentasikan kepentingan dan perspektif berbagai pihak dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial.

Di Indonesia, ISO 26000 telah diadopsi menjadi Standar Nasional Indonesia dengan nama SNI ISO 26000:2013 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial. Standar ini bersifat tidak mengikat dalam bentuk sertifikasi, melainkan sebagai pedoman yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing organisasi. Dengan demikian, organisasi dari berbagai sektor dan skala dapat mengimplementasikan prinsip tanggung jawab sosial sesuai dengan kapasitas, karakteristik, serta kebutuhan yang dimiliki.

Secara substantif, SNI ISO 26000:2013 menyediakan kerangka konseptual yang memuat prinsip, definisi, serta panduan dalam mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam strategi dan kegiatan operasional organisasi. Standar ini menegaskan bahwa tanggung jawab sosial merupakan kewajiban yang melekat pada setiap organisasi, baik perusahaan, instansi pemerintah, maupun organisasi non-profit. Fokus utama dari penerapan tanggung jawab sosial adalah pengelolaan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas organisasi, termasuk yang berkaitan dengan produk, jasa, proses, pengambilan keputusan, serta hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Dalam implementasinya, SNI ISO 26000:2013 mencakup tujuh subjek inti tanggung jawab sosial, yaitu tata kelola organisasi (organizational governance), hak asasi manusia (human rights), praktik ketenagakerjaan (labour practices), lingkungan (the environment), praktik operasi yang adil (fair operating practices), isu konsumen (consumer issues), serta pelibatan dan pengembangan masyarakat

(community involvement and development). Ketujuh aspek tersebut menjadi ruang lingkup utama yang dapat dijadikan acuan dalam merancang dan melaksanakan program CSR secara komprehensif dan berkelanjutan.

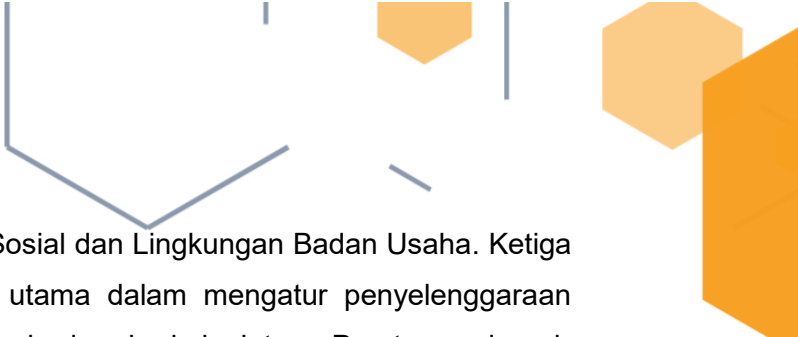
Selain itu, standar ini juga menetapkan tujuh prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, yaitu akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, penghormatan terhadap kepentingan pemangku kepentingan, kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap norma perilaku internasional, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan organisasi dilaksanakan secara bertanggung jawab, berintegritas, dan selaras dengan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan.

Adanya pedoman SNI ISO 26000:2013, organisasi diharapkan mampu mengimplementasikan tanggung jawab sosial secara lebih terarah dan sistematis, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan organisasi itu sendiri. Standar ini sekaligus menjadi acuan penting dalam menyelaraskan praktik CSR agar lebih terukur, konsisten, dan memberikan dampak yang nyata.

3.2. Panduan Umum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (TJSL) di Kabupaten Pasuruan

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Pasuruan merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. TJSL tidak hanya dipahami sebagai kewajiban perusahaan semata, tetapi juga sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pelaksanaan TJSL diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Secara normatif, pelaksanaan TJSL di Kabupaten Pasuruan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang



Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. Ketiga regulasi tersebut menjadi landasan utama dalam mengatur penyelenggaraan TJSL secara terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Peraturan daerah memberikan kerangka kebijakan umum, sedangkan peraturan bupati berfungsi sebagai pedoman teknis dalam implementasi di lapangan.

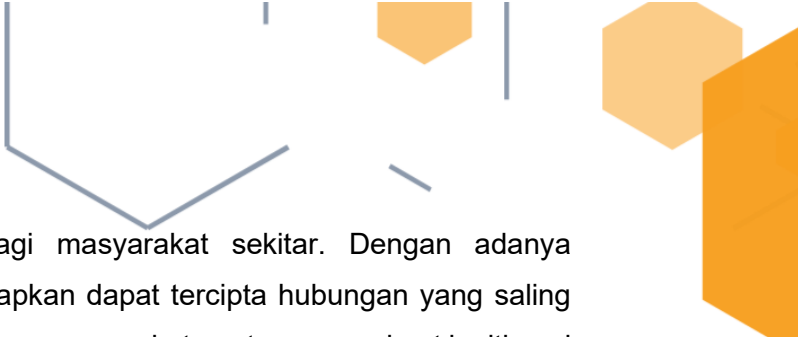
Dalam kerangka tersebut, TJSL dimaknai sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang, dan sesuai dengan nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial di sekitarnya, sehingga setiap aktivitas usaha perlu memperhatikan dampak yang ditimbulkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, TJSL menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

Pelaksanaan TJSL di Kabupaten Pasuruan juga didasarkan pada prinsip sinergi dan kemitraan antar pemangku kepentingan. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan koordinator, perusahaan sebagai pelaksana program, serta masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus mitra dalam pelaksanaan kegiatan. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan program-program TJSL yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, TJSL diarahkan untuk mendukung berbagai prioritas pembangunan daerah, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, program TJSL diharapkan tidak berjalan secara parsial, tetapi terintegrasi dengan program pembangunan pemerintah daerah sehingga mampu memperkuat efektivitas intervensi pembangunan secara keseluruhan.

Dalam implementasinya, TJSL mencakup berbagai bentuk kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial, penguatan ekonomi berbasis masyarakat, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan program tersebut harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara luas dan berkesinambungan.

TJSL juga berfungsi sebagai instrumen untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul akibat aktivitas perusahaan, sekaligus



mengoptimalkan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya pengelolaan TJSLP yang baik, diharapkan dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat, serta memperkuat legitimasi sosial (*social license to operate*) perusahaan di wilayah Kabupaten Pasuruan.

3.3. Kelembagaan Pelaksanaan TJSL

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Pasuruan didukung oleh kelembagaan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, fasilitasi, integrasi, serta pengendalian program TJSL agar berjalan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Kelembagaan ini menjadi unsur penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan TJSL tidak dilakukan secara parsial oleh masing-masing badan usaha, melainkan terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, kelembagaan TJSL dilaksanakan melalui dua unsur utama, yaitu Tim Fasilitasi TJSL Badan Usaha dan Forum TJSL Badan Usaha. Kedua kelembagaan ini memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan TJSL yang terkoordinasi dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Tim Fasilitasi TJSL Badan Usaha merupakan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati, yang bertugas untuk melakukan koordinasi, integrasi, dan sinergi antara program TJSL badan usaha dengan program pembangunan daerah. Selain itu, Tim Fasilitasi juga memiliki kewenangan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL serta menyampaikan laporan kepada Bupati. Keberadaan tim ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa pelaksanaan TJSL berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta tidak terjadi tumpang tindih program antar badan usaha.

Di sisi lain, Forum TJSL Badan Usaha merupakan wadah yang dibentuk untuk mendorong, mengoordinasikan, dan menyinergikan pelaksanaan TJSL antar badan usaha. Forum ini beranggotakan badan usaha yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan dan bersifat wajib untuk diikuti oleh badan usaha. Forum TJSL berfungsi sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi antara badan usaha,

pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga pelaksanaan program TJSL dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah.

Keanggotaan Forum TJSL mencakup berbagai unsur badan usaha, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun badan usaha swasta. Dengan komposisi yang lintas sektor, forum ini mencerminkan prinsip kolaborasi, partisipatif, dan keterbukaan dalam pelaksanaan TJSL. Selain itu, forum juga berperan dalam menghimpun informasi program, menyampaikan laporan pelaksanaan TJSL, serta mendukung proses perencanaan dan pengembangan program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

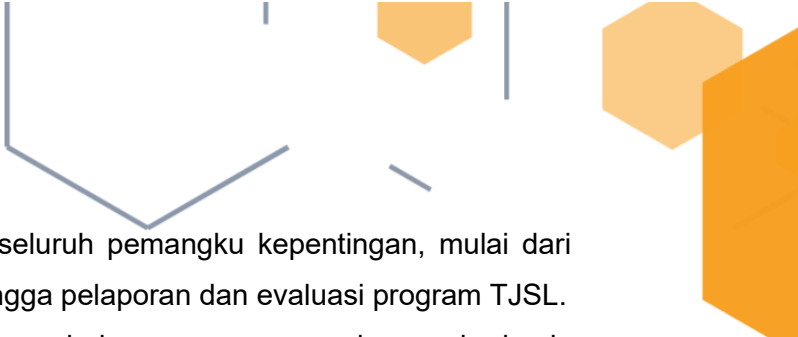
Dalam pelaksanaannya, hubungan antara Tim Fasilitasi TJSL dan Forum TJSL bersifat koordinatif dan saling melengkapi. Tim Fasilitasi berperan sebagai representasi pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan, sedangkan Forum TJSL berperan sebagai wadah pelaksanaan dan kolaborasi antar badan usaha. Sinergi antara kedua kelembagaan ini menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola TJSL yang efektif, terstruktur, dan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator utama dalam penyelenggaraan TJSL, termasuk dalam pembentukan dan pembinaan Tim Fasilitasi serta Forum TJSL. Peran ini mencakup penyediaan dukungan administratif, penguatan koordinasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan TJSL agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam memastikan bahwa pelaksanaan TJSL mendukung prioritas pembangunan daerah.

Sementara itu, badan usaha sebagai pelaku utama TJSL memiliki kewajiban untuk melaksanakan program TJSL secara terencana, terstruktur, serta melaporkan pelaksanaannya kepada pemerintah daerah melalui Tim Fasilitasi. Partisipasi aktif badan usaha dalam Forum TJSL menjadi penting untuk memastikan adanya koordinasi yang baik, menghindari duplikasi program, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan.

3.4. Mekanisme Pelaksanaan TJSL

Mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Pasuruan disusun untuk memastikan bahwa seluruh program yang dilaksanakan oleh badan usaha berjalan secara terencana, terkoordinasi, transparan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Mekanisme ini



menjadi pedoman operasional bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi program TJSL.

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung berbasis permohonan langsung, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025, mekanisme pelaksanaan TJSL diarahkan melalui sistem yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi melalui Tim Fasilitasi TJSL dan Forum TJSL Badan Usaha.

Tahap awal dalam mekanisme pelaksanaan TJSL dimulai dari proses perencanaan program oleh badan usaha dengan mengacu pada bidang TJSL serta prioritas pembangunan daerah. Dalam hal ini, badan usaha diharapkan menyusun rencana program TJSL secara mandiri, namun tetap berkoordinasi dengan Forum TJSL dan Tim Fasilitasi agar program yang direncanakan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah daerah.

Selanjutnya, usulan kebutuhan masyarakat tidak lagi disampaikan secara langsung kepada badan usaha, melainkan melalui mekanisme yang terkoordinasi. Pemerintah daerah melalui Tim Fasilitasi berperan dalam menghimpun, mengidentifikasi, dan memetakan kebutuhan masyarakat yang dapat didukung melalui program TJSL. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa perangkat daerah dan pemerintah desa tidak diperkenankan mengajukan permintaan bantuan secara langsung kepada badan usaha .

Setelah proses perencanaan dan pemetaan kebutuhan, dilakukan tahap sinkronisasi dan koordinasi program melalui Forum TJSL. Pada tahap ini, program-program TJSL yang direncanakan oleh badan usaha disinergikan dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah. Forum TJSL berperan sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar badan usaha, sehingga pelaksanaan program dapat lebih efektif, terarah, dan menghindari duplikasi kegiatan.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan program TJSL oleh badan usaha. Pelaksanaan program dapat dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan, kegiatan pemberdayaan, maupun program pembangunan yang sesuai dengan bidang TJSL. Dalam pelaksanaannya, badan usaha dapat berkoordinasi dengan masyarakat penerima manfaat serta pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang optimal.

Selanjutnya, mekanisme TJSL juga mencakup pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Tim Fasilitasi TJSL memiliki peran dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Pemantauan ini penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan program serta mengantisipasi potensi kendala atau penyimpangan.

Selain itu, badan usaha memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan TJSL secara berkala kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi, paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Laporan ini memuat informasi mengenai jenis kegiatan, lokasi, penerima manfaat, serta capaian program yang telah dilaksanakan.

Dalam mendukung pelaksanaan mekanisme tersebut, Pemerintah Daerah juga mengembangkan sistem informasi TJSL yang berfungsi sebagai sarana pengelolaan data, pelaporan, serta monitoring pelaksanaan program secara terintegrasi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pelaksanaan TJSL dapat lebih transparan, akuntabel, dan mudah dipantau oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dengan mekanisme pelaksanaan yang terstruktur dan terintegrasi ini, diharapkan pelaksanaan TJSL di Kabupaten Pasuruan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.5. Program dan Kegiatan TJSL

Program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Pasuruan dirancang dan dikembangkan sebagai instrumen strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi berbasis kerakyatan, keberlangsungan dunia usaha, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pelaksanaan program TJSL tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi diarahkan untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan melalui pendekatan yang terencana, sistematis, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, pelaksanaan TJSL tidak lagi diklasifikasikan ke dalam bentuk program sebagaimana sebelumnya, melainkan dikelompokkan berdasarkan bidang TJSL.



Adapun bidang TJSL tersebut meliputi:

1. kesejahteraan sosial;
2. pendidikan;
3. kesehatan;
4. seni dan budaya;
5. keagamaan;
6. kewirausahaan;
7. infrastruktur;
8. lingkungan hidup;
9. kepemudaan dan olahraga; dan
10. bidang lain yang mendukung prioritas pembangunan daerah.

Pengelompokan berdasarkan bidang ini bertujuan untuk memberikan arah yang lebih jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan TJSL, sehingga program yang dilaksanakan oleh badan usaha dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.

Dalam implementasinya, bidang kesejahteraan sosial mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti bantuan sosial, pelayanan sosial, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Bidang ini menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan TJSL, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak dan langsung.

Bidang pendidikan meliputi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, antara lain melalui pemberian beasiswa, bantuan sarana pendidikan, serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, bidang kesehatan mencakup kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, seperti program pencegahan penyakit, peningkatan gizi, serta dukungan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada bidang kewirausahaan, program TJSL diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan koperasi melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, penguatan kelembagaan, serta pengembangan produk dan pemasaran. Bidang ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat serta memperkuat ekonomi lokal.

Bidang infrastruktur mencakup pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas masyarakat, seperti fasilitas umum, infrastruktur lingkungan, serta sarana pendukung lainnya. Sedangkan bidang

lingkungan hidup berfokus pada kegiatan pelestarian lingkungan, seperti penghijauan, pengelolaan limbah, serta kegiatan yang mendukung keberlanjutan ekosistem.

Selain itu, bidang seni dan budaya, keagamaan, serta kepemudaan dan olahraga juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan TJSL, yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai sosial, budaya, dan kebersamaan dalam masyarakat. Program pada bidang ini dapat berupa dukungan terhadap kegiatan keagamaan, pelestarian budaya lokal, serta pembinaan generasi muda melalui kegiatan olahraga dan kepemudaan.

Dalam pelaksanaannya, seluruh program TJSL tersebut diarahkan untuk saling mendukung dan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat. Program juga diprioritaskan pada wilayah yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh aktivitas badan usaha, dengan tetap memperhatikan prinsip pemerataan, keberlanjutan, serta kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

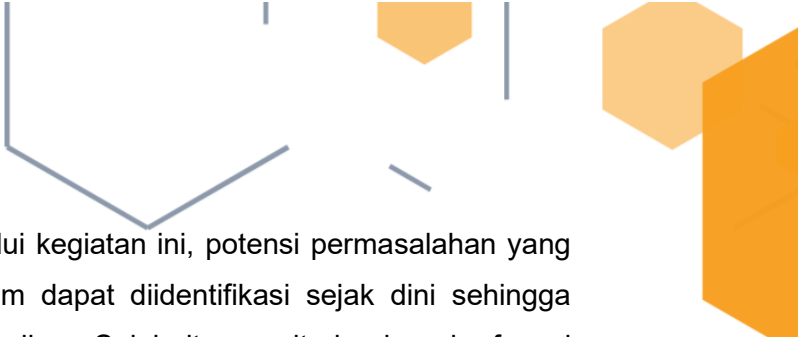
Dengan pendekatan berbasis bidang TJSL ini, diharapkan pelaksanaan TJSL di Kabupaten Pasuruan dapat lebih terarah, terukur, dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

3.6. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan merupakan bagian penting dalam siklus pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Pasuruan. Ketiga aspek ini berfungsi untuk memastikan bahwa program TJSL yang dilaksanakan oleh badan usaha berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi instrumen dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan TJSL.

Monitoring atau pemantauan dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan program TJSL di lapangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kegiatan monitoring dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi TJSL Badan Usaha sebagai bagian dari fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSL. Monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan, baik dari segi lokasi, sasaran penerima manfaat, jenis kegiatan, maupun capaian program.

Dalam pelaksanaannya, monitoring dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, pengamatan langsung, serta koordinasi dengan badan usaha dan



masyarakat penerima manfaat. Melalui kegiatan ini, potensi permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program dapat diidentifikasi sejak dini sehingga dapat segera dilakukan langkah perbaikan. Selain itu, monitoring juga berfungsi untuk menilai tingkat kesesuaian antara rencana program dengan realisasi di lapangan.

Tahapan selanjutnya adalah evaluasi, yang merupakan proses penilaian secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program TJSL. Evaluasi dilakukan oleh Tim Fasilitasi untuk mengetahui tingkat efektivitas program, capaian hasil, serta dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Evaluasi tidak hanya berfokus pada capaian output, tetapi juga mempertimbangkan outcome atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi kendala, hambatan, serta faktor pendukung dalam pelaksanaan program TJSL. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan serta pengembangan program TJSL pada periode berikutnya, sehingga pelaksanaan TJSL dapat terus ditingkatkan kualitas dan keberlanjutannya.

Pelaporan merupakan bagian akhir dari rangkaian pelaksanaan TJSL yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program yang telah dilaksanakan. Dalam ketentuan terbaru, badan usaha memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan TJSL kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Laporan tersebut memuat informasi mengenai jenis kegiatan, lokasi, sasaran penerima manfaat, serta capaian program yang telah dilaksanakan.

Tim Fasilitasi selanjutnya melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh badan usaha sebagai bagian dari proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJSL. Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan laporan pelaksanaan TJSL secara keseluruhan yang disampaikan kepada Bupati sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan TJSL di Kabupaten Pasuruan.

Dalam mendukung proses monitoring dan pelaporan, Pemerintah Daerah juga mengembangkan sistem informasi TJSL sebagai sarana pengelolaan data, pelaporan, dan pemantauan program secara terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akurasi data, serta mempermudah proses evaluasi dan pengambilan kebijakan.

3.7. Penghargaan dan Sanksi

Dalam rangka mendorong optimalisasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Daerah menerapkan mekanisme penghargaan dan sanksi sebagai bagian dari penguatan tata kelola penyelenggaraan TJSL. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha, mendorong partisipasi aktif dunia usaha, serta memastikan bahwa pelaksanaan TJSL berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

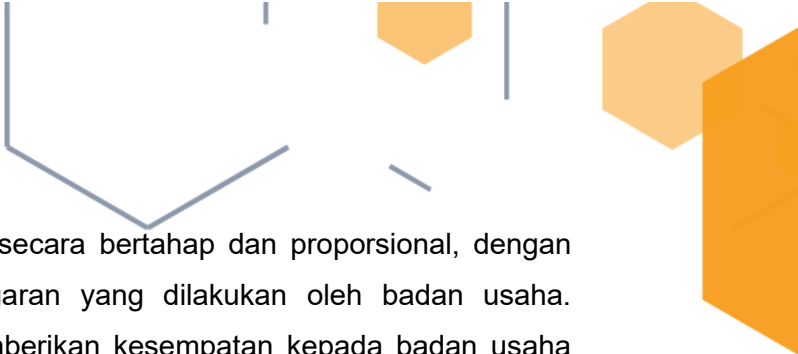
Pemberian penghargaan merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Daerah kepada badan usaha yang telah melaksanakan TJSL secara konsisten, terencana, dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Penghargaan tersebut dapat diberikan dalam bentuk piagam, sertifikat, atau bentuk apresiasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Proses pemberian penghargaan dilakukan melalui mekanisme penilaian terhadap pelaksanaan TJSL, yang mencakup aspek perencanaan, kesesuaian dengan bidang TJSL, pelaksanaan program, dampak yang dihasilkan, serta kontribusi terhadap prioritas pembangunan daerah. Penilaian ini dapat difasilitasi oleh Tim Fasilitasi TJSL sebagai bagian dari fungsi evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program.

Pemberian penghargaan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi badan usaha untuk terus meningkatkan kualitas dan cakupan program TJSL yang dilaksanakan. Selain itu, penghargaan juga menjadi sarana untuk mendorong terciptanya praktik TJSL yang inovatif, berkelanjutan, dan berdaya guna bagi masyarakat.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga menerapkan sanksi administratif bagi badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi ini merupakan bentuk penegakan regulasi sekaligus upaya untuk memastikan bahwa seluruh badan usaha memiliki komitmen dalam melaksanakan TJSL sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2025, sanksi administratif yang dapat diberikan meliputi teguran tertulis dan pertimbangan dalam pelayanan perizinan berusaha.



Pemberian sanksi dilakukan secara bertahap dan proporsional, dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh badan usaha. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada badan usaha untuk melakukan perbaikan dan pemenuhan kewajiban sebelum dikenakan konsekuensi yang lebih lanjut.

BAB IV

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN PASURUAN

4.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Di Kabupaten Pasuruan Tribulan I Tahun 2026

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Pasuruan pada Triwulan I Tahun 2026 memperlihatkan adanya perbaikan pola implementasi yang semakin sistematis dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan daerah. Jika sebelumnya kegiatan TJSL cenderung bersifat insidental dan berfokus pada bantuan langsung, pada periode ini mulai terlihat adanya pergeseran menuju program yang lebih terencana, berkelanjutan, serta mendukung agenda prioritas pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pendataan dan rekapitulasi laporan dari perusahaan, tercatat sejumlah kegiatan TJSL yang dilaksanakan oleh berbagai pelaku usaha di Kabupaten Pasuruan. Program-program tersebut mencakup beberapa sektor utama, antara lain Kesehatan dan pendidikan. Dari sisi jumlah, kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan tingkat partisipasi perusahaan yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan baik dari segi cakupan maupun kualitas program.

Bidang kesehatan menjadi salah satu fokus dominan dalam pelaksanaan TJSL pada Tribulan I ini, khususnya terkait upaya penanganan stunting. Berbagai bentuk intervensi dilakukan dengan menysasar kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan keluarga dengan risiko tinggi. Kegiatan ini umumnya dilaksanakan melalui fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas dan posyandu, sehingga dapat menjangkau masyarakat secara langsung dan memberikan dampak yang lebih nyata.

Pada sektor pendidikan, kegiatan TJSL diarahkan pada pemberian bingkisan bagi anak-anak kurang mampu yang saat ini mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan semangat dan memberikan manfaat jangka panjang, tidak hanya sekadar bantuan sesaat.

Dari sisi persebaran wilayah, masih terdapat konsentrasi di beberapa wilayah tertentu yang dekat dengan area operasional perusahaan. Hal ini menjadi catatan penting agar ke depan distribusi program dapat lebih merata dan mempertimbangkan wilayah dengan tingkat kebutuhan yang lebih tinggi.

Sementara itu, dari aspek pendanaan, seluruh kegiatan TJSL tidak dilengkapi dengan informasi alokasi anggaran yang detail. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas pelaporan, khususnya dalam hal transparansi anggaran, agar dapat mendukung proses perencanaan dan evaluasi program TJSL secara lebih optimal.

4.2. Klasifikasi Program TJSL Berdasarkan Jenis Kegiatan

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Pasuruan pada Tribulan I Tahun 2026 dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercermin dalam tabel rekapitulasi, yang memuat informasi terkait nama perusahaan, bentuk kegiatan TJSL, alokasi anggaran, lokasi pelaksanaan, serta permasalahan dan tindak lanjut. Pengelompokan ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik dan arah kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah.

Secara umum, klasifikasi program TJSL pada periode ini masih didominasi oleh kegiatan yang bersifat bina lingkungan dan sosial. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk intervensi terkait percepatan penurunan stunting, dukungan terhadap fasilitas kesehatan, serta kegiatan edukasi kesehatan. Program-program tersebut dilaksanakan di berbagai lokasi yang tersebar, dengan sasaran utama kelompok masyarakat rentan.

Selain itu, terdapat pula kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Kegiatan ini umumnya berupa bantuan sarana dan prasarana, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta program edukasi yang bersifat langsung dirasakan oleh penerima manfaat. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak program bina lingkungan dan sosial, keberadaan program ini tetap memberikan kontribusi nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

4.2.1. Klasifikasi Program TJSL Berdasarkan Jenis Program

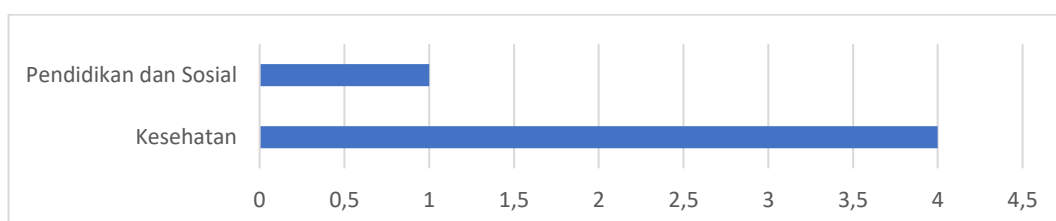
Berdasarkan hasil inventarisasi data pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Pasuruan Tribulan I Tahun 2026, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama sesuai dengan ketentuan peraturan daerah, yaitu program bina lingkungan dan sosial, serta program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat.

Dari total 5 kegiatan TJSL yang tercatat, mayoritas program termasuk dalam kategori program kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan program percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Program ini melibatkan banyak perusahaan dan dilaksanakan secara terintegrasi di berbagai wilayah, sehingga menjadi program yang paling dominan pada Tribulan I Tahun 2026.

Sementara itu, program Pendidikan dan Sosial ditujukan kepada masyarakat masih terdapat dalam jumlah terbatas, seperti kegiatan pemberian bingkisan kepada siswa-siswi sekolah rakyat.

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Program TJSL Berdasarkan Jenis Program Tribulan I Tahun 2026

Jenis Program	Jumlah Kegiatan	Persentase
Kesehatan	4 kegiatan	80%
Pendidikan dan Sosial	1 kegiatan	20%
Total	5 kegiatan	100%



Gambar 4. 1 Proporsi Program TJSL Berdasarkan Jenis Program

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dominasi Program Kesehatan
Sebanyak 4 kegiatan (80%) menunjukkan bahwa pelaksanaan TJSL sangat terfokus pada aspek sosial dan kesehatan masyarakat, khususnya program percepatan penurunan stunting.
2. Program Bersifat Tematik dan Terintegrasi
Berbeda dengan tahun sebelumnya, program TJSL Tribulan I Tahun 2026 menunjukkan pendekatan yang lebih terarah dan tematik, di mana banyak perusahaan berkontribusi pada isu yang sama.
3. Minimnya Program Langsung Non-Stunting

Program langsung kepada masyarakat hanya mencakup sebagian kecil kegiatan, seperti edukasi dan sosialisasi.

4.2.2. Program Kesehatan

Program Kesehatan merupakan kategori utama dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Pasuruan Tribulan I Tahun 2026. Berdasarkan hasil inventarisasi data, sebagian besar kegiatan TJSL termasuk dalam kategori ini, yang didominasi oleh program percepatan penurunan stunting serta kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan dan lingkungan masyarakat.

Program Kesehatan pada Tribulan I Tahun 2026 menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya program lebih bersifat umum dan tersebar pada berbagai bidang, maka pada Tribulan I Tahun 2026 program ini lebih terfokus pada satu isu strategis, yaitu penanganan stunting. Hal ini menunjukkan adanya penyelarasan antara pelaksanaan TJSL dengan prioritas pembangunan daerah.

4.2.3. Program Pendidikan dan Sosial

Program Pendidikan dan Sosial merupakan bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang memberikan manfaat langsung kepada individu maupun kelompok masyarakat. Program ini umumnya bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mudah diimplementasikan dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Berdasarkan hasil inventarisasi data pelaksanaan TJSL di Kabupaten Pasuruan Tribulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori program Pendidikan dan Sosial, meskipun jumlahnya relatif terbatas dibandingkan dengan program bina lingkungan dan sosial.

Program ini pada umumnya berupa kegiatan edukasi, sosialisasi Kesehatan gigi dan pemberian bingkisan, khususnya dalam bidang pendidikan.

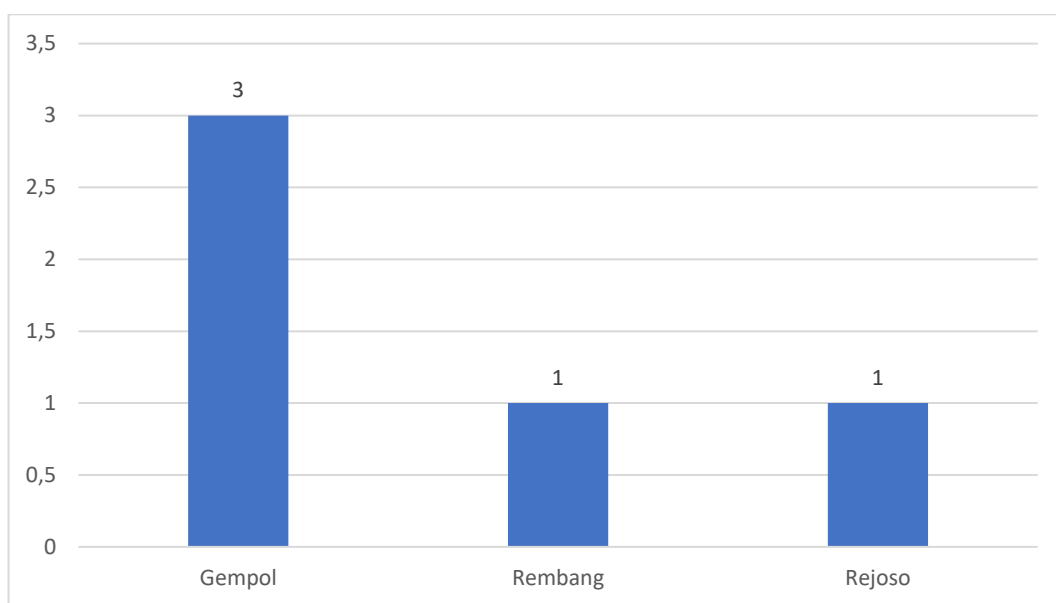
4.3. Distribusi Lokasi Pelaksanaan TJSL

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Pasuruan Tribulan I Tahun 2026 menunjukkan pola distribusi wilayah yang terkonsentrasi di beberapa wilayah tertentu yang dekat dengan area operasional perusahaan

Kecamatan Gempol menjadi wilayah dengan jumlah kegiatan relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya yaitu sebanyak 4 kegiatan. Sementara itu, kecamatan lainnya seperti Rembang dan Rejosu masing-masing memiliki 1 kegiatan.

Tabel 4. 2 Distribusi Pelaksanaan TJSL Berdasarkan Wilayah

Wilayah/Kecamatan	Jumlah Kegiatan	Keterangan
Gempol	3	Kawasan industri
Rejosu	1	Kawasan industri
Rembang	1	Kawasan industri



Gambar 4. 2 Persentase Distribusi Pelaksanaan TJSL Berdasarkan Wilayah

Berdasarkan grafik distribusi lokasi pelaksanaan program TJSL pada Tribulan I Tahun 2026, dapat disampaikan beberapa poin sebagai berikut:

1. Konsentrasi Kegiatan pada Wilayah Tertentu

Pelaksanaan TJSL masih menunjukkan adanya konsentrasi kegiatan pada kecamatan tertentu, khususnya di Kecamatan Gempol dengan jumlah kegiatan paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program masih cenderung terfokus pada wilayah yang memiliki kedekatan dengan aktivitas perusahaan.

2. Kesenjangan Jumlah Kegiatan Antar Wilayah

Terdapat perbedaan yang cukup jelas antara Kecamatan Gempol dengan kecamatan lainnya, yaitu Rembang dan Rejosu, yang masing-masing

hanya memiliki satu kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi program TJSL pada Tribulan I Tahun 2026 belum sepenuhnya merata antar wilayah.

3. Pengaruh Kedekatan dengan Kawasan Industri

Dominasi Kecamatan Gempol dalam pelaksanaan TJSL tidak terlepas dari karakteristik wilayah tersebut sebagai salah satu kawasan dengan aktivitas industri yang cukup tinggi. Hal ini memperkuat kecenderungan bahwa pelaksanaan TJSL masih dipengaruhi oleh lokasi operasional perusahaan.

4. Wilayah Lain Mulai Mendapat Intervensi

Meskipun jumlahnya masih terbatas, keberadaan kegiatan di Kecamatan Rembang dan Rejoso menunjukkan bahwa program TJSL sudah mulai menjangkau wilayah di luar pusat konsentrasi industri. Ini menjadi indikasi awal adanya upaya perluasan cakupan program.

5. Perluasan Cakupan Program Masih Perlu Didorong

Melihat distribusi yang masih terbatas pada beberapa kecamatan, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendorong pemerataan pelaksanaan TJSL ke wilayah lain di Kabupaten Pasuruan. Hal ini penting agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

6. Peluang Penguatan Pendekatan Berbasis Kebutuhan

Ke depan, pelaksanaan TJSL diharapkan tidak hanya mempertimbangkan kedekatan wilayah dengan perusahaan, tetapi juga didasarkan pada tingkat kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, distribusi program dapat menjadi lebih adil dan memberikan dampak yang lebih optimal terhadap pembangunan daerah.

4.4. Alokasi Anggaran Program TJSL Tribulan I Tahun 2026

Alokasi anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), karena mencerminkan tingkat kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Namun demikian, berdasarkan hasil inventarisasi data pelaksanaan TJSL Tribulan I Tahun 2026, seluruh kegiatan belum mencantumkan nilai anggaran secara rinci dalam pelaporannya.

Tabel 4. 3 Klasifikasi Alokasi Anggaran TJSL Tahun 2026

Kategori Anggaran	Rentang Nilai	Jumlah Kegiatan	Persentase
Skala Kecil	< Rp10.000.000	0 kegiatan	0,00%
Skala Menengah	Rp10.000.000 – Rp100.000.000	0 kegiatan	0,00%
Skala Besar	> Rp100.000.000	0 kegiatan	0,00%
Tidak Teridentifikasi	Tidak mencantumkan anggaran	5 kegiatan	100%
Total		5 kegiatan	100%

4.5. Laporan Pelaksanaan Program TJSL di Kabupaten Pasuruan Tribulan I Tahun 2026

Bagian ini menyajikan laporan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Pasuruan Tribulan I Tahun 2026 yang dihimpun dari berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pasuruan. Data yang disajikan merupakan hasil inventarisasi pelaksanaan kegiatan TJSL yang mencakup informasi mengenai nama perusahaan, jenis kegiatan, lokasi pelaksanaan, serta besaran anggaran yang dialokasikan.

Berikut disajikan data lengkap pelaksanaan program TJSL Tribulan I Tahun 2026:

Tabel 4. 4 Laporan Pelaksanaan Program TJSL Kabupaten Pasuruan Tahun 2026

NO.	NAMA PERUSAHAAN	KEGIATAN TSP/CSR PERUSAHAAN	ALOKASI ANGGARAN	LOKASI	PERMASALAHAN/TINDAK LANJUT
1	PT. Nestle Gempol	CSR Pendukung Percepatan Penurunan Stunting berupa mpAsi sebanyak 6 dos untuk dua pos yaitu posyandu Karangbangkal dan posyandu Sejo		Desa Karangrejo Kecamatan Gempol	-
2	PT. Cargill	CSR Pendukung Percepatan Penurunan Stunting berupa pemberian dana yg digunakan untuk PMT di posyandu		Kecamatan Gempol	-
3	PT. Chaeron Pokphan	CSR Pendukung Percepatan Penurunan Stunting berupa Pemberian telur untuk PMT posyandu		Kecamatan Gempol	-
4	PT. Nippon Indosari Corpindo	CSR Pendukung Percepatan Penurunan Stunting berupa PMT Roti untuk setiap Posyandu di Desa Pandean, Pejangkungan dan Pajaran		Desa Pandean, Pejangkungan dan Pajaran	-
5	PT. Nestle Kejayan	Bingkisan acara buka puasa bersama siswa-siswi Sekolah Rakyat Rejoso		Kecamatan Rejoso	-

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pedoman pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan TJSL telah memiliki arah kebijakan yang semakin terstruktur, sistematis, dan terintegrasi. Hal ini ditunjukkan melalui adanya penguatan regulasi daerah, kelembagaan yang jelas, serta mekanisme pelaksanaan yang mengedepankan prinsip koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan.

Secara umum, pelaksanaan TJSL telah mengarah pada upaya mendukung prioritas pembangunan daerah, dengan cakupan program yang meliputi berbagai bidang strategis seperti kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan lingkungan hidup. Pendekatan berbasis bidang TJSL ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan oleh badan usaha lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

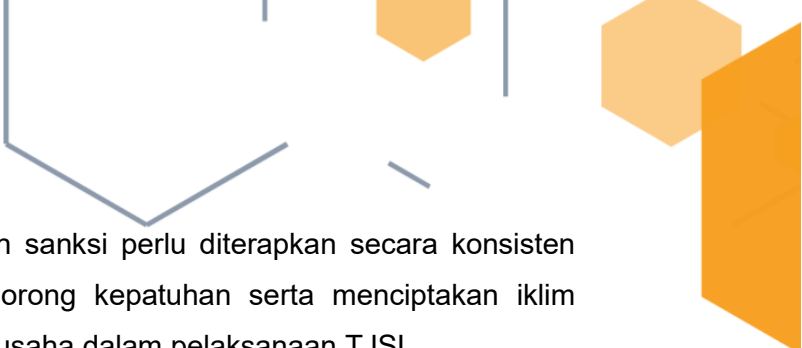
Dalam perkembangan terkini, hingga Tribulan I Tahun 2026 telah terlaksana sebanyak 5 kegiatan TJSL, yang menunjukkan keberlanjutan pelaksanaan program serta komitmen badan usaha dalam mendukung pembangunan daerah sejak awal tahun berjalan. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa tantangan, antara lain belum optimalnya pemerataan program pada seluruh bidang TJSL, khususnya pada aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta masih perlunya peningkatan kualitas pelaporan, terutama terkait transparansi data dan informasi pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, pelaksanaan TJSL di Kabupaten Pasuruan telah menunjukkan perkembangan yang positif, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, maupun mekanisme pelaksanaan. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dalam implementasi di lapangan agar pelaksanaan TJSL dapat lebih optimal, terukur, serta memberikan dampak yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Kabupaten Pasuruan Tribulan I Tahun 2026, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan penguatan pelaksanaan TJSL pada periode selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan
Perlu peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat melalui optimalisasi peran Tim Fasilitasi dan Forum TJSL agar program yang dilaksanakan lebih terintegrasi dan tidak tumpang tindih.
2. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data
Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pemetaan kebutuhan masyarakat berbasis data yang akurat dan mutakhir, sehingga program TJSL dapat lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan.
3. Optimalisasi sistem informasi TJSL
Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi TJSL perlu terus ditingkatkan untuk mendukung transparansi, pelaporan, monitoring, serta pengambilan keputusan berbasis data.
4. Peningkatan kapasitas badan usaha dan pemangku kepentingan
Diperlukan kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan secara berkala agar badan usaha memahami mekanisme dan arah kebijakan TJSL, serta mampu menyusun program yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
5. Fokus pada program yang berdampak jangka panjang (sustainable impact)
Pelaksanaan TJSL perlu diarahkan tidak hanya pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada program pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan kualitas hidup secara berkelanjutan.
7. Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis outcome
Evaluasi program tidak hanya menitikberatkan pada output, tetapi juga pada outcome dan dampak nyata bagi masyarakat, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan.
8. Peningkatan partisipasi aktif badan usaha
Perlu dorongan bagi seluruh badan usaha untuk berpartisipasi aktif dalam Forum TJSL serta melaksanakan kewajiban pelaporan secara tertib sebagai bentuk akuntabilitas.
9. Penguatan implementasi penghargaan dan sanksi



Mekanisme penghargaan dan sanksi perlu diterapkan secara konsisten dan transparan untuk mendorong kepatuhan serta menciptakan iklim kompetisi positif antar badan usaha dalam pelaksanaan TJSL.